

LAKIP

(Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah)

2024



AKSELERASI ASTA CITA

**KOTA
JAKARTA UTARA**

jakutkota.bnn.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara dapat terselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BNN Kota Jakarta Utara tahun 2023 dimaksudkan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menetapkan, bahwa setiap penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat.

BNN Kota Jakarta Utara pada tahun anggaran 2024 telah melaksanakan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap entitas Pelaporan wajib menyusun Laporan Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional sebagai pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program P4GN. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai Lembaga vertikal di bawah Badan Narkotika Nasional, BNN Kota Jakarta Utara melaksanakan 2 (dua) Program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yang dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut telah berpedoman pada rencana strategis lembaga sebagai penjabaran visi dan misi organisasi. Secara umum, Sasaran Strategis BNN Kota Jakarta Utara yang telah ditetapkan telah mencapai target dengan baik bahkan terdapat sasaran kinerja yang melebihi target yang ditentukan. Namun demikian dalam pelaksanaan tugas melalui Program Dukungan Manajemen dan P4GN tentunya BNN Kota Jakarta Utara menemui beberapa hambatan yang dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

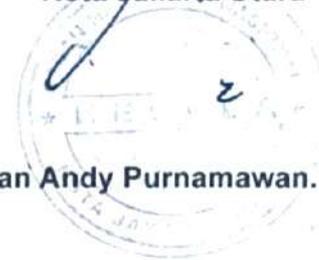
Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja BNN Kota Jakarta Utara ini juga akan menjadi media pertanggungjawaban dan media Evaluasi Kinerja satker secara keseluruhan.

Diharapkan dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja BNN Kota Jakarta Utara pada tahun 2024 dan dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan P4GN di masa yang akan datang.

BNN Kota Jakarta Utara mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini baik dalam kontribusi data, kontribusi penulisan laporan maupun kontribusi bentuk lainnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkati usaha kita semua. Aamiin.

Jakarta, 17 Januari 2024
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Jakarta Utara

Irwan Andy Purnamawan. S.I.K



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
LAMPIRAN	4
DAFTAR TABEL	5
IKHTISAR EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Gambaran Umum	10
1.2 Dasar Hukum	12
1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan	13
1.4 Struktur Organisasi	14
1.5 Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA	17
2.1 Rencana Strategi BNN.....	17
2.2 Rencana Kinerja Tahunan.....	20
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	28
3.1.1 Ringkasan Kinerja	28
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja	31
3.2 Akuntabilitas Keuangan	55
BAB IV PENUTUP	56

LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja 2024**
- 2. Hasil Perhitungan Indeks DEKTARA**
- 3. Hasil Perhitungan Indeks DEKTARI**
- 4. Hasil Pengukuran Indeks KOTAN Tahun 2024**
- 5. Sertifikat Indeks Kapabilitas Rehabilitasi BNNK Jakarta Utara 2024**
- 6. Keputusan Kepala BNN Tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Di Lingkungan Bnn Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024**
- 7. Keputusan Kepala BNN Tentang Penetapan Lokasi Program Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat Tahun 2024**
- 8. Penyampaian Hasil Pengukuran IKM, IKR Dan Prosentase Peningkatan Kualitas Hidup T.A 2024**
- 9. Aplikasi Pelaporan Realisasi Hasil Pemantauan - eMonev PP39 Bappenas**
- 10. Laporan Ketersediaan Dan Per-Desember 2024**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Struktur Organisasi BNN Kota Jakarta Utara Tahun 2024
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Organisasi
3.2	Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba
3.3	Perhitungan Hasil Indeks Ketahanan Diri Remaja
3.4	Capaian Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba
3.5	Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Diri Keluarga
3.6	Capaian IKK Indeks Kemandirian Masyarakat
3.7	Tabel Kemandirian Penggiat Anti Narkoba Lingkungan Pendidikan
3.8	Tabel Kemandirian Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Masyarakat
3.9	Hasil Perhitungan Indeks Kemandirian Masyarakat
3.10	Capaian IKK Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup
3.11	Capaian IKK Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih
3.12	Capaian IKK Jumlah Fasilitas Rehabilitasi Yang Operasional
3.13	Daftar Lembaga Yang Operasional
3.14	Capaian IKK Jumlah Klien Yang Mendapatkan Paket Layanan Rehabilitasi Pada Instansi Pemerintah
3.15	Capaian IKK Persentase Penyerapan Pembiayaan Layanan Rehabilitasi Penyalahguna, Korban Penyalahguna, Dan Pecandu Narkotika Pada Fasilitas Rehabilitasi yang Operasional
3.16	Capaian IKK Jumlah Unit Penyelenggara Layanan IBM yang Operasional
3.17	Capaian IKR Jumlah Kualitas Layanan Rehabilitasi Di Wilayah DKI Jakarta
3.18	Capaian IKM Jumlah Kualitas Layanan Rehabilitasi Di Wilayah DKI Jakarta
3.19	Capaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Jakarta Utara
3.20	Hasil Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BNN Kota Jakarta Utara
3.21	Capaian IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
3.22	Hasil Pengukuran Nilai IKPA BNN Kota Jakarta Utara
3.23	Realisasi Anggaran Tahun 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 65 menyebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional memiliki perwakilan yang berkedudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai dengan bunyi Undang-Undang dimaksud, Badan Narkotika Nasional melalui Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba (P4GN) di wilayahnya masing-masing. Program dan kegiatan tersebut dijabarkan dalam 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Daya Tangkal Anak Dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika

Indikator Kinerja 1 : Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba
Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba merupakan indeks pengukuran “Kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba”. Indikator Kinerja ini memiliki target 52,00 dan terealisasi 47,11 atau sebesar 84,06%

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika

Indikator Kinerja 2 : Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba
Indikator Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba diukur melalui beberapa kegiatan antara lain Pendampingan program ketahanan keluarga. Indikator Kinerja ini memiliki target 78.70 dan terealisasi 93.39 atau sebesar 118.67%.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN

Indikator Kinerja 3 : Indeks Kemandirian Partisipasi Indikator Indeks Kemandirian Partisipasi diukur dari akumulasi jumlah indeks (indikator) dari peran serta masyarakat yang dilakukan secara mandiri dalam upaya P4GN di lingkungannya oleh Pegiat Anti Narkoba. Target indikator kinerja ini adalah 3,25 dan terealisasi 3.55 atau 97.36%

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna Dan/Atau Pecandu Narkotika

Indikator Kinerja 4 : Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup diukur melalui penilaian menggunakan instrumen WHO-QoL. Dalam Layanan Rehabilitasi setiap Klien mengisi Formulir WHO-QoL sebanyak 2x yang dilakukan di awal dan di akhir Layanan. Target indikator kinerja ini adalah 68 dan terealisasi 99.48 atau 146.29%

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi

Indikator Kinerja 5 : Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih Petugas IBM adalah orang atau masyarakat yang tinggal di desa/ kelurahan yang terpilih dan telah mendapatkan pelatihan/ pembekalan sebagai mitra BNN. Target indikator kinerja ini adalah 10 dan terealisasi 10 atau 100%

Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Fasilitas Rehabilitasi yang Operasional

Indikator Kinerja 6 : Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional

Jumlah fasilitas Rehabilitasi yang operasional adalah lembaga instansi medis yang ditunjuk untuk menjalankan program rehabilitasi dan telah melaksanakan program rehabilitasi pada klien.

Target yang ingin dicapai adalah 5 dan hasil yang diperoleh adalah 5 atau sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

Indikator Kinerja 7 : Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional

Intervensi Berbasis Masyarakat merupakan kepedulian pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di masyarakat dengan cara menghadirkan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di masyarakat, mengingat ketersediaan dan aksesibilitas layanan yang masih terbatas jumlahnya. Target Indikator Kinerja ini adalah 2 Unit terealisasi 2 Unit atau sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika Di Klinik Rehabilitasi

Indikator Kinerja 8 : Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Jakarta Utara

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh BNN Kota Jakarta Utara terhadap Klien Rehabilitasi. Target Indikator Kinerja ini 3,77 dan terealisasi 3,84 atau 101.86%

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja secara Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja 9 : Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Jakarta Utara Pengukuran dan Evaluasi Kinerja diukur melalui aspek implementasi dengan indikator pengukuran meliputi Realisasi anggaran, Konsistensi RPD, CRO, Efisiensi dan Nilai Efisiensi. Target yang ingin dicapai adalah 86, sedangkan hasil yang diperoleh adalah 97.75 atau 113.90%

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur

Indikator Kinerja 10 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran. Target yang ingin dicapai adalah 95.99, sedangkan hasil yang diperoleh adalah 95,89 atau 99,90%.

Pagu anggaran untuk mendukung Program di atas sebesar Rp. 1.995.464.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 1.865.422.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) dan prosentase realisasi anggaran 99,28%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pemerintah telah mengesahkan berbagai regulasi yang mengatur pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan, mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial, serta upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang menjadi leading sector penanganan permasalahan narkotika. Adapun tugas dan fungsi BNN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara (BNNK JAKUT) menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran selama Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban BNN Kota Jakarta Utara kepada masyarakat.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, BNN bertugas melakukan P4GN melalui berbagai kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, Bidang Pemberantasan, dan Bidang Hukum dan Kerja sama secara terpadu dan bersinergi dengan seluruh komponen bangsa, yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden

Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 khususnya terkait isu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan Narkoba sebagai perwujudan Misi Asta Cita Presiden RI.

Sebagai wujud dari Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tersebut, Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara telah memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Jakarta Utara dan mengimplementasikan dalam bentuk kegiatan mengajak seluruh lapisan masyarakat, tokoh agama (kerjasama lintas agama), mahasiswa, pelajar, maupun pekerja, pegawai negeri, TNI dan Polri untuk bersinergi menggalang kekuatan untuk memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Jakarta Utara.

Penyebaran narkoba di Kota Jakarta Utara semakin luas di berbagai kalangan. BNN Kota Jakarta Utara bersama Pemerintah Kota Jakarta Utara telah berupaya untuk menekan penyebaran narkoba wilayah Jakarta, terutama di wilayah yang diduga sebagai kantong-kantong peredaran narkoba di Jakarta Utara seperti Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok.

Banyak titik rawan masuknya narkoba secara gelap di Kota Jakarta Utara baik melalui darat maupun perairan/ pelabuhan laut yang menyebabkan banyaknya peredaran gelap narkoba sehingga meningkatkan jumlah penyalahgunaan dan atau pecandu narkoba di wilayah kota Jakarta Utara.

Diharapkan melalui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport bagi Pecandu Narkotika dapat mendorong para penyalahgunaan atau pecandu narkotika melaporkan diri untuk selanjutnya memperoleh perawatan sebagai salah satu sarana untuk mengurangi permintaan atau melawan jaringan sindikat narkoba tanpa melalui penegakan hukum.

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN) perlu dilakukan secara komprehensif dengan tujuan :

- a. Peningkatan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan ketrampilan menolak penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan pencegahan.
- b. Peningkatan terciptanya lingkungan bebas narkoba melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Peningkatan jumlah penyalahgunaan dan atau pecandu yang mendapat perawatan dan berkurangnya tingkat mantan penyalahgunaan dan atau pecandu yang kambuh kembali melalui kegiatan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi.

- d. Peningkatan pengungkapan jaringan sindikat narkoba dan penyitaan asset yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba melalui kegiatan pemberantasan (penegakan hukum).

Dibidang Rehabilitasi, penanganan para pecandu narkoba telah dijabarkan dalam peraturan bersama 6 (enam) kementerian dan lembaga non kementerian yang meliputi Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara dan BNN (Mahkumjakpol, BNN, Kemenkes dan Kemensos) Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba melalui Lembaga Rehabilitasi, yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang didahului dengan kegiatan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Dokter dan Psikolog serta Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham, yang kemudian hasilnya dijadikan rekomendasi penanganan lebih lanjut kepada seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan sebagai penyalahguna narkoba.

Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BNN Kota Jakarta Utara Tahun 2024 ini, sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang kewajiban setiap satuan kerja yang menggunakan dana APBN menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi AKIP;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

a. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta.

b. Tugas

Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Jakarta Utara, seperti diatur dalam dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024, meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal P4GN ;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat serta memantau dan mengarahkan kegiatan masyarakat dalam P4GN;

- f. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba dan;
- g. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di seksi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Kota Jakarta Utara;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis di seksi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Kota Jakarta Utara;
- c) pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kota Jakarta Utara;
- d) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintahan terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Jakarta Utara;
- e) pelaksanaan administrasi BNN Kota Jakarta Utara; dan
- f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kota Jakarta Utara

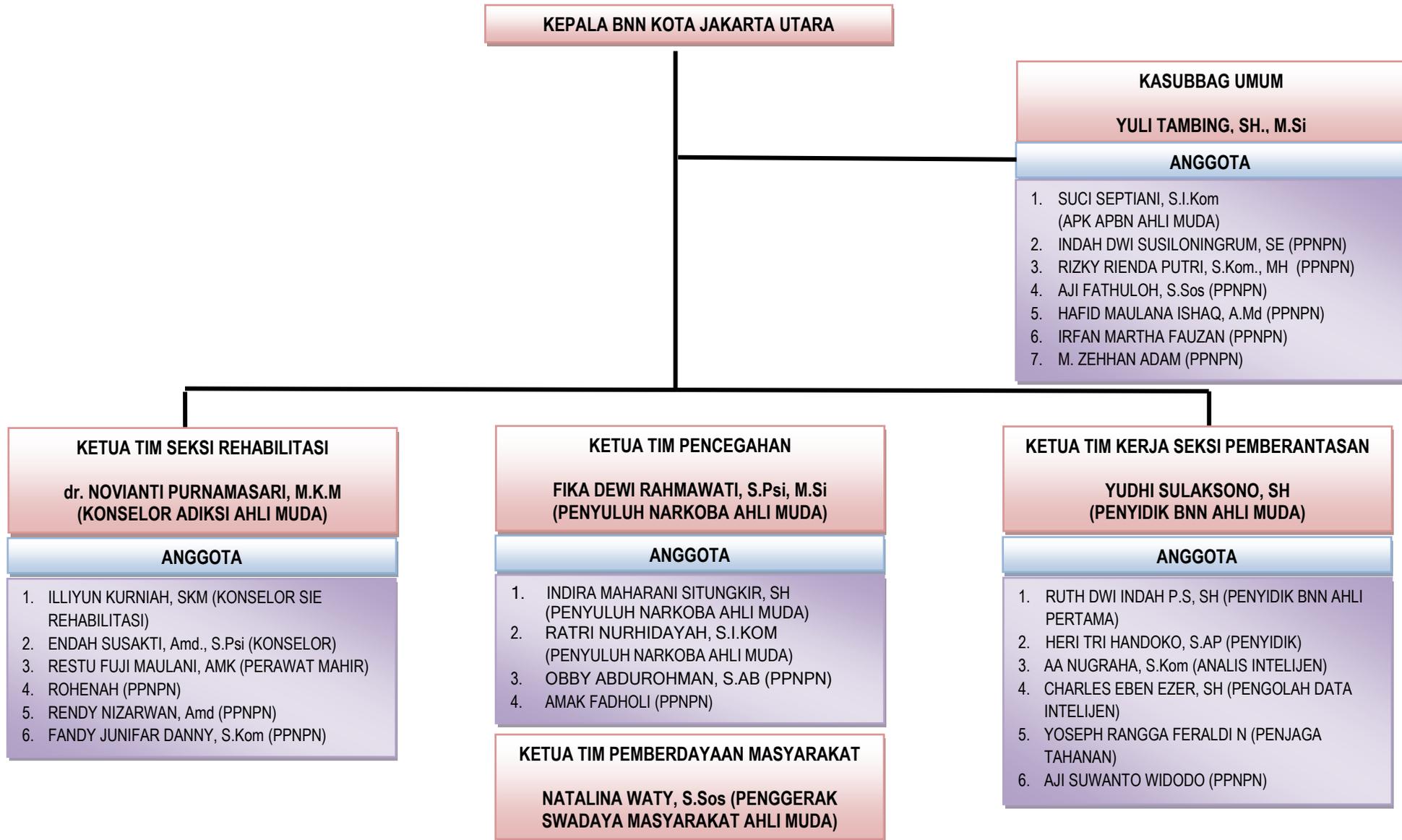
d. Kewenangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024, Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

1.4 Struktur Organisasi

- 1. Susunan Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara terdiri atas:
 - a. Kepala
 - b. Kepala Sub Bagian Umum
 - c. Jabatan Fungsional

Tabel 1.1 Struktur Organisasi BNN Kota Jakarta Utara



1.5 Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, dasar hukum, kedudukan, tugas pokok, fungsi, kewenangan dan struktur organisasi BNN Kota Jakarta Utara serta sistematika penyajian.

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini berisi tentang perencanaan strategis BNN Kota Jakarta Utara yang memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi serta perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja BNN Provinsi DKI Jakarta, BNN Kota Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini berisi tentang Capaian Kinerja Organisasi yang meliputi membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja serta realisasi anggaran.

Bab IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis BNN

Dalam rangka menentukan arah pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang sesuai dengan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional RI (Renstra BNN tahun 2020-2024) dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara sebagai instansi vertikal BNN di Provinsi DKI Jakarta merupakan pelaksana kebijakan dan operasional program dan kegiatan P4GN yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BNN.

Sebagai instansi vertikal Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, BNN Kota Jakarta Utara akan menindaklanjuti Rencana Strategis (Renstra) BNN ke dalam program dan kegiatan. Dalam mengaktualisasi organisasi sebagai instansi pemerintah yang berada di wilayah dan sebagai cita-cita luhur yang akan diwujudkan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara, maka perlu menindaklanjuti Visi dan Misi BNN dan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024 mengacu pada Asta Cita Presiden RI terpilih Periode 2024-2029 sebagai berikut:

The infographic features the BNN Kota Jakarta Utara logo on the left, the 'ASTA CITA' title in large bold letters, and the Indonesian Presidential Seal on the right. Below the title, it lists eight strategic goals. The seventh goal is highlighted with a red border. At the bottom right, there are portraits of President Prabowo Subianto and Vice President Gibran Rakabuming Rano.

ASTA CITA
PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
- 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan Narkoba**
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

VISI	<p>VISI Presiden H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Dalam Asta Cita, adalah: <i>“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”</i></p> <p>VISI Badan Narkotika Nasional adalah: <i>“Menjadi lembaga yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”</i></p>
-------------	---

Dalam upaya untuk mewujudkan visi di atas, maka Presiden H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga telah menetapkan MISI yang juga menjadi bagian MISI Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara, yaitu:

MISI	<p>Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan; 2. Mengoptimalisasi sumberdaya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika; 3. Melaksanakannya pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif; dan 4. Memberantas peredaran gelap narkotika secara profesional.
-------------	--

Berdasarkan visi dan misi Presiden RI Tahun 2024-2029, BNN merumuskan visi dan misi Tahun 2024 yang merupakan penerjemahan atau penyelarasan atas visi dan misi Presiden sebagai berikut:

Visi BNN 2024

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG TERLINDUNGI DAN TERSELAMATKAN DARI KEJAHATAN NARKOTIKA
Mengikuti Visi Presiden 2024 - 2029

Misi BNN 2020-2024

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara Profesional
2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika
3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan



Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan VISI dan MISI tersebut di atas, serta berpedoman pada Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara menetapkan arah kebijakan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

ARAH KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penanganan permasalahan narkoba secara seimbang antara <i>demand reduction</i> dan <i>supply reduction</i>. b. Mengembangkan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan. c. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan narkoba.
-----------------------	--

Strategi-strategi yang ditempuh Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara dalam melaksanakan kebijakan tersebut tahun 2024 adalah sebagai berikut:

STRATEGI	<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mengintegrasikan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ke dalam seluruh isu dan sektor pembangunan melalui konsep penganggaran berwawasan anti narkoba, kebijakan berbasis anti narkoba, serta mendorong pembangunan karakter manusia
-----------------	--

	<p>dengan memasukkan nilai-nilai hidup sehat tanpa narkoba ke dalam kurikulum pendidikan dasar sampai lanjutan atas;</p> <p>b. Menumbuh-kembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dari tingkat desa/kelurahan dengan mendorong relawan-relawan menjadi pelaku P4GN secara mandiri;</p> <p>c. Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta pengoptimalkan peran K/L dalam pemanfaatan infrastruktur dan sumber daya K/L;</p> <p>d. Mengungkap jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkotika dengan menjalin kerja sama dan kemitraan yang harmonis dengan penegak hukum baik dalam maupun luar negeri khususnya dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba;</p> <p>e. Melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi good governance dan clean government di lingkungan BNN Kota Jakarta Utara.</p>
--	--

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Kota Jakarta Utara, maka sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, tugas pokok dan fungsi, dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan.

Sebagai implementasi dari tugas dan fungsi dimaksud serta berdasarkan program yang telah ditetapkan oleh BNN yang menetapkan adanya 2 (dua) program yaitu Program Teknis dan Program Generik, maka perencanaan kinerja BNN Kota Jakarta Utara Tahun 2024 telah dituangkan ke dalam 2 (dua) Program, yaitu:

- 1) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya (*Program Teknis*);
- 2) Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional (*Program Generik*).

Untuk melaksanakan ke 2 (dua) program ini, Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara telah menjabarkannya dalam kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya (*Program Teknis*)

Dengan rincian kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Seksi Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Jakarta Utara

Kegiatan yang dilaksanakan Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Jakarta Utara tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan Advokasi :

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan volume 10 Keluarga & 2 Volume Desa. Kegiatan tersebut direalisasikan melalui kegiatan:

- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.
- Koordinasi Dalam Rangka Pengayaan Referensi Advokasi di BNNP
- Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
- Koordinasi dalam Rangka Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa.
- Rapat Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa.
- Fasilitasi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa.
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa.

2) Pengelolaan informasi dan edukasi P4GN

Memiliki sasaran meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan volume 10 Orang. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Dialog Interaktif Remaja.
- Informasi dan edukasi melalui kampanye/pagelaran seni.

- 2) Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat memiliki sasaran meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN dengan volume 2 lingkungan yaitu Lingkungan Pendidikan dan Lingkungan Masyarakat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- a. Di Lingkungan Instansi Pemerintah :
 - Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK dalam Upaya Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
 - Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba
 - Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota Tanggap Ancaman Narkoba.
 - Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Narkoba pada Sektor Kelembagaan
 - Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Pemerintah
 - b. Di Lingkungan Pendidikan
 - Bimbingan Teknis Penggiat P4GN Lingkungan Pendidikan
 - Workshop Tematik P4GN
 - Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Pendidikan
 - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Pendidikan
 - c. Di Lingkungan Masyarakat
 - Bimbingan Teknis Penggiat P4GN Lingkungan Masyarakat
 - Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Masyarakat
 - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Masyarakat
- 3) Pengelolaan informasi dan edukasi P4GN memiliki sasaran meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan volume 10 Orang. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- Dialog Interaktif Remaja.

- Informasi dan edukasi melalui kampanye/pagelaran seni.

Jumlah Anggaran yang digunakan dalam kegiatan Seksi P2M BNN Kota Jakarta Utara Rp 319.265.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

2. Seksi Rehabilitasi BNN Kota Jakarta Utara

Kegiatan yang dilaksanakan Seksi Rehabilitasi BNN Kota Jakarta Utara tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah melalui kegiatan Standarisasi Profesi dan SDM memiliki sasaran kegiatan meningkatnya kapasitas tenaga rehabilitasi dengan target 5 orang. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Bimbingan teknis Petugas IBM Kelurahan Penjaringan dan Kelurahan Semper Barat.
- 2) Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat memiliki sasaran kegiatan meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba dengan target 4 lembaga, 100 Klien Rawat Jalan, 15 Klien IBM dan 150 Orang Target SKHPN (PNBP) direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - Fasilitasi dan pembinaan Lembaga, melalui kegiatan :
 - Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota
 - Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan.
 - Layanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba (SKHPN)
 - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, melalui kegiatan :
 - Bimbingan Teknis Lembaga Rehabilitasi
 - Monitoring fasilitas rehabilitasi
 - Rapat Koordinasi Tingkat Kota
 - Pembentukan unit IBM
 - Asistensi dan Evaluasi Unit IBM
 - Operasional Unit IBM
 - Pemantauan/Bina Lanjut Unit IBM
 - Layanan Pascarehabilitasi/Bina Lanjut Penyalahguna Narkoba
 - Pemantauan dan Pendampingan Pemulihan (WHOQoL)

Jumlah Anggaran yang digunakan dalam kegiatan Bidang Rehabilitasi sebanyak **Rp 146.957.000,-**

3. Seksi Pemberantasan BNN Kota Jakarta Utara

Penyelenggaraan Asesmen Terpadu bagi Penyalahguna Narkotika

Untuk tahun 2024, target awal Penyelenggaraan Asesmen Terpadu bagi Penyalahguna Narkotika adalah sebanyak 25 orang dengan jumlah anggaran Rp. 35.250.000,-.

Kemudian pada bulan Juli 2024, BNN Kota Jakarta Utara mendapat penambahan anggaran dari Direktorat Wastahti BNN RI sebanyak Rp. 36.250.000,- serta penambahan target klien sebanyak 30 orang.

Jumlah Anggaran yang digunakan dalam kegiatan Seksi Pemberantasan sebanyak **Rp 71.500.000,-** dengan total target klien Asesmen terpadu sebanyak **55 orang**.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional (*Program Generik*).

Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional/ Program Generik tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan terdiri dari 2 komponen kegiatan yaitu :
 - Layanan Perkantoran dengan volume 12 layanan direalisasikan dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran
 - Layanan Manajemen Keuangan dengan volume 2 dokumen direalisasikan dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan
- b) Pengembangan Organisasi, Tata Laksana dan Sumber Daya Manusia
Kegiatan ini terdiri dari 1 komponen kegiatan yaitu Layanan Manajemen SDM dengan volume 1 Layanan. Kegiatan ini direalisasikan dalam rangka :
 - Pengembangan Kapasitas Pegawai melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai berupa Outbond dilaksanakan 1 kali kegiatan.
 - Pelayanan Kesehatan Pegawai meliputi pembinaan jasmani yang terbagi menjadi kegiatan senam sebanyak 5 kali, sewa fasilitas olahraga sebanyak 2 kali dan pelayanan kesehatan pegawai sebanyak 2 paket..

- c) Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN. Terdiri dari 2 sub komponen kegiatan yaitu:
- Layanan perencanaan dan penganggaran dengan target output 2 dokumen yang direalisasikan dalam kegiatan perencanaan kinerja BNN Kota Jakarta Utara, kegiatan koordinasi & sinkronisasi RKA Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran, serta koordinasi penyetaraan anggaran.
 - Layanan pemantauan dan evaluasi dengan target 2 dokumen yang direalisasikan dalam kegiatan koordinasi & sinkronisasi data laporan kinerja & anggaran dan kegiatan koordinasi & sinkronisasi data laporan RAN P4GN Wilayah.
- d) Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana Prasarana Kegiatan ini terdiri dari 2 komponen besar yaitu sebagai berikut .
- i. Layanan Dukungan Manajemen Internal yang mana terdiri dari 2 sub komponen yaitu
 - Layanan Perkantoran, target output 12 Layanan yang direalisasikan dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor melalui kegiatan pemeliharaan gedung & penataan ruang kantor, pemeliharaan mesin dan peralatan kantor, perawatan kendaraan dinas, langganan daya dan jasa lainnya, tenaga kerja kontrak, keperluan sehari-hari perkantoran, honor pengolah BMN, rekonsiliasi lapor BMN ke KPKNL dan honor pejabat pengadaan barang dan jasa.
 - Layanan Umum, target output 1 layanan yang direalisasikan dalam kegiatan rapat kerja teknis, koordinasi kelembagaan, pelatihan menembak dan rapat koordinasi kelembagaan
 - ii. Layanan Sarana Internal dengan volume 3 unit yang dalam kegiatan tersebut terbagi menjadi 2 sub komponen yaitu
 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang direalisasikan dalam bentuk pembelian Laptop
 - Pengadaan peralatan fasilitasi perkantoran yang direalisasikan dalam bentuk pembelian laci cabinet

e) Penyelenggaraan dan Kehumasan dan Keprotokolan

- layanan hubungan masyarakat dan informasi ini memiliki volume 1 layanan. Adapun layanan ini direalisasikan dalam bentuk kegiatan press release, kegiatan kehumasan, publikasi kelembagaan, penyelenggaraan pameran, pengadaan bahan informasi kelembagaan dan peliputan giat kehumasan di dalam kota.

Jumlah Anggaran yang digunakan dalam kegiatan Bagian Umum BNN Kota Jakarta Utara sebanyak **Rp 1,344.031.000,-**

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara yang ditandatangani pada bulan Maret tahun 2024, bahwa Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Unit Organisasi Eselon III : BNN Kota Jakarta Utara
Tahun Anggaran : 2024

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	52.00 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.700 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat	3.65 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 Indeks
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	5 Lembaga
7	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.77 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	86 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95.99 Indeks

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA BNN KOTA JAKARTA UTARA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Ringkasan Kinerja

BNN Kota Jakarta Utara menetapkan 10 (sepuluh) sasaran kegiatan yang akan dicapai dengan indikator kinerja sebanyak 10 (sepuluh) indikator. Adapun realisasi pencapaian kinerja kegiatan tersebut sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	R e a l i s a s i	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	52.00 Indeks	43.71% Indeks	84 %
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.700 Indeks	93.393 Indeks	118%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat	3.65 Indeks	3.55 Indeks	97.26%
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami	68 Indeks	99.48 Indeks	146.29%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	R e a l i s a s i	Capaian
1	2	3	4	5	
		peningkatan kualitas hidup			
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100.00%
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	5 Lembaga	5 Lembaga	100%
7	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100%
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.77 Indeks	3,84 Indeks	101.86%
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	86 Indeks	97.95 Indeks	113.90%
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95.99 Indeks	95.89 Indeks	99.90%

- | | | |
|---|----|-------------|
| 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Rp | 70.000.000 |
| 2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi | Rp | 106.000.000 |
| 3. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat | Rp | 217.645.000 |

4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	15.115.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	166.978.000
6. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp	10.345.000
7. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp	35.350.000
8. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	87.308.000
9. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	11.320.000
10. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	7.091.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	1.228.312.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	10.000.000

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

Untuk mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja BNN Kota Jakarta Utara tahun 2024, BNN Kota Jakarta Utara melakukan pengukuran capaian kinerja melalui evaluasi pelaksanaan kegiatan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel kemudian dianalisa secara deskriptif atau dalam bentuk narasi. Evaluasi capaian sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana uraian berikut :

1.

SASARAN : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

Sasaran kinerja meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Jakarta Utara Tahun 2024 yaitu:

Tabel 3.2
Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022		Capaian 2023		Capaian 2024			Target 2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51.00	53.07	52.00	49.01	52.00	43.71	84%	52.00
		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	indeks		Indeks

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah melalui Pengukuran Ketahanan Diri Anti Narkoba pada Remaja sebagai “Kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba”.

Alat untuk mengukur Indeks Ketahanan Diri Remaja telah dilaksanakan melalui tautan link dektari.bnn.go.id oleh Biro Perencanaan BNN melalui metode ADS (*Anti Drugs Scale*). Alat ukur ADS ini terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yaitu *self regulation*,

assertiveness, dan *reaching out* yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kemampuan individu dalam menghadapi dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba. Metode ini menggunakan Model *Full Form* adalah yang digunakan dengan kuesioner sebanyak 47 (empat puluh tujuh) pertanyaan ADS dan 28 (dua puluh delapan) pertanyaan *predictor*.

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perhitungan Hasil Indeks Ketahanan Diri Remaja

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	$=(\frac{\sum RIK}{\sum TIK}) * 100\%$	$=(\frac{43.71}{52}) * 100\%$ $= 84\%$	$\sum RIK =$ Jumlah Realisasi $\sum TIK =$ Jumlah Target

Adapun klasifikasi indeks rata-rata ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan dengan tabel sebagai berikut:

Sangat Rendah : $\leq 45,97$ Rendah : 45,98 – 49,73

Tinggi : 49,74 – 53,50 Sangat Tinggi : $\geq 53,51$

- Semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba.
- Tingkat kepedulian peserta yang tinggi sangat membantu terhadap upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- Kemampuan menyediakan bahan yang menarik dan bermutu.
-
- Realisasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang dicapai BNN Kota Jakarta Utara di Tahun 2024 berada di angka 43.71 dimana target nasional yang tertuang dalam RENSTRA BNN 2020 -2024 berada di angka 52,00 yang berarti dalam hal ini BNN Kota Jakarta Utara tidak mencapai target yang ditentukan.
- Adapun intervensi yang sudah dilakukan untuk peningkatan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Tahun 2024 diantaranya adalah :

- Meningkatnya kesadaran akan bahaya laten narkoba dari lingkungan pendidikan dengan banyaknya permohonan sosialisasi dari beberapa sekolah di wilayah Jakarta Utara.
- Pemutaran lagu Mars BNN di lingkungan sekolah sebelum upacara/sebelum mulai kegiatan pembelajaran
- Jumlah pelajar di wilayah Jakarta Utara yang terpapar informasi bahaya narkoba sejumlah 5460 pelajar di wilayah Jakarta Utara.
- Jumlah masyarakat, pegawai swasta, dan pegawai pemerintahan yg mendapatkan informasi P4GN melalui sosialisasi sebanyak 585.889 orang.

2.

SASARAN : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Keluarga dinilai menjadi alternatif pencegahan yang paling efektif dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba. Di tahun 2024 ini, BNN Kota Jakarta Utara ditantang untuk mampu memenuhi target indeks ketahanan keluarga 78,70%.

Ketahanan Keluarga Anti Narkoba merupakan kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dimensi ketahanan keluarga anti narkoba adalah sistem keyakinan, proses organisasi, dan proses komunikasi.

Tabel 3.4
Capaian Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022		Capaian 2023		Capaian 2024			Target 2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67	85.714	78,69	78.036	78.70	93.39	118 %	78.70
		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks		Indeks

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tentang Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (DEKTARA) dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain Pendampingan Program Ketahanan Keluarga. Berdasarkan penilaian didapatkan nilai DEKTARA Jakarta Utara sebesar 93.39 dengan kategori Sangat Tinggi. Nilai tersebut melampaui

target yang ditetapkan dalam TAPKIN BNN Kota Jakarta Utara tahun 2024 yaitu sebesar 78,70. Adapun intervensi yang dilakukan dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga adalah dengan melakukan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang dilaksanakan di Kelurahan Penjaringan. Dimana dalam kegiatan tersebut menghadirkan narasumber (praktisi) yang mumpuni dibidangnya yakni Psikolog Keluarga sehingga materi yang disampaikan dapat diaplikasikan langsung oleh audiens yang terdiri dari 5 (lima) keluarga (5 ayah/ibu dan 5 anak). Hal tersebut yang dinilai meningkatkan kualitas pelatihan sehingga materi dapat tersampaikan.

Klasifikasi indeks rata-rata ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai berikut:

- kategori sangat tinggi dengan nilai 88,31 - 100
- kategori tinggi dengan nilai 76,61 - 88,30
- kategori rendah dengan nilai 65,00 - 76,60
- kategori sangat rendah dengan nilai 25,00 - 64,99

Tabel 3.5
Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Diri Keluarga

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	$=(\sum RIK / \sum TIK) * 100\%$	$=(93.39/78.70) * 100\%$ $= 118 \%$	$\sum RIK =$ Jumlah Realisasi $\sum TIK =$ Jumlah Target

Indikator kinerja tersebut di atas merupakan upaya melibatkan peran keluarga dalam program ketahanan keluarga anti narkoba untuk memastikan kelangsungan hidup sehat dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang secara langsung dilakukan oleh BNN Kota Jakarta Utara dalam meningkatkan keterlibatan keluarga adalah:

1. Koordinasi dalam rangka pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba.
2. Fasilitasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba anti narkoba.
3. Intervensi ketahanan keluarga berbasis sumber daya pembangunan desa.

Metode pengukuran yang digunakan adalah melalui kuesioner kepada 5 (lima) keluarga yang terdiri dari 5 (lima) Ibu dan 5 (lima) Anak, dengan kuesioner yang diberikan dan dinilai oleh Direktorat Advokasi, Deputi Bidang Pencegahan BNN.

3.

SASARAN : Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Sasaran Strategis tersebut didukung dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu jumlah instansi/lingkungan yang menjadi output dalam Program Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba sebanyak 2 (dua) lingkungan, yaitu lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Namun institusi yang turut serta/berpartisipasi dalam kebijakan kota tanggap ancaman narkoba adalah Institusi/lembaga pemerintah, instansi swasta, masyarakat, dan lingkungan pendidikan yang secara aktif menyelenggarakan program P4GN melalui penyediaan layanan informasi P4GN, penyelenggaraan sosialisasi bahaya narkoba atau pembinaan penggiat anti narkoba, kemitraan, dan pelaksanaan tes urine.

Dari output 2 (dua) lembaga di tahun 2024, yaitu di lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat menghasilkan beberapa kegiatan/inovasi antara lain:

a. Lingkungan Pendidikan

Pelaksanaan Ikrar/ Deklarasi Anti Narkoba di Sekolah setiap Upacara Senin yang diikuti seluruh pelajar di sebanyak 25 (dua puluh lima) sekolah di wilayah Jakarta Utara.

b. Lingkungan Masyarakat

Pelaksanaan Himbauan P4GN melalui media sosial dan Regulasi terkait Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan komunitas masing masing.

Tabel 3.6
Capaian IKK Indeks Kemandirian Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022		Capaian 2023		Capaian 2024			Target 2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	Indeks Kemandirian Masyarakat	3.2 Indeks	3.59 Indeks	3.25 Indeks	3.65 Indeks	3.65 Indeks	3.55 Indeks	97,26.%	3.55 Indeks

Hasil capaian diukur melalui monitoring dan evaluasi dengan kriteria penilaian instansi/lingkungan yang secara mandiri berpartisipasi menyelenggarakan program P4GN. Dari kelompok sasaran yang berpartisipasi melaksanakan program pemberdayaan yaitu lingkungan pendidikan sebanyak 1 kali kegiatan, 25 (dua puluh lima) sekolah dan

lingkungan masyarakat sebanyak 1 kali kegiatan, 25 (dua puluh lima) perwakilan lingkungan masyarakat.

Metode pengukuran indeks kemandirian partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan P4GN yaitu:

- Pengukuran indikator-indikator tentang kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.
- Melaksanakan wawancara langsung kepada perwakilan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat yang menunjukkan kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.
- Pengisian kuesioner untuk mengetahui sejauh mana kelompok sasaran telah menunjukkan adanya kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.

Dari hasil metode pengukuran indeks kemandirian partisipatif masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pendidikan

Dari hasil pengolahan data IKM pada lingkungan pendidikan yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) Penggiat Anti Narkoba diperoleh hasil bahwa 11 (sebelas) orang Penggiat Anti Narkoba Mandiri dalam mengimplementasikan P4GN, sementara 14 (empat belas) orang Penggiat dengan kategori Sangat Mandiri. Nilai total keseluruhan IKP (Indeks Partisipasi Kemandirian) pada Lingkungan Pendidikan adalah 3.53 atau Sangat Mandiri.

Tabel 3.7 Tabel Kemandirian Penggiat Anti Narkoba Lingkungan Pendidikan

INSTANSI	MANUSIA 20%					METODE 10%					ANGGARAN 20%					SISTEM 20%					SARPRAS 10%					KEGIATAN 20%											TOTAL	IKP	
	1(10)	2(10)	1(5)	2(5)	1(20)	1(4)	2(4)	3(4)	4(4)	5(4)	1(4)	2(2)	3(1)	4(3)	1(2)	2(1)	3(1)	4(1)	5(3)	6(3)	7(2)	8(2)	9(2)	10(2)	11(1)														
B. PENDIDIKAN																																							
CHRISTIANA SRI P - SMPN 21	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	0	0	1	91	3,64	A	SANGAT MANDIRI										
ILAN LESDOKA - SDN SEMPERBARAT 01	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	98	3,92	A	SANGAT MANDIRI										
NUR FITRI RATNASARI - SDN SEMPERBARAT 07	10	10	5	5	0	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	75	3	B	MANDIRI										
ITAH FAITAH - SMAN 111	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	98	3,92	A	SANGAT MANDIRI										
EVRI SANDHA - SMA NURUL FALAH	10	10	5	5	0	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	78	3,12	B	MANDIRI										
ATI ROHMAYATI - MTS AL FALAH	10	10	5	5	0	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	78	3,12	B	MANDIRI										
TEGUP KARYA - SMAN 75	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	97	3,88	A	SANGAT MANDIRI										
NURUL HIKMAH - SMK PSDK III	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	96	3,84	A	SANGAT MANDIRI										
INDRA SUMANTRI - SMA WIJAYA KUSUMA	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	97	3,88	A	SANGAT MANDIRI										
ANDINI PUSPITA SARI - SMP HANG TUAH 1	10	10	5	5	0	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	78	3,12	B	MANDIRI										
MARIO SIMANJUNTAK - SMK GENESARET	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	97	3,88	A	SANGAT MANDIRI										
ADINA AGUM GUMELAR - SMP CORDOVA	10	10	5	5	0	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	80	3,2	B	MANDIRI										
ANGGIARUM WIDIA N - SMA HARAPAN KASIH	10	10	5	5	0	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	77	3,08	B	MANDIRI										
NUFA SURYANA - SMPIT PLUIT RAYA	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	97	3,88	A	SANGAT MANDIRI										
SITI HERAWATI - SMP AL-FATAH	10	10	5	5	0	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	78	3,12	B	MANDIRI										
AWANDA RETNO ASIH - SMK WIJAYA KUSUMA	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	95	3,8	A	SANGAT MANDIRI										
YURIKE BUDIARGO - SMP WIJAYA KUSUMA	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	95	3,8	A	SANGAT MANDIRI										
DWI PURWATI - SMK SARI PUTRA	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	100	4	A	SANGAT MANDIRI										
DEWI KARTINI - SDN SEMPERBARAT 15	10	10	5	5	0	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	78	3,12	B	MANDIRI										
JANUARI HARO - SMP GENESARET	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	0	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	97	3,88	A	SANGAT MANDIRI										
NURHAIDA - SDN PENIARINGAN 03	10	10	5	5	0	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	78	3,12	B	MANDIRI										
ISMAIL - SMAN 92	10	10	5	5	20	2	0	4	4	4	4	2	0	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	93	3,72	A	SANGAT MANDIRI										
RAHMIL NURHAYATI - SDN SEMPERBARAT 13	10	10	5	5	0	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	75	3	B	MANDIRI										
EKA HERMIANTO - SMPN 231	10	10	5	5	0	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	78	3,12	B	MANDIRI										
A. HABIBI - SMP YASPI	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	100	4	A	SANGAT MANDIRI										
																													2204	3,5364	A	SANGAT MANDIRI							

2. Lingkungan Masyarakat

Dari hasil pengolahan data IKP pada Lingkungan Masyarakat yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) Penggiat Anti Narkoba diperoleh hasil bahwa 5 (lima) orang Penggiat dengan Mandiri. 20 (dua puluh) orang Penggiat Anti Narkoba dengan kategori Sangat

Mandiri. Nilai total keseluruhan IKP (Indeks Partisipasi Kemandirian) pada Lingkungan Masyarakat adalah 3.57 atau Sangat Mandiri.

Tabel 3.8 Tabel Kemandirian Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Masyarakat.

No	INSTANSI	PENILAIAN IKP																			TOTAL	IKP									
		BOBOT																													
		MANUSIA 20%			METODE 10%			ANGGARAN 20%			SISTEM 20%				SARPRAS 10%				KEGIATAN 20%												
1 (10)	2 (10)	1 (5)	2 (5)	1 (20)	1 (4)	2 (4)	3 (4)	4 (4)	5 (4)	1 (4)	2 (2)	3 (1)	4 (3)	1 (2)	2 (1)	3 (1)	4 (1)	5 (3)	6 (3)	7 (2)	8 (2)	9 (2)	10 (2)	11 (1)							
A LINGKUNGAN MASYARAKAT																															
1	SULESMI - PKK KEL. PENJARINGAN	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	100	4	A	SANGAT MANDIRI	
2	LILIS YAHYATI - PKK KEL. PENJARINGAN	10	10	5	5	20	4	4	4	4	0	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	2	1	92	3,68	A	SANGAT MANDIRI
3	KUSMANA - LMK KEL. PENJARINGAN	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	0	0	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	2	1	91	3,64	A	SANGAT MANDIRI
4	A. MUH FAIZAL - LMK KEL. PENJARINGAN	10	10	5	5	20	4	4	0	0	0	0	0	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	2	0	78	3,12	B	MANDIRI
5	MALVIN FIRMANSYAH - KARTAR KEL. PENJARINGAN	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	0	1	91	3,64	A	SANGAT MANDIRI
6	RAHMAT - KARTAR KEL. PENJARINGAN	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	0	2	1	3	0	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	87	3,48	A	SANGAT MANDIRI	
7	SYAMSU ALAM - FKDM KEL. PENJARINGAN	10	10	5	5	20	4	4	0	0	0	0	1	3	0	1	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	77	3,08	B	MANDIRI	
8	DENY SYARIFUDIN - FKDM KEL. PENJARINGAN	10	10	5	5	20	4	4	4	4	0	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3,68	A	SANGAT MANDIRI	
9	SUMIYATI - IBM KEL. PENJARINGAN	10	10	5	5	20	4	4	4	4	0	0	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	89	3,56	A	SANGAT MANDIRI	
10	EDI SURYONO - IBM KEL. PENJARINGAN	10	10	5	5	20	4	4	0	0	4	0	1	3	2	1	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	83	3,32	A	SANGAT MANDIRI	
11	ADITYA OCTATIANUS - APT. CBD	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	97	3,88	A	SANGAT MANDIRI	
12	SHELI MEIDIANI - APT. CBD	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	97	3,88	A	SANGAT MANDIRI	
13	PARMONO - APT MITRA BAHARI	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	0	0	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	87	3,48	A	SANGAT MANDIRI	
14	SUNARTO - APT MITRA BAHARI	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	0	2	1	0	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	89	3,56	A	SANGAT MANDIRI	
15	MUJIYONO - APT MITRA BAHARI	10	10	5	5	20	4	4	4	4	0	0	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	89	3,56	A	SANGAT MANDIRI	
16	BUDI SULISTORINI - PKK KEL. SEMPER BARAT	10	10	5	5	20	4	4	0	0	0	0	2	1	0	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	78	3,12	B	MANDIRI	
17	KURNIASIH - PKK KEL. SEMPER BARAT	10	10	5	5	20	4	4	0	0	0	0	2	1	0	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	78	3,12	B	MANDIRI	
18	SYARIF HIDAYATULLAH - LMK KEL. SEMPER BARAT	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3,68	A	SANGAT MANDIRI	
19	SUNARI - LMK KEL. SEMPER BARAT	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	0	0	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	90	3,6	A	SANGAT MANDIRI	
20	KURNIAWAN - KARTAR KEL. SEMPER BARAT	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	100	4	A	SANGAT MANDIRI	
21	DEDI TUHAREA - KARTAR KEL. SEMPER BARAT	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	93	3,72	A	SANGAT MANDIRI	
22	RACHMAT IBNU NUGROHO - FKDM KEL. SEMPER BARAT	10	10	5	5	20	4	4	4	4	0	2	1	3	0	1	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	94	3,76	A	SANGAT MANDIRI	
23	MUKHLIS - FKDM KEL. SEMPER BARAT	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	100	4	A	SANGAT MANDIRI	
24	ARNA ERNAWATI - IBM KEL. SEMPER BARAT	10	10	5	0	20	4	4	4	4	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	88	3,52	A	SANGAT MANDIRI	
25	DJUMADI - IBM KEL. SEMPER BARAT	10	10	5	5	20	4	4	0	0	0	0	1	3	0	1	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	80	3,2	B	MANDIRI	
																									2232	3,5712	A	SANGAT MANDIRI			

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Hasil Perhitungan Indeks Kemandirian Masyarakat

Nilai Indeks Kemandirian Partisipatif

- 1,00 – 1,75 : Tidak Mandiri
- 1,76 – 2,50 : Kurang Mandiri
- 2,51 – 3,25 : Mandiri
- 3,26 – 4,00 : Sangat Mandiri

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Indeks Kemandirian Masyarakat	$= \left(\frac{\sum \text{RIK}}{\sum \text{TIK}} \right) * 100\%$	$= \left(\frac{3.55}{3.65} \right) * 100\% = 97.26\%$	$\sum \text{RIK} = \text{Jumlah Realisasi}$ $\sum \text{TIK} = \text{Jumlah Target}$

Secara keseluruhan nilai Indeks Kemandirian Partisipasi di Jakarta Utara sebesar 3,55. Nilai ini diperoleh dari rata-rata IKP di 2 (dua) lingkungan yaitu Lingkungan Pendidikan dan Lingkungan Masyarakat. Capaian nilai Indeks Kemandirian Partisipasi BNN Kota Jakarta Utara terealisasi sebesar 3,55 dengan target capaian 3,65, dengan demikian capaian target mencapai 97,26%. Adapun faktor yang mendukung kemandirian masyarakat di Jakarta Utara yaitu:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya laten narkoba, hal ini diindikasikan dengan meningkatnya jumlah orang yang terpapar informasi P4GN melalui sosialisasi.
- Penyebaran informasi bahaya narkoba yang dilakukan di lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat yang semakin kreatif dan beragam baik melalui himbauan spanduk, media sosial, pemuatan mural bahaya narkoba, maupun konvoi anti narkoba.

4.

SASARAN : Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba

Dalam sasaran kegiatan ini ditetapkan indikator yaitu Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan target 68 indeks.

Tabel 3.10
Capaian IKK Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022		Capaian 2023		Capaian 2024			Target 2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	-	-	-	-	68 Indeks	99,48 Indeks	146,29 %	68 Indeks

Pengukuran Peningkatan Kualitas Hidup pada penyalahguna dan/atau pecandu yaitu melalui penilaian menggunakan instrumen WHO-QoL. Dalam Layanan Rehabilitasi setiap Klien mengisi Formulir WHO-QoL sebanyak 2x yang dilakukan di awal dan di akhir Layanan. Hasil peningkatan WHO-QoL menunjukkan adanya perubahan Kualitas Hidup Klien setelah menjalani Layanan Rehabilitasi di Klinik Pratama Wira Dharmmesti BNN Kota Jakarta Utara. Dan didapatkan Nilai Peningkatan Persentasi Kualitas Hidup Klien sebesar 99,3 % klien mengalami peningkatan Kualitas Hidup. Aspek dilihat dari seluruh kualitas hidup dan kesehatan secara umum terdiri dari aspek Kesehatan fisik, psikologi, sosial dan lingkungan.

Faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja kegiatan ini adalah:

1. Petugas rehabilitasi melaksanakan kegiatan layanan rehabilitasi pada klien secara optimal.
2. Adanya kesadaran diri klien untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidupnya.
3. Adanya dukungan keluarga yang dapat mempengaruhi pemulihan klien.

5. SASARAN : Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi

Dalam sasaran kegiatan ini ditetapkan indikator yaitu Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan target 5 orang.

Tabel 3.11
Capaian IKK Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022		Capaian 2023		Capaian 2024			Target 2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih	-	-	5 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang

Petugas penyelenggara layanan IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) atau kita kenal dengan sebutan Agen Pemulihan adalah orang atau masyarakat yang tinggal di desa/ kelurahan yang terpilih dan telah mendapatkan pelatihan/ pembekalan sebagai mitra BNN. Dalam indikator kinerja kegiatan ini dengan capaian realisasi 10 orang petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih.

Faktor yang mendukung indikator kinerja kegiatan ini adalah:

1. Adanya kepedulian petugas penyelenggara di wilayahnya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kelurahan yang bersih dari narkoba dan membantu warganya yang membutuhkan layanan rehabilitasi narkoba.
2. Keaktifan dari para petugas penyelenggara layanan IBM dalam menjalankan program IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat).

6.

SASARAN : Terselenggaranya Fasilitas Rehabilitasi yang Operasional

Untuk mendukung sasaran kegiatan ini ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah fasilitas rehabilitasi yang operasional terdiri dari Instansi pemerintah dan Komponen Masyarakat dengan target sebanyak 5 fasilitas, Jumlah klien yang mendapatkan paket layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi yang operasional dengan target 5 Lembaga dan Persentase Penyerapan Pembiayaan Layanan Rehabilitasi Penyalahguna, Korban Penyalahguna, Dan Pecandu Narkotika Pada Fasilitas Rehabilitasi yang operasional dengan target 100%.

Tabel 3.12
Capaian IKK Jumlah Fasilitas Rehabilitasi Yang Operasional

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022		Capaian 2023		Capaian 2024			Target 2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	Jumlah Fasilitas Rehabilitasi Yang Operasional	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	100%	4 Lembaga

Fasilitas rehabilitasi yang operasional adalah fasilitas milik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat yang terdiri dari Rumah Sakit Umum/Daerah, Puskesmas, Yayasan dan Klinik yang menyelenggarakan fungsi layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

Berikut daftar fasilitas rehabilitasi pada yang operasional di wilayah Jakarta Utara:

Tabel 3.13
Daftar Lembaga Yang Operasional

No	Nama Fasilitas	Jenis Layanan Rehabilitasi
1.	Puskesmas Penjaringan	Rawat Jalan
2.	Puskesmas Kelapa Gading	Rawat Jalan
3.	Puskesmas Tanjung Priok	Rawat Jalan
4.	Klinik Sisma Medika Warakas	Rawat Jalan
5.	Klinik Pratama BNNK Jakarta Utara	Rawat Jalan

Faktor pendukung dalam mencapai indikator kinerja kegiatan ini adalah:

1. Peningkatan kemampuan kompetensi bagi petugas layanan rehabilitasi Instansi Pemerintah maupun Komponen Masyarakat baik Klinik Pratama BNNK Jakarta Utara,

Puskesmas Penjaringan, Puskesmas Tanjung Priok, Puskesmas Kelapa Gading, Klinik Sisma Medika Warakas, dan Klinik Pratama BNN Kota Jakarta Utara.

2. Adanya perjanjian kerja sama dengan Puskesmas Kelapa Gading yang menjalankan layanan rehabilitasi. Dan pada tahun ini hasil evaluasi SNI dinyatakan bahwa Puskesmas Kelapa Gading telah memenuhi syarat SNI (Standar Nasional Indonesia).
3. Adanya perjanjian kerja sama dengan Puskesmas Penjaringan dan Tanjung Priok yang menjalankan layanan rehabilitasi.
4. Adanya perjanjian kerja sama dengan Klinik Sisma Medika Warakas yang menjalankan layanan rehabilitasi.
5. Terlaksananya bimbingan teknik kepada lembaga rehabilitasi instansi pemerintah maupun Komponen Masyarakat yaitu Puskesmas Penjaringan, Puskesmas Tanjung Priok, Puskesmas Kelapa Gading, dan Klinik Sisma Medika Warakas untuk meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi dan sinergitas program layanan rehabilitasi penyalahguna narkotika.

Hambatan pada Tahun 2024:

1. Puskesmas Penjaringan, Puskesmas Tanjung Priok, Puskesmas Kelapa Gading, dan Klinik Sisma Medika Warakas dalam melaksanakan layanan rehabilitasi masih kekurangan SDM (Sumber Daya Masyarakat).
2. Belum semua Petugas layanan rehabilitasi mendapatkan Pengembangan kapasitas/pelatihan terkait layanan rehabilitasi.

Tabel 3.14
Capaian IKK Jumlah Klien Yang Mendapatkan
Paket Layanan Rehabilitasi Pada Instansi Pemerintah

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Jumlah klien yang mendapatkan paket layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah	100	118	118%

Tabel 3.15
Capaian IKK Persentase Penyerapan Pembiayaan Layanan Rehabilitasi
Penyalahguna, Korban Penyalahguna, Dan Pecandu Narkotika
Pada Fasilitas Rehabilitasi yang Operasional

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Persentase Penyerapan Pembiayaan Layanan Rehabilitasi Penyalahguna, Korban Penyalahguna, Dan Pecandu Narkotika Pada Fasilitas Rehabilitasi Yang Operasional	100 %	100%	100%

Target persentase 100% tersebut diambil dari dukungan pembiayaan layanan rehabilitasi pada penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang merupakan klien yang memperoleh perawatan atau layanan rehabilitasi pada fasilitas dan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang operasional.

Adapun faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja kegiatan ini adalah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Kepatuhan klien dalam mengikuti program rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNN Kota Jakarta Utara baik. Terdapat 118 orang penyalahguna/ korban penyalahguna/ pecandu narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kota Jakarta Utara
2. Target layanan SIL terpenuhi sebanyak 80 orang berkat dukungan dari stakeholder setempat yang bekerjasama seperti Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Koja, Kecamatan Kelapa Gading, dan Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Cilincing serta informasi dari masyarakat setempat.

7. SASARAN : Terselenggaranya Unit Penyelenggara Layanan IBM yang Operasional

Untuk mendukung sasaran kegiatan ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional dengan target 2 Unit.

Tabel 3.16
Capaian IKK Jumlah Unit Penyelenggara Layanan IBM yang Operasional

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021		Capaian 2022		Capaian 2023			Target 2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan IBM yang Operasional	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah salah satu pendekatan rehabilitasi dalam bentuk minimal dan ambang batas rendah (*low threshold*) yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan banyak persyaratan untuk terlibat didalamnya. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dan mengikutsertakan masyarakat untuk mengintervensi ke masyarakat yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba.

Program IBM merupakan salah satu bentuk respon masyarakat terhadap layanan rehabilitasi minimal dalam kaitan dengan program P4GN terkait Desa Bersinar (Bersih Narkotika). Pada tahun ini Unit IBM (intervensi Berbasis Masyarakat) yang terbentuk realisasinya sebanyak 2 Unit sesuai target yaitu IBM kelurahan Penjaringan dan IBM Kel Semper Barat.

Faktor Pendukung tercapainya sasaran kinerja kegiatan ini adalah:

1. Terlaksananya bimbingan teknik, verifikasi dan monitoring dan evaluasi kepada Unit IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) sehingga diharapkan program ini dapat memenuhi standar pelayanan minimum.
2. Adanya koordinasi yang baik, sinergitas program dengan stakeholder yang ada di wilayah serta petugas IBM yang aktif dalam memberikan layanan program rehabilitasi di wilayah masing-masing.
3. Adanya dukungan penuh dari stakeholder Kelurahan terhadap program IBM baik dalam pelaksanaan Rapat Tim maupun Rapat Koordinasi IBM

Faktor Penghambat :

1. Adanya rutinitas pekerjaan dari masing-masing tim agen pemulihan IBM maupun perangkat kelurahan, sehingga perlu penjadwalan kegiatan dengan baik.
2. Program IBM belum ada pendanaan mandiri yang rutin dari kelurahan maupun CSR.

8.

SASARAN : Tercapainya kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi

Untuk mendukung sasaran kegiatan ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu nilai Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi dengan target 3.2 Indeks.

Tabel. 3.17

Capaian IKR Jumlah Kualitas Layanan Rehabilitasi Di Wilayah DKI Jakarta

Provinsi	Kabupaten/Kota	Indeks Ketersediaan	Indeks Aksesibilitas	Indeks Akseptabilitas	Indeks Kualitas	Indeks Kontinuitas	IKR
DKI JAKARTA	BNN Kota Jakarta Utara	4,00	2,86	2,00	4,00	4,00	3,63

Indeks Kapabilitas rehabilitasi (IKR) adalah pengukuran representatif untuk pemetaan atau potret atas kapabilitas/kemampuan Lembaga rehabilitasi.

Kapabilitas Rehabilitasi mencakup lima indikator yaitu:

1. Ketersediaan (*availability*)
2. Aksesibilitas (*accessibility*)
3. Penerimaan (*acceptability*)
4. Kualitas (*quality*)
5. Keberlanjutan (*continuity*)

yang kemudian indikator tersebut akan diterjemahkan menjadi pertanyaan dalam kuesioner (variabel pembentuk indeks). Nilai IKR Klinik Pratama Wira Dharmmesti BNN Kota Jakarta Utara adalah 3,63 Indeks.

Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi digunakan sebagai rekomendasi untuk optimalisasi kinerja ke depan agar lebih optimal dalam memberikan kualitas layanan rehabilitasi dan SDM di lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah yang ada di wilayah DKI Jakarta khususnya wilayah Jakarta Utara.



Tabel. 3.18
Capaian IKM Jumlah Kualitas Layanan Rehabilitasi
Di Wilayah DKI Jakarta

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022		Capaian 2023		Capaian 2024			Target 2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi	3.2	3.89	3.2	3.89	3.77	3.84	101,85%	3.77
		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks		Indeks

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kota Jakarta Utara.

Terdapat 9 unsur/komponen pertanyaan yang didiskusikan, antara lain persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya/tarif, pelaksana layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.

Faktor yang mendukung sasaran kinerja kegiatan ini adalah:

1. Adanya Petugas Rehabilitasi yang telah mengikuti pengembangan kapasitas dan pelatihan terkait layanan rehabilitasi narkotika.
2. Adanya persyaratan yang mudah untuk penyalahguna dan/atau pecandu narkotika untuk mengikuti layanan rehabilitasi.
3. Adanya prosedur pelayanan sesuai standar kegiatan sesuai waktu yang telah ditetapkan.
4. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung layanan rehabilitasi.

Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi digunakan sebagai rekomendasi untuk optimalisasi kinerja ke depan agar lebih optimal dalam memberikan kualitas layanan rehabilitasi dan SDM di lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah yang ada di wilayah DKI Jakarta khususnya wilayah Jakarta Utara.



Terselenggaranya Inovasi Kegiatan Non DIPA Seksi Rehabilitasi

Ketergantungan narkoba adalah suatu penyakit yang bersifat kronik dan kambuhan. Oleh karena itu, dalam proses terapi dan rehabilitasi terdapat alur dan jenis layanan yang harus dilakukan secara berkelanjutan agar pecandu dan penyalah guna narkoba pulih (McLellan, 2003). Rehabilitasi berkelanjutan merupakan serangkaian proses yang mencakup rehabilitasi medis, sosial dan Pasca rehabilitasi yang dilakukan secara kontinu dalam satu kesatuan layanan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan penyalah guna narkoba terdiri dari serangkaian kegiatan mulai dari proses penerimaan awal hingga pelaksanaan program pasca rehabilitasi.

Kegiatan Inovasi Kegiatan Seksi Rehabilitasi antara lain:

1. Kegiatan Sosialisasi Program IBM di Kelurahan di Wilayah Jakarta Utara.
2. Kegiatan Perjanjian Kerjasama dengan PMI Kota Jakarta Utara serta dilakukannya kegiatan Donor Darah.
3. Kegiatan Perjanjian kerja sama dengan Puskesmas Kec. Kelapa Gading (Layanan Rehabilitasi Rawat jalan).

4. Kegiatan Perjanjian kerja sama dengan Puskesmas Penjaringan (Layanan rehabilitasi Rawat jalan).
5. Kegiatan Perjanjian kerja sama dengan Puskesmas Tanjung Priok (Layanan rehabilitasi Rawat jalan).
6. Kegiatan Perjanjian kerja sama dengan Klinik Sisma Medika Warakas (Layanan rehabilitasi Rawat jalan)
7. Kegiatan Perjanjian kerja sama dengan Koja Trade Mall (layanan mall Pelayanan Publik untuk memberikan edukasi dan informasi terkait bahaya narkoba dan layanan rehabilitasi narkoba).
8. Seksi Rehabilitasi BNN Kota Jakarta Utara mengadakan kegiatan peningkatan Kapasitas Mitra dan klien Rehabilitasi melalui mental health sinergi dengan CSR PT. Indonesia Power dan BNN Kota Jakarta Utara di Kampung Muara Bahari, kantor Kelurahan Tanjung Priok tanggal 16 Mei 2024.
9. Seksi Rehabilitasi BNN Kota Jakarta Utara mengadakan kegiatan promotif Kesehatan “Sosialisasi Deteksi Dini, Bahaya serta Pencegahan Tumor dan Kanker” pada pegawai BNN Kota Jakarta Utara dengan menghadirkan narasumber dari Yayasan Binaan Kanker Nusantara tanggal 28 Mei 2024.
10. BNN Kota Jakarta Utara berpartisipasi untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka Penilaian Kota layak anak tahun 2024. BNN Kota Jakarta Utara berperan aktif dalam penanganan klien anak yang menjalani rehabilitasi narkoba di Klinik Wira Dharmmesti BNN Kota Jakarta Utara.
11. Kegiatan Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Kumala dalam layanan Pascarehabilitasi.
12. Klinik Wira Drarmmesti BNN Kota Jakarta telah dilakukan Survey Akreditasi oleh Lembaga penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna (LPA-PKP) pada tanggal 18-19 Maret 2024 dengan hasil survey Klinik “Paripurna”.



Faktor tercapainya indikator kinerja kegiatan ini adalah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Meningkatkan Sosialisasi dan pendampingan bagi petugas IBM untuk program rehabilitasi maupun pascarehabilitasi pada masyarakat dan lembaga rehabilitasi, baik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat.
2. Terdapatnya dukungan dari stakeholder atau Dinas Instansi Pemerintahan (Kelurahan setempat) di Wilayah Jakarta Utara, sehingga program agen pemulihan pascarehabilitasi dapat berjalan dengan lancar.
3. Adanya Program agen Pemulihan di wilayah (Pademangan Barat, Tanjung Priok, Ancol, Pademangan Timur, Sunter Jaya, Warakas, Papanggo dan Kalibaru) membuat warga lebih berani menjalankan rehabilitasi rawat jalan sampai dengan selesai, sehingga dapat dilanjutkan ke kegiatan pascarehabilitasi, dan dapat hidup produktif dimasyarakat sehingga kembali ke fungsi sosial.
4. Menjalin komunikasi dengan baik kepada seluruh stakeholder melalui sosial media sebagai contoh menggerakkan program seksi rehabilitasi BNNK Jakarta Utara termasuk program IBM dan melakukan motivasi kepada petugas.

Rencana Kerja Program Rehabilitasi Tahun 2025:

1. Melakukan Perpanjangan Kerjasama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik maupun Yayasan yang sudah menjalani Layanan Rehabilitasi.
2. Menambah kerja sama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik maupun Yayasan yang mau membuka layanan Rehabilitasi.

Faktor Hambatan dalam pelaksanaan tugas seksi Rehabilitasi diwilayah Jakarta Utara diantaranya :

1. Jumlah Kuota Peningkatan Kompetensi bagi pegawai rehabilitasi semakin sedikit
2. Minimnya anggaran operasional Intervensi Berbasis Masyarakat, yang salah satunya tidak ada alokasi dana transportasi bagi agen pemulihan. yang dimana rumah dari warga yang menjadi agen pemulihan tidak semuanya dekat dan cukup jauh dari kelurahan sehingga memerlukan biaya transportasi.

9.

SASARAN : Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien

Capaian nilai kinerja anggaran BNN Kota Jakarta Utara didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi.

Untuk mendukung sasaran kegiatan ini ditetapkanlah indikator kinerja kegiatan berupa nilai kinerja anggaran sebesar 91.

Tabel 3.19
Capaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Jakarta Utara

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022		Capaian 2023		Capaian 2024			Target 2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	Nilai Kinerja Anggaran BNN	87	90,88	91	85,54	86	97.95	113.90%	87
		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks		Indeks

Nilai Kinerja Anggaran BNN dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 249/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKA/KL. Aspek yang dinilai adalah aspek implementasi dengan indikator pengukuran meliputi :

- a. Realisasi Anggaran;
- b. Konsistensi RPD Awal;
- c. Konsistensi RPD Akhir;
- d. Capaian Keluaran Kegiatan;
- e. Efisiensi.

Adapun hasil pengukuran nilai kinerja anggaran BNN Kota Jakarta Utara tahun 2022, 2023 dan 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.20
Hasil Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran (NKA)
BNN Kota Jakarta Utara

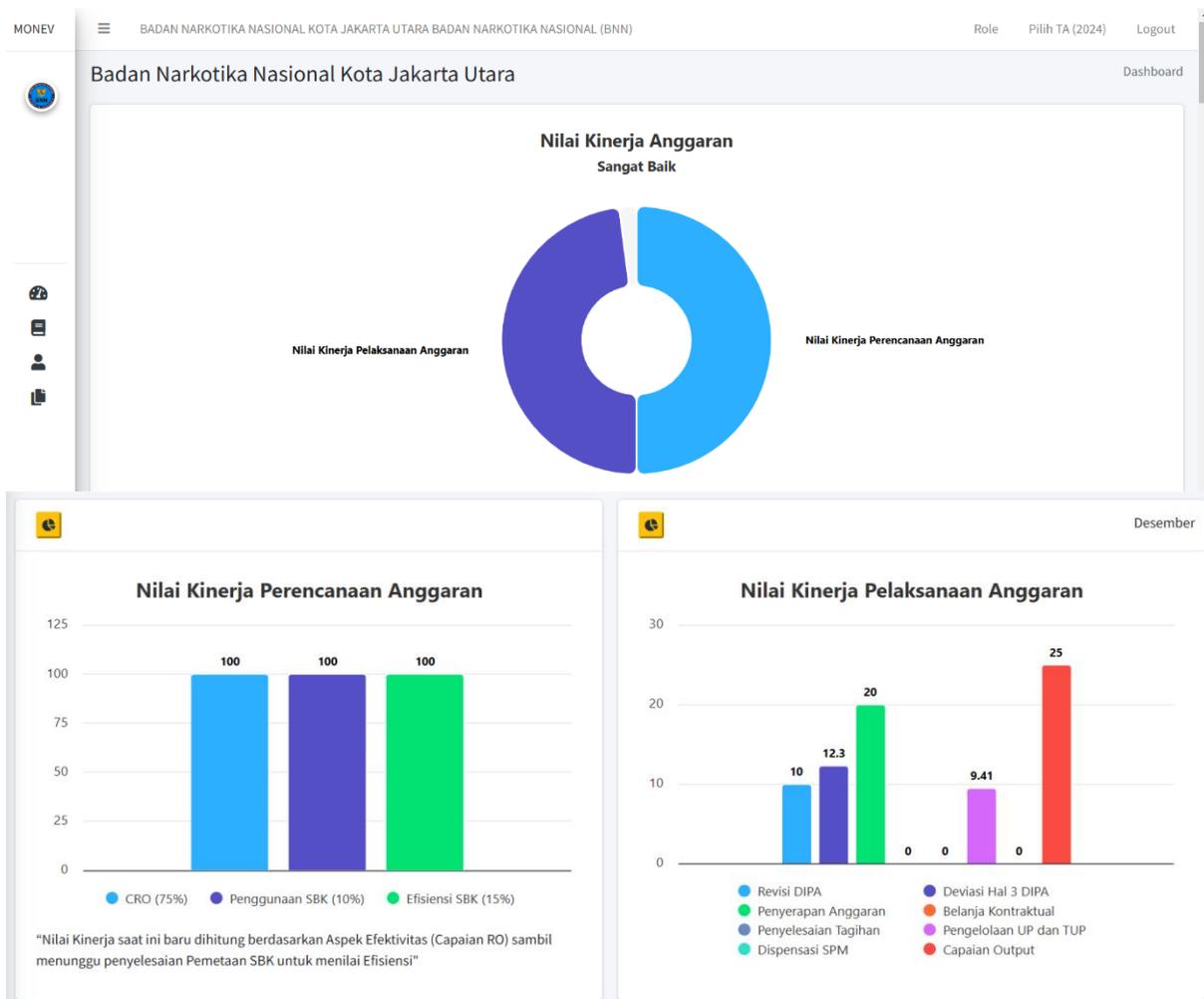
No.	Kategori	Capaian		
		2022	2023	2024
1.	Realisasi Anggaran	99,58	99,21	99,28
2.	Konsistensi RPD Awal	95,52	97,66	-
3.	Konsistensi RPD Akhir	-	-	-
4.	CRO	100	99.54	100

5.	Efisiensi	8,45	0,75	-
6.	Nilai Efisiensi	71,12	51,89	-
	NILAI AKHIR	90,88	85.54	97.95

Sumber : <https://smart.kemenkeu.go.id/>

Realisasi nilai kinerja anggaran diatas didapat dari total realisasi dibandingkan dengan target capaian nilai kinerja anggaran BNN Kota Jakarta Utara.

Capaian nilai kinerja anggaran BNN pada BNN Kota Jakarta Utara terealisasi sebesar 97,95% dengan target capaian 86, dengan demikian capaian target mencapai 113,90%.



Sumber : <https://smart.kemenkeu.go.id/>

10.

SASARAN : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Tabel 3.21 Capaian IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022		Capaian 2023		Capaian 2024			Target 2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Jakarta Utara	95 Indeks	95.50 Indeks	92 Indeks	95.91 Indeks	95,99 Indeks	95,89 Indeks	99,90%	95.99 Indeks



Apabila dibandingkan dengan pencapaian dua tahun sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan capaian IKPA , sebesar 0.02% jika dibandingkan tahun 2023. Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.22
Hasil Pengukuran Nilai IKPA BNN Kota Jakarta Utara

No.	Kategori	2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Revisi DIPA	10	10	10	10	10	10
2	Deviasi Halaman III DIPA	10	8,20	10	6,21	15	12.30
3	Pagu Minus	-	-	-	-	-	-
4	Data Kontrak	-	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan UP dan TUP	10	8,39	10	9,78	10	9,41
6	LPJ Bendahara	-	-	-	-	-	-
7	Dispensasi SPM	-	-	5	5	-	-
8	Penyerapan Anggaran	20	19,96	20	20	20	20
9	Penyelesaian tagihan	0	0	0	0	0	0
10	Capaian Output	25	24.85	25	24.92	25	25,00
11	Retur SP2D	-	-	-	-	-	-
12	Renkas	-	-	-	-	-	-
13	Kesalahan SPM	-	-	-	-	-	-
	Belanja Kontraktual	0	0	0	0	0	0
	Dispensasi SPM	5	5	5	5	0	0
Nilai Total			76,40		95,91		76,71
Konversi Bobot			80%		100%		80
NILAI AKHIR			95,50		95,91		95,89

Dari tabel di atas, terdapat beberapa perbedaan indikator penilaian IKPA, dan baik pada tahun 2022, 2023 maupun tahun 2024 nilai Deviasi Halaman III DIPA belum mencapai target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKPA tersebut diantaranya adanya inkonsistensi jadwal kegiatan yang berakibat pada proses pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan. Adapun upaya yang dilaksanakan oleh BNN Kota Jakarta Utara adalah melalui proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan lebih intensif dan berkesinambungan yang melibatkan unsur-unsur terkait pada Satuan Kerja BNN Kota Jakarta Utara. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dengan variable : revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, Penyerapan anggaran, pengelolaan UP dan TUP, dispensi SPM dan Capaian Output BNN Kota Jakarta Utara.

Capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN pada BNN Kota Jakarta Utara terealisasi sebesar 95,89% dengan target capaian 95,99, dengan demikian capaian target mencapai 93,05%.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	088	066	419258	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA UTARA	Nilai	100.00	81.99	100.00	0.00	0.00	94.10	100.00	76.71	80%	0.00	95.89
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.30	20.00	0.00	0.00	9.41	25.00				
					Nilai Aspek	91.00		97.05			100.00					

Sumber : <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

Faktor keberhasilan pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

1. kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu serta tepat sasaran.
2. Penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Laporan Keuangan BNN telah tersusun dan disajikan dengan basis akrual (informasi laporan keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel).
4. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
5. Tercapainya pelayanan perkantoran baik dalam penatausahaan, kepegawaian dan pemeliharaan alat olah data.
6. Dukungan dari jajaran Pemda Kota Jakarta Utara yang direalisasikan berupa Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 228 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

7. Terjalinnnya sinergitas antara BNN Kota Jakarta Utara bersama instansi terkait antara Pemda Kota Jakarta Utara, dan jajaran, Imigrasi Jakarta Utara, Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat, LSM dll

Hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang terkait dengan bidang tugas pengelolaan keuangan.
2. Keterbatasan pelatihan yang didapatkan oleh petugas di bidang pengelolaan keuangan.
3. Tidak sesuainya antara pekerjaan di bidang keuangan dengan latar belakang pendidikan petugas.

Rencana aksi langkah ke depan yang akan diambil adalah :

1. Peningkatan koordinasi sesuai dengan bidang tugas.
2. Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam Narkoba.
3. Pengusulan pendidikan personil BNN Kota Jakarta Utara baik struktural maupun fungsional.
4. Pengusulan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.
5. Membangun Team Building dilingkungan BNN Kota Jakarta Utara.
6. Pengusulan penambahan personel mengingat beban kerja yang semakin meningkat yang tentunya berdampak pada penyusunan laporan yang mengawasi harus berimbang.
7. Optimalisasi penggunaan sistem berbasis web base yang sudah ada mulai dari perencanaan (e-planning), implementasi, hingga sistem evaluasi, pelaporan, dan pengendalian kinerja Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), e-monev kemenkeu, e-mindik, monev bappenas, e-sakip reviu,e-kinerja BNN, Dektari BNN & Dektara.bnn.id sebagai sarana komunikasi, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2024 BNN Kota Jakarta Utara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.995.464.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) menjadi Rp. 1.865.422.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) karna adanya Revisi Anggaran yang bersumber Dari Relaksasi AA (Automatic Adjustment) sebanyak 1 kali dan Revisi Penambahan Pagu PNBPNP sebanyak 1 kali dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Tahun 2024

JENIS BELANJA	PAGU AWAL (Rp)	PAGU AKHIR (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
52 Belanja Barang	Rp 1.985.264.000,-	Rp 1.843.922.000,-	Rp 1.831.855.261,-	Rp 12.066.739,-	
53 Belanja Modal	Rp 10.200.000,-	Rp 21.500.000,-	Rp 20.042.892,-	Rp 1.457.108,-	
TOTAL	Rp 1.995.464.000,-	Rp 1.865.422.000,-	Rp 1.851.898.153,-	Rp 13.523.847,-	99,28%

BAB IV PENUTUP

Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara telah berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam upaya pelaksanaan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Hambatan serta kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah Jakarta Utara terus diminimalisir dengan segala daya dan upaya.

Partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan jajaran aparatur negara agar ikut serta peduli terhadap program P4GN dalam upaya membantu BNN Kota Jakarta Utara mengurangi dan menahan angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Jakarta Utara dan bagi para penanggungjawab output kegiatan agar dapat mempedomani jadwal kegiatan (*timeline*) BNN Kota Jakarta Utara yang merupakan landasan bertindak dalam mencapai nilai akuntabilitas kinerja. Atas berkat kerjasama tim yang baik, BNN Kota Jakarta Utara berhasil merealisasikan kegiatan sesuai dengan Penetapan Kinerja yang telah ditentukan dengan capaian yang baik seperti, Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dengan realisasi sebanyak 43.71 Indeks (capaian 84.06%), Jumlah Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dengan realisasi sebanyak 93.39 Indeks (capaian 118.67%), Jumlah Indeks kemandirian Masyarakat dengan realisasi sebanyak 3.55 (capaian 97.26%), Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi yang operasional dengan realisasi capaian sebesar 100%, Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan target 68 indeks realisasi capaian sebesar 99.48 Indeks (capaian 146.29%), Petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan target 10 orang realisasi capaian sebesar 10 Orang (capaian 100%), Unit Penyelenggara Layanan IBM yang Operasional dengan target 2 Unit realisasi capaian sebesar 2 Unit (capaian 100%), IKM Nilai Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi realisasi capaian sebesar 3.84 Indeks (capaian 101.86%), Nilai kinerja anggaran BNN dengan realisasi sebesar 97,95 (capaian 113,90%) dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan realisasi sebesar 95,89 (capaian 99,90%).

Demikian laporan akuntabilitas Kinerja BNN Kota Jakarta Utara tahun 2024 disampaikan untuk dipergunakan sebagai bahan dan data perbandingan pada penyusunan berikutnya.



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA UTARA
TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAMBANG YUDISTIRA, S.Sos., M.Si.
Jabatan : KEPALA BNN KOTA JAKARTA UTARA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. JACKSON LAPALONGA, M.Si.
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI DKI JAKARTA

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

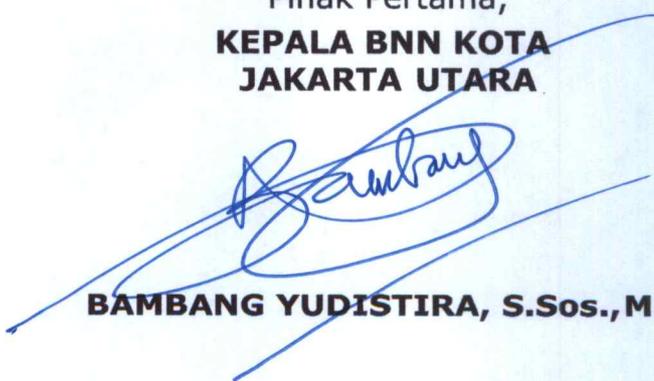
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA BNN PROVINSI
DKI JAKARTA**

Pihak Pertama,
**KEPALA BNN KOTA
JAKARTA UTARA**


Drs. JACKSON LAPALONGA, M.Si.


BAMBANG YUDISTIRA, S.Sos., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA UTARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52.00 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.700 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat	3.65 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 Indeks
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	5 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.77 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	86 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95.99 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.70.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.106.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.217.645.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.15.115.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.166.978.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.10.345.000
7. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.35.350.000
8. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.87.308.000
9. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.11.320.000
10. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.7.091.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.228.312.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.10.000.000

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA BNN PROVINSI
 DKI JAKARTA**



Drs. JACKSON LAPALONGA, M.Si.

Pihak Pertama,
**KEPALA BNN KOTA
 JAKARTA UTARA**



BAMBANG YUDISTIRA, S.Sos., M.Si.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2024

Jakarta, 23 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2024 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :

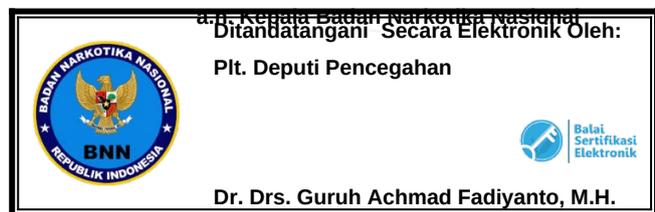
- a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

b. Hasil angka penghitungan Deklara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
 - 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
 - 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
 - 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Deklara Tahun 2024 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNN PUSAT	84,643	TINGGI
2	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	84,911	TINGGI
3	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	80,446	TINGGI
4	BNN KABUPATEN GAYO LUES	80,357	TINGGI
5	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	80,536	TINGGI
6	BNN KOTA SABANG	95,714	SANGAT TINGGI
7	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	93,482	SANGAT TINGGI
8	BNN KOTA LANGSA	86,339	TINGGI
9	BNN KABUPATEN BIREUEN	91,429	SANGAT TINGGI
10	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	94,732	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN PIDIE	81,250	TINGGI
12	BNN KOTA BANDA ACEH	79,911	TINGGI
13	BNNP SUMATERA UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
14	BNN KABUPATEN KARO	84,107	TINGGI
15	BNN KOTA BINJAI	89,732	SANGAT TINGGI
16	BNN KOTA TANJUNG BALAI	84,018	TINGGI
17	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	85,714	TINGGI
18	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	92,768	SANGAT TINGGI
19	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	81,518	TINGGI
20	BNN KABUPATEN LANGKAT	82,232	TINGGI
21	BNN KABUPATEN ASAHAN	87,054	TINGGI
22	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,768	TINGGI
23	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	96,250	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	90,625	SANGAT TINGGI
25	BNN KOTA TEBING TINGGI	80,179	TINGGI
26	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	77,679	TINGGI
27	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN BATU BARA	78,393	TINGGI
29	BNNP SUMATERA BARAT	86,071	TINGGI
30	BNN KOTA SAWAHLUNTO	81,786	TINGGI
31	BNN KOTA PAYAKUMBUH	95,000	SANGAT TINGGI
32	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
33	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	88,214	TINGGI
34	BNNP RIAU	93,571	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	94,286	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN PELALAWAN	90,714	SANGAT TINGGI
37	BNN KOTA PEKANBARU	87,054	TINGGI
38	BNN KOTA DUMAI	90,179	SANGAT TINGGI
39	BNNP JAMBI	90,000	SANGAT TINGGI
40	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	85,804	TINGGI
41	BNN KOTA JAMBI	85,982	TINGGI
42	BNN KABUPATEN BATANGHARI	85,268	TINGGI
43	BNNP LAMPUNG	89,821	SANGAT TINGGI
44	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	83,304	TINGGI
45	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	89,643	SANGAT TINGGI
46	BNN KOTA METRO	88,125	TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
48	BNN KABUPATEN WAY KANAN	82,768	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNNP KEPULAUAN RIAU	93,393	SANGAT TINGGI
50	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,679	SANGAT TINGGI
51	BNN KOTA BATAM	85,446	TINGGI
52	BNN KOTA TANJUNG PINANG	93,214	SANGAT TINGGI
53	BNNP SUMATERA SELATAN	83,214	TINGGI
54	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	77,411	TINGGI
55	BNN KOTA PAGARALAM	86,696	TINGGI
56	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	95,714	SANGAT TINGGI
57	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	86,696	TINGGI
58	BNN KOTA PRABUMULIH	86,339	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	87,768	TINGGI
60	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	81,161	TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	88,750	SANGAT TINGGI
62	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	88,393	SANGAT TINGGI
63	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	84,732	TINGGI
64	BNN KABUPATEN BANGKA	90,714	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA PANGKAL PINANG	84,107	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,679	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	93,214	SANGAT TINGGI
68	BNNP BENGKULU	81,518	TINGGI
69	BNN KOTA BENGKULU	92,857	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	83,393	TINGGI
71	BNNP DKI JAKARTA	85,982	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	75,982	RENDAH
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	79,286	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNN KOTA JAKARTA UTARA	93,393	SANGAT TINGGI
75	BNNP BANTEN	91,607	SANGAT TINGGI
76	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	82,054	TINGGI
77	BNN KOTA CILEGON	86,429	TINGGI
78	BNN KOTA TANGERANG	85,179	TINGGI
79	BNNP JAWA BARAT	82,589	TINGGI
80	BNN KABUPATEN BOGOR	96,339	SANGAT TINGGI
81	BNN KABUPATEN CIANJUR	89,018	SANGAT TINGGI
82	BNN KOTA BANDUNG	96,071	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIREBON	96,875	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA CIMAHI	91,875	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN SUKABUMI	86,071	TINGGI
86	BNN KABUPATEN GARUT	81,071	TINGGI
87	BNN KABUPATEN KUNINGAN	89,107	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN CIAMIS	89,464	SANGAT TINGGI
89	BNN KOTA DEPOK	88,393	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN KARAWANG	84,018	TINGGI
91	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	78,304	TINGGI
92	BNN KOTA TASIKMALAYA	85,625	TINGGI
93	BNN KABUPATEN SUMEDANG	83,839	TINGGI
94	BNNP JAWA TENGAH	87,321	TINGGI
95	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	84,464	TINGGI
96	BNN KOTA TEGAL	89,107	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN BANYUMAS	91,518	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN CILACAP	86,161	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN KENDAL	86,607	TINGGI
100	BNN KABUPATEN BATANG	93,125	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	90,268	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN MAGELANG	82,857	TINGGI
103	BNN KOTA SURAKARTA	86,518	TINGGI
104	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	92,679	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN SLEMAN	90,268	SANGAT TINGGI
106	BNN KOTA YOGYAKARTA	93,304	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN BANTUL	92,054	SANGAT TINGGI
108	BNNP JAWA TIMUR	90,179	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN SUMENEP	87,946	TINGGI
110	BNN KOTA MOJOKERTO	81,875	TINGGI
111	BNN KOTA MALANG	82,500	TINGGI
112	BNN KOTA BATU	90,179	SANGAT TINGGI
113	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	90,000	SANGAT TINGGI
114	BNN KABUPATEN NGANJUK	90,446	SANGAT TINGGI
115	BNN KABUPATEN SIDOARJO	84,821	TINGGI
116	BNN KOTA SURABAYA	87,411	TINGGI
117	BNN KOTA KEDIRI	91,696	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN MALANG	94,375	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN GRESIK	87,589	TINGGI
120	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	96,875	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN LUMAJANG	94,821	SANGAT TINGGI
122	BNN KABUPATEN BLITAR	84,286	TINGGI
123	BNN KABUPATEN KEDIRI	85,625	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN PASURUAN	92,321	SANGAT TINGGI
125	BNN KABUPATEN TUBAN	80,268	TINGGI
126	BNNP KALIMANTAN BARAT	92,857	SANGAT TINGGI
127	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	81,429	TINGGI
128	BNN KABUPATEN SINTANG	82,946	TINGGI
129	BNN KOTA PONTIANAK	94,196	SANGAT TINGGI
130	BNN KOTA SINGKAWANG	77,679	TINGGI
131	BNN KABUPATEN SANGGAU	84,554	TINGGI
132	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	89,554	SANGAT TINGGI
133	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	87,768	TINGGI
134	BNNP KALIMANTAN TENGAH	88,661	SANGAT TINGGI
135	BNN KOTA PALANGKARAYA	89,107	SANGAT TINGGI
136	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	95,000	SANGAT TINGGI
137	BNNP KALIMANTAN SELATAN	84,107	TINGGI
138	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	90,179	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARMASIN	96,607	SANGAT TINGGI
140	BNN KOTA BANJARBARU	85,804	TINGGI
141	BNN KABUPATEN BALANGAN	86,518	TINGGI
142	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	82,857	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	80,268	TINGGI
144	BNN KABUPATEN TABALONG	86,875	TINGGI
145	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
146	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,589	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BALIKPAPAN	91,518	SANGAT TINGGI
148	BNN KOTA SAMARINDA	85,179	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNN KOTA BONTANG	90,804	SANGAT TINGGI
150	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	81,964	TINGGI
151	BNN KABUPATEN BIMA	94,821	SANGAT TINGGI
152	BNN KOTA MATARAM	95,536	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99,375	SANGAT TINGGI
154	BNN KABUPATEN SUMBAWA	79,286	TINGGI
155	BNNP KALIMANTAN UTARA	80,179	TINGGI
156	BNN KOTA TARAKAN	94,732	SANGAT TINGGI
157	BNN KABUPATEN NUNUKAN	91,339	SANGAT TINGGI
158	BNNP SULAWESI UTARA	81,786	TINGGI
159	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	95,982	SANGAT TINGGI
160	BNN KOTA BITUNG	77,589	TINGGI
161	BNN KOTA MANADO	75,804	RENDAH
162	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	95,893	SANGAT TINGGI
163	BNNP SULAWESI TENGAH	84,375	TINGGI
164	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	80,625	TINGGI
165	BNN KABUPATEN MOROWALI	76,964	TINGGI
166	BNN KOTA PALU	82,143	TINGGI
167	BNN KABUPATEN DONGGALA	77,411	TINGGI
168	BNN KABUPATEN POSO	70,625	RENDAH
169	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	81,696	TINGGI
170	BNNP SULAWESI SELATAN	82,321	TINGGI
171	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	95,179	SANGAT TINGGI
172	BNN KABUPATEN BONE	79,821	TINGGI
173	BNN KOTA PALOPO	88,304	TINGGI

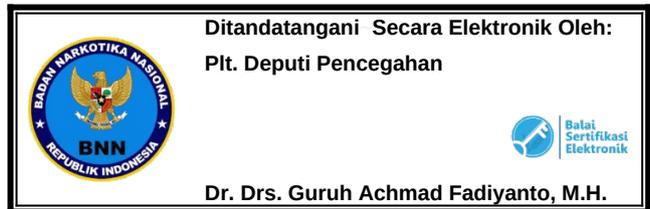
LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNNP SULAWESI TENGGARA	77,589	TINGGI
175	BNN KABUPATEN MUNA	80,804	TINGGI
176	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,786	TINGGI
177	BNN KOTA KENDARI	75,982	RENDAH
178	BNN KOTA BAU-BAU	82,321	TINGGI
179	BNNP SULAWESI BARAT	85,357	TINGGI
180	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	83,125	TINGGI
181	BNNP MALUKU	84,464	TINGGI
182	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	83,482	TINGGI
183	BNN KOTA TUAL	79,732	TINGGI
184	BNNP MALUKU UTARA	88,482	SANGAT TINGGI
185	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	76,429	RENDAH
186	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	75,893	RENDAH
187	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	75,179	RENDAH
188	BNNP BALI	84,375	TINGGI
189	BNN KOTA DENPASAR	84,821	TINGGI
190	BNN KABUPATEN BADUNG	94,375	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN GIANYAR	93,839	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN BULELENG	90,179	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	90,446	SANGAT TINGGI
194	BNN KABUPATEN KARANGASEM	86,518	TINGGI
195	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	88,929	SANGAT TINGGI
196	BNN KABUPATEN BELU	76,696	TINGGI
197	BNN KOTA KUPANG	84,375	TINGGI
198	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	85,893	TINGGI

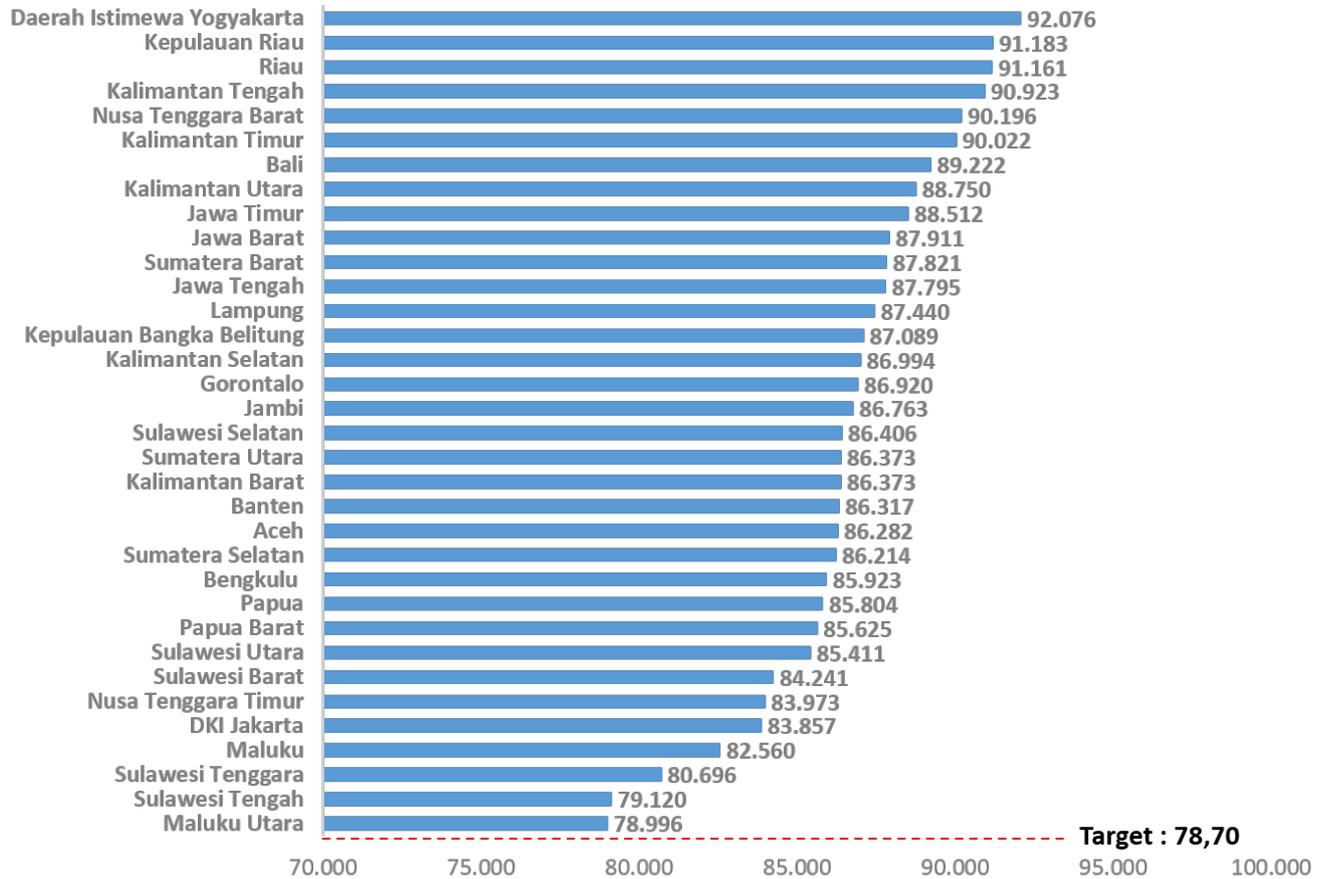
LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNNP GORONTALO	87,946	TINGGI
200	BNN KABUPATEN BOALEMO	79,911	TINGGI
201	BNN KOTA GORONTALO	88,036	TINGGI
202	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	85,179	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO	85,982	TINGGI
204	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	94,464	SANGAT TINGGI
205	BNNP PAPUA	85,268	TINGGI
206	BNN KABUPATEN MIMIKA	90,089	SANGAT TINGGI
207	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,054	TINGGI
208	BNNP PAPUA BARAT	85,625	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2024		86,787	TINGGI

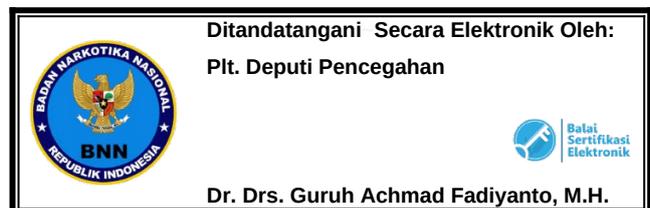
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2024

Jakarta, 24 Desember 2024

Kepada

**Yth. 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota**

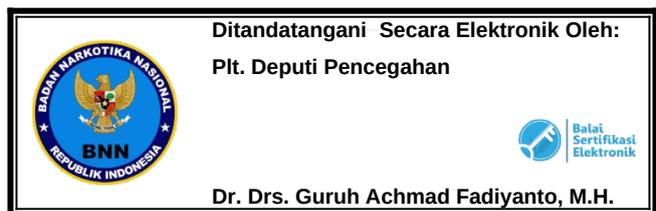
di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Nomor : SE/127/IX/DE/PC.00/2020/BNN tanggal 30 September 2020 tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Melalui Aplikasi Dektari;
- f. Surat Plt. Deputi Pencegahan Nomor : B/3653/XI/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari;
- g. Perjanjian kinerja Direktur Informasi dan Edukasi tahun 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi. Sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 22020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024, dengan hasil sebagai berikut ;
- a. Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota;
 - b. Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2024 adalah **52,04 (Tinggi)** Dengan target **53,51 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 104 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 54 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 23 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 26 Satker
 - c. Hasil penghitungan terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
	BNN PUSAT		
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	52.23	TINGGI
1	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	51.92	TINGGI
2	BNN KABUPATEN GAYO LUES	49.60	RENDAH
3	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	52.04	TINGGI
4	BNN KOTA SABANG	55.47	SANGAT TINGGI
5	BNN KOTA LHOKEUMAWE	50.47	TINGGI
6	BNN KOTA LANGSA	47.27	RENDAH
7	BNN KABUPATEN BIREUEN	48.96	RENDAH
8	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	38.79	SANGAT RENDAH
9	BNN KABUPATEN PIDIE	51.75	Tinggi
10	BNN KOTA BANDA ACEH	55.66	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI ACEH		50,38	TINGGI
2	BNNP SUMATERA UTARA	54.82	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN KARO	55.16	SANGAT TINGGI
12	BNN KOTA BINJAI	55.72	SANGAT TINGGI
13	BNN KOTA TANJUNG BALAI	51.91	TINGGI
14	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	53.42	TINGGI
15	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	42.08	SANGAT RENDAH
16	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	45.42	SANGAT RENDAH
17	BNN KABUPATEN LANGKAT	49.89	TINGGI
18	BNN KABUPATEN ASAHAN	52.48	TINGGI
19	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	36.12	SANGAT RENDAH
20	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	55.33	SANGAT TINGGI
21	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	50.11	TINGGI
22	BNN KOTA TEBING TINGGI	48.20	RENDAH
23	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	54.69	SANGAT TINGGI
24	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	52.12	TINGGI
25	BNN KABUPATEN BATU BARA	56.15	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
RATA-RATA SUMATERA UTARA		50.85	TINGGI
3	BNNP SUMATERA BARAT	55.80	SANGAT TINGGI
26	BNN KOTA SAWAHLUNTO	52.35	TINGGI
27	BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN SOLOK	53.36	TINGGI
29	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.33	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA BARAT		53.24	TINGGI
4	BNNP RIAU	53.28	TINGGI
30	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.26	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN PELALAWAN	54.26	SANGAT TINGGI
32	BNN KOTA PEKANBARU	50.28	TINGGI
33	BNN KOTA DUMAI	49.67	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI RIAU		52.55	TINGGI
5	BNNP JAMBI	38.53	SANGAT RENDAH
34	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	53.28	TINGGI
35	BNN KOTA JAMBI	53.65	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN BATANGHARI	43.60	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAMBI		47.26	RENDAH
6	BNNP SUMATERA SELATAN	54.23	SANGAT TINGGI
37	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	52.98	TINGGI
38	BNN KOTA PAGARALAM	55.93	SANGAT TINGGI
39	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	41.66	SANGAT RENDAH
40	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	49.38	RENDAH
41	BNN KOTA PRABUMULIH	54.73	SANGAT TINGGI
42	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	54.98	SANGAT TINGGI
43	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	49.09	RENDAH
44	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	49.41	RENDAH
45	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	55.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA SELATAN		51.83	TINGGI
7	BNNP LAMPUNG	52.30	TINGGI
46	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.60	SANGAT TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.50	SANGAT TINGGI
48	BNN KOTA METRO	39.97	SANGAT RENDAH
49	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	47.28	RENDAH
50	BNN KABUPATEN WAY KANAN	45.42	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI LAMPUNG		49.35	RENDAH
8	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	55.73	SANGAT TINGGI
51	BNN KABUPATEN BANGKA	53.15	TINGGI
52	BNN KOTA PANGKAL PINANG	55.65	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
53	BNN KABUPATEN BELITUNG	51.69	TINGGI
54	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	55.94	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		54.43	SANGAT TINGGI
9	BNNP KEPULAUAN RIAU	54.39	SANGAT TINGGI
55	BNN KABUPATEN KARIMUN	55.84	SANGAT TINGGI
56	BNN KOTA BATAM	54.35	SANGAT TINGGI
57	BNN KOTA TANJUNG PINANG	55.84	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU		55.11	SANGAT TINGGI
10	BNNP BENGKULU	54.88	SANGAT TINGGI
58	BNN KOTA BENGKULU	52.16	TINGGI
59	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	49.61	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI BENGKULU		52.22	TINGGI
11	BNNP DKI JAKARTA	55.70	SANGAT TINGGI
60	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	55.64	SANGAT TINGGI
61	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	43.20	SANGAT RENDAH
62	BNN KOTA JAKARTA UTARA	43.71	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI DKI JAKARTA		49.56	RENDAH
12	BNNP BANTEN	43.44	SANGAT RENDAH
63	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	54.58	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA CILEGON	56.85	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA TANGERANG	55.80	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BANTEN		52.67	TINGGI
13	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55.51	SANGAT TINGGI
66	BNN KABUPATEN SLEMAN	52.04	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANTUL	49.75	TINGGI
68	BNN KOTA YOGYAKARTA	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI DI YOGYAKARTA		53.29	TINGGI
14	BNNP JAWA BARAT	47.36	RENDAH
69	BNN KABUPATEN BOGOR	55.52	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN CIANJUR	55.25	SANGAT TINGGI
71	BNN KOTA BANDUNG	56.40	SANGAT TINGGI
72	BNN KOTA CIREBON	55.91	SANGAT TINGGI
73	BNN KOTA CIMAH	53.62	SANGAT TINGGI
74	BNN KABUPATEN SUKABUMI	55.72	SANGAT TINGGI
75	BNN KABUPATEN GARUT	55.72	SANGAT TINGGI
76	BNN KABUPATEN KUNINGAN	56.18	SANGAT TINGGI
77	BNN KABUPATEN CIAMIS	55.01	SANGAT TINGGI
78	BNN KOTA DEPOK	54.87	SANGAT TINGGI
79	BNN KABUPATEN KARAWANG	48.59	RENDAH

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
80	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.01	SANGAT TINGGI
81	BNN KOTA TASIKMALAYA	51.02	TINGGI
82	BNN KABUPATEN SUMEDANG	52.10	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA BARAT		53.82	SANGAT TINGGI
15	BNNP JAWA TENGAH	55.13	SANGAT TINGGI
83	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	54.41	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA TEGAL	55.88	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN BANYUMAS	54.63	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN CILACAP	55.37	SANGAT TINGGI
87	BNN KABUPATEN KENDAL	54.01	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN BATANG	55.72	SANGAT TINGGI
89	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.73	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN MAGELANG	49.09	RENDAH
91	BNN KOTA SURAKARTA	45.36	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAWA TENGAH		53.53	TINGGI
16	BNNP JAWA TIMUR	54.71	SANGAT TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMENEP	55.67	SANGAT TINGGI
93	BNN KOTA MOJOKERTO	53.49	TINGGI
94	BNN KOTA MALANG	54.85	SANGAT TINGGI
95	BNN KOTA BATU	55.87	SANGAT TINGGI
96	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	56.07	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN NGANJUK	54.38	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN SIDOARJO	55.21	SANGAT TINGGI
99	BNN KOTA SURABAYA	46.86	RENDAH
100	BNN KOTA KEDIRI	55.65	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN MALANG	55.86	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN GRESIK	44.80	SANGAT RENDAH
103	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	54.17	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN LUMAJANG	55.83	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN BLITAR	55.11	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN KEDIRI	55.50	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN PASURUAN	55.87	SANGAT TINGGI
108	BNN KABUPATEN TUBAN	54.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA TIMUR		54.15	SANGAT TINGGI
17	BNNP KALIMANTAN BARAT	55.59	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	52.02	TINGGI
110	BNN KABUPATEN SINTANG	39.87	SANGAT RENDAH
111	BNN KOTA PONTIANAK	55.79	SANGAT TINGGI
112	BNN KOTA SINGKAWANG	53.51	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
113	BNN KABUPATEN SANGGAU	45.00	SANGAT RENDAH
114	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	48.81	RENDAH
115	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	48.70	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		49.91	TINGGI
18	BNNP KALIMANTAN TENGAH	54.16	SANGAT TINGGI
116	BNN KOTA PALANGKARAYA	55.76	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	55.08	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		55.00	SANGAT TINGGI
19	BNNP KALIMANTAN SELATAN	55.75	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	52.58	TINGGI
119	BNN KOTA BANJARMASIN	53.40	TINGGI
120	BNN KOTA BANJARBARU	55.93	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BALANGAN	51.04	TINGGI
122	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	55.34	SANGAT TINGGI
123	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	50.84	TINGGI
124	BNN KABUPATEN TABALONG	51.31	TINGGI
125	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.62	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		53.42	TINGGI
20	BNNP KALIMANTAN TIMUR	55.89	SANGAT TINGGI
126	BNN KOTA BALIKPAPAN	54.67	SANGAT TINGGI
127	BNN KOTA SAMARINDA	52.45	TINGGI
128	BNN KOTA BONTANG	42.46	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		51.37	TINGGI
21	BNNP KALIMANTAN UTARA	55.60	SANGAT TINGGI
129	BNN KOTA TARAKAN	58.30	SANGAT TINGGI
130	BNN KABUPATEN NUNUKAN	56.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA		56.92	SANGAT TINGGI
22	BNNP SULAWESI UTARA	51.16	TINGGI
131	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	48.16	RENDAH
132	BNN KOTA BITUNG	49.71	RENDAH
133	BNN KOTA MANADO	38.13	SANGAT RENDAH
134	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	45.27	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI UTARA		46.49	RENDAH
23	BNNP SULAWESI TENGAH	52.27	TINGGI
135	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	44.29	SANGAT RENDAH
136	BNN KABUPATEN MOROWALI	52.20	TINGGI
137	BNN KOTA PALU	41.55	SANGAT RENDAH
138	BNN KABUPATEN DONGGALA	52.05	TINGGI
139	BNN KABUPATEN POSO	51.89	TINGGI

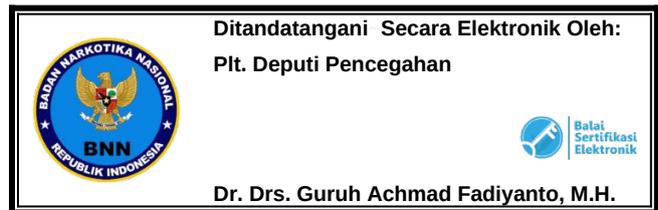
REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
140	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	43.40	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGAH		48.23	RENDAH
24	BNNP SULAWESI SELATAN	53.17	TINGGI
141	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	50.11	TINGGI
142	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	50.53	TINGGI
143	BNN KOTA PALOPO	54.52	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI SELATAN		52.08	TINGGI
25	BNNP SULAWESI TENGGARA	54.55	SANGAT TINGGI
144	BNN KABUPATEN MUNA	50.99	TINGGI
145	BNN KABUPATEN KOLAKA	50.22	TINGGI
146	BNN KOTA KENDARI	54.96	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BAU-BAU	56.68	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA		53.48	TINGGI
26	BNNP SULAWESI BARAT	54.67	SANGAT TINGGI
148	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	51.49	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI BARAT		53.08	TINGGI
27	BNNP MALUKU	46.69	RENDAH
149	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	41.04	SANGAT RENDAH
150	BNN KOTA TUAL	54.73	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU		47.49	RENDAH
28	BNNP MALUKU UTARA	54.68	SANGAT TINGGI
151	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	49.67	RENDAH
152	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	55.35	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	50.91	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU UTARA		52.66	TINGGI
29	BNNP BALI	55.80	SANGAT TINGGI
154	BNN KOTA DENPASAR	59.17	SANGAT TINGGI
155	BNN KABUPATEN BADUNG	50.41	TINGGI
156	BNN KABUPATEN GIANYAR	47.33	RENDAH
157	BNN KABUPATEN BULELENG	55.71	SANGAT TINGGI
158	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	44.95	SANGAT RENDAH
159	BNN KABUPATEN KARANGASEM	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BALI		52.75	TINGGI
30	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	55.73	SANGAT TINGGI
160	BNN KABUPATEN BIMA	54.01	SANGAT TINGGI
161	BNN KOTA MATARAM	55.83	SANGAT TINGGI
162	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	46.26	RENDAH
163	BNN KABUPATEN SUMBAWA	52.70	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		52.91	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
31	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	55.16	SANGAT TINGGI
164	BNN KABUPATEN BELU	55.55	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA KUPANG	40.98	SANGAT RENDAH
166	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		50.73	TINGGI
32	BNNP GORONTALO	55.06	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN BOALEMO	55.61	SANGAT TINGGI
168	BNN KOTA GORONTALO	52.57	TINGGI
169	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	51.11	TINGGI
170	BNN KABUPATEN GORONTALO	53.37	TINGGI
171	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	56.49	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI GORONTALO		54.03	SANGAT TINGGI
33	BNNP PAPUA	51.70	TINGGI
172	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.58	TINGGI
173	BNN KABUPATEN JAYAPURA	39.24	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI PAPUA		47.51	RENDAH
34	BNNP PAPUA BARAT	54.58	SANGAT TINGGI
RATA-RATA NILAI TAHUN 2024		52.04	TINGGI

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks
Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman
Narkoba Tahun 2024.

Jakarta, 23 November 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :

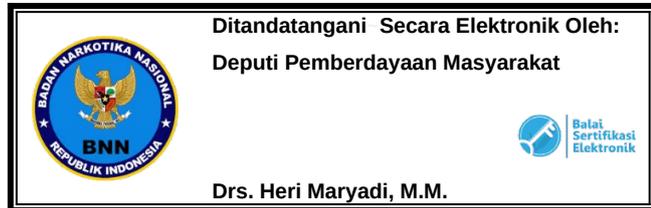
- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat T.A. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) yang dilaksanakan pada 173 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di Indonesia.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil Indeks KOTAN dengan besaran masing-masing variabel sebagaimana terlampir, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi implementasi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba tahun berikutnya.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

HASIL PENGUKURAN INDEKS KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN_NARKOBA TAHUN 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Aceh	2.82	3.54	2.82	2.97	2.99	3.06	Tanggap	B
2.	Gayo Lues	3.48	3.63	3.23	3.35	3.47	3.46	Sangat Tanggap	A
3.	Aceh Selatan	2.99	3.66	3.19	3.47	3.53	3.38	Sangat Tanggap	A
4.	Pidie	2.88	3.59	3.27	3.19	2.91	3.18	Tanggap	B
5.	Pidie Jaya	2.93	3.54	2.65	2.73	2.60	2.96	Tanggap	B
6.	Aceh Tamiang	2.37	3.41	2.48	2.69	2.68	2.76	Tanggap	B
7.	Bireuen	2.71	3.47	2.66	2.90	2.93	2.98	Tanggap	B
8.	Kota Sabang	2.62	3.42	2.44	2.87	3.35	2.98	Tanggap	B
9.	Kota Lhokseumawe	2.55	3.49	2.62	2.90	2.78	2.91	Tanggap	B
10.	Kota Langsa	3.19	3.84	3.22	3.55	3.64	3.51	Sangat Tanggap	A
11.	Banda Aceh	2.83	3.55	2.70	2.85	2.89	3.01	Tanggap	B
12.	Sumatera Utara	2.94	3.51	2.90	3.07	3.06	3.13	Tanggap	B
13.	Mandailing Natal	2.70	3.44	2.54	2.70	2.65	2.86	Tanggap	B
14.	Deli Serdang	3.20	3.57	2.94	3.17	3.13	3.25	Tanggap	B
15.	Simalungun	2.78	3.50	2.79	3.20	3.42	3.16	Tanggap	B

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Serdang Bedagai	2.75	3.52	3.04	3.35	3.21	3.19	Tanggap	B
17.	Kota Pematang Siantar	2.46	3.32	2.35	2.52	2.52	2.69	Tanggap	B
18.	Kota Asahan	2.71	3.32	2.64	2.75	2.67	2.86	Tanggap	B
19.	Kota Tebing Tinggi	3.28	3.52	2.88	2.89	2.99	3.16	Tanggap	B
20.	Kota Tanjungbalai	3.19	3.74	2.96	3.59	3.60	3.46	Sangat Tanggap	A
21.	Tapanuli Selatan	2.94	3.41	3.33	3.24	3.19	3.21	Tanggap	B
22.	Kota Binjai	2.82	3.34	2.68	2.93	2.96	2.99	Tanggap	B
23.	Langkat	2.91	3.62	3.01	3.09	3.00	3.15	Tanggap	B
24.	Kota Gunung Sitoli	3.03	3.43	3.00	3.17	3.28	3.20	Tanggap	B
25.	Labuhan Batu Utara	3.53	3.60	3.18	3.33	3.44	3.45	Sangat Tanggap	A
26.	Karo	2.67	3.35	2.54	2.81	2.90	2.89	Tanggap	B
27.	Batu Bara	2.91	3.91	3.59	3.75	3.47	3.52	Sangat Tanggap	A
28.	Sumatera Barat	3.18	3.55	2.94	3.20	3.33	3.28	Sangat Tanggap	A
29.	Kota Payakumbuh	2.61	3.29	2.65	3.05	3.20	2.98	Tanggap	B
30.	Kota Sawahlunto	2.98	3.46	2.60	2.90	2.91	3.03	Tanggap	B
31.	Pasaman Barat	3.55	3.72	3.52	3.69	3.59	3.63	Sangat Tanggap	A
32.	Solok	3.66	3.73	2.96	3.16	3.63	3.48	Sangat Tanggap	A
33.	Sumatera Selatan	2.94	3.55	2.84	3.17	3.29	3.19	Tanggap	B

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	Kota Pagar Alam	2.84	3.56	2.67	3.04	3.28	3.12	Tanggap	B
35.	Kota Lubuklinggau	2.69	3.21	2.45	2.72	3.26	2.89	Tanggap	B
36.	Prabumulih	3.71	3.88	3.37	3.60	3.45	3.65	Sangat Tanggap	A
37.	Ogan Ilir	2.26	3.49	2.55	3.18	3.67	3.04	Tanggap	B
38.	Ogan Komering Ilir	3.50	3.68	2.79	3.34	3.39	3.42	Sangat Tanggap	A
39.	Empat Lawang	3.21	3.36	3.25	3.34	3.28	3.29	Sangat Tanggap	A
40.	Muara Enim	3.00	3.66	3.01	3.04	3.13	3.19	Tanggap	B
41.	Musi Rawas	2.54	3.25	2.45	2.85	2.99	2.85	Tanggap	B
42.	Ogan Komering Ulu Timur	2.64	3.59	2.74	3.18	3.23	3.11	Tanggap	B
43.	Bengkulu	2.64	3.38	2.35	2.68	2.62	2.80	Tanggap	B
44.	Bengkulu Selatan	2.61	3.47	2.33	2.70	2.62	2.82	Tanggap	B
45.	Kota Bengkulu	2.66	3.29	2.38	2.65	2.62	2.78	Tanggap	B
46.	Jambi	2.67	3.51	2.70	3.01	2.97	3.01	Tanggap	B
47.	Batang Hari	2.76	3.60	2.96	3.26	3.19	3.18	Tanggap	B
48.	Tanjung Jabung Timur	2.60	3.46	2.64	2.84	2.78	2.91	Tanggap	B
49.	Kota Jambi	2.64	3.47	2.44	2.95	2.99	2.96	Tanggap	B
50.	Riau	2.92	3.57	2.90	3.09	3.38	3.19	Tanggap	B
51.	Kota Dumai	2.63	3.38	2.57	2.70	3.18	2.91	Tanggap	B

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	Kota Pekanbaru	3.05	3.62	2.59	3.53	3.72	3.37	Sangat Tanggap	A
53.	Pelalawan	3.78	3.89	3.71	3.69	3.81	3.79	Sangat Tanggap	A
54.	Kuantan Singingi	2.44	3.47	2.79	2.69	3.00	2.88	Tanggap	B
55.	Kepulauan Riau	3.00	3.69	3.01	3.31	3.52	3.33	Sangat Tanggap	A
56.	Karimun	2.97	3.83	3.29	3.30	3.51	3.38	Sangat Tanggap	A
57.	Kota Batam	3.32	3.88	3.22	3.81	3.77	3.64	Sangat Tanggap	A
58.	Tanjung Pinang	2.79	3.38	2.58	2.84	3.29	3.00	Tanggap	B
59.	Bangka Belitung	2.96	3.54	2.96	3.20	3.23	3.21	Tanggap	B
60.	Bangka Selatan	3.15	3.54	2.82	3.01	3.15	3.18	Tanggap	B
61.	Bangka	3.16	3.59	3.39	3.43	3.47	3.40	Sangat Tanggap	A
62.	Kota Pangkalpinang	2.80	3.50	2.73	3.16	3.21	3.12	Tanggap	B
63.	Belitung	2.72	3.53	2.82	3.17	2.97	3.08	Tanggap	B
64.	Lampung	2.88	3.55	2.60	3.01	3.02	3.07	Tanggap	B
65.	Tanggamus	2.52	3.46	2.51	2.92	2.82	2.90	Tanggap	B
66.	Lampung Selatan	3.42	3.85	3.07	3.66	3.65	3.59	Sangat Tanggap	A
67.	Kota Metro	2.76	3.42	2.55	2.92	3.03	2.98	Tanggap	B
68.	Way Kanan	2.95	3.61	2.92	3.28	3.30	3.25	Tanggap	B
69.	Lampung Timur	2.78	3.48	2.23	2.60	2.60	2.83	Tanggap	B

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.	Banten	3.21	3.69	3.07	3.48	3.51	3.43	Sangat Tanggap	A
71.	Kota Tangerang Selatan	3.41	3.84	3.54	3.82	3.86	3.70	Sangat Tanggap	A
72.	Kota Cilegon	2.50	3.66	3.15	3.49	3.49	3.25	Sangat Tanggap	A
73.	Kota Tangerang	3.50	3.63	2.74	3.19	3.25	3.34	Sangat Tanggap	A
74.	DKI Jakarta	2.91	3.56	2.64	2.80	2.70	2.99	Tanggap	B
75.	Kota Jakarta Timur	2.68	3.58	2.49	2.64	2.46	2.84	Tanggap	B
76.	Kota Jakarta Selatan	3.31	3.59	2.88	2.79	2.79	3.13	Tanggap	B
77.	Kota Jakarta Utara	2.63	3.51	2.55	2.97	2.91	2.97	Tanggap	B
78.	Jawa Barat	2.76	3.51	2.58	2.91	2.89	2.99	Tanggap	B
79.	Karawang	2.72	3.46	2.27	2.48	2.51	2.77	Tanggap	B
80.	Sukabumi	2.69	3.35	2.35	2.60	2.58	2.78	Tanggap	B
81.	Bogor	2.62	3.30	2.38	2.80	2.69	2.82	Tanggap	B
82.	Sumedang	2.66	3.38	2.32	2.64	2.70	2.81	Tanggap	B
83.	Tasikmalaya	2.53	3.44	2.28	2.71	2.96	2.84	Tanggap	B
84.	Ciamis	2.70	3.39	2.20	2.66	2.58	2.79	Tanggap	B
85.	Kuningan	2.46	3.14	2.34	3.09	3.15	2.88	Tanggap	B
86.	Kota Cirebon	2.47	3.33	2.41	2.57	2.40	2.69	Tanggap	B
87.	Kota Depok	3.32	3.80	3.10	3.35	3.52	3.46	Sangat Tanggap	A

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88.	Cianjur	3.20	3.92	2.79	3.17	2.74	3.26	Sangat Tanggap	A
89.	Garut	3.00	3.82	3.21	3.68	3.83	3.52	Sangat Tanggap	A
90.	Kota Bandung	3.29	3.72	2.97	3.29	3.27	3.36	Sangat Tanggap	A
91.	Kota Cimahi	2.80	3.87	3.33	3.73	3.88	3.52	Sangat Tanggap	A
92.	Bandung Barat	2.73	3.43	2.35	2.66	2.63	2.83	Tanggap	B
93.	DI Yogyakarta	2.97	3.62	2.94	3.35	3.29	3.27	Sangat Tanggap	A
94.	Kota Yogyakarta	3.22	3.63	2.87	3.46	3.24	3.35	Sangat Tanggap	A
95.	Bantul	3.28	3.94	3.63	3.84	3.88	3.71	Sangat Tanggap	A
96.	Sleman	2.49	3.21	2.12	2.52	2.47	2.64	Cukup Tanggap	C
97.	Jawa Tengah	3.13	3.64	2.90	3.39	3.26	3.32	Sangat Tanggap	A
98.	Kendal	3.01	3.67	2.94	3.21	3.10	3.23	Tanggap	B
99.	Temanggung	3.19	3.67	3.23	3.54	3.14	3.40	Sangat Tanggap	A
100.	Banyumas	2.50	3.86	3.18	3.67	2.55	3.21	Tanggap	B
101.	Purbalingga	2.68	3.49	2.36	2.80	2.74	2.89	Tanggap	B
102.	Batang	3.17	3.15	2.71	3.40	3.67	3.25	Sangat Tanggap	A
103.	Cilacap	3.90	3.89	3.02	3.57	3.67	3.69	Sangat Tanggap	A
104.	Magelang	3.14	3.66	3.00	3.72	3.76	3.49	Sangat Tanggap	A
105.	Kota Surakarta	2.96	3.46	2.45	2.94	2.99	3.03	Tanggap	B

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106.	Kota Tegal	3.66	3.91	3.40	3.87	3.86	3.78	Sangat Tanggap	A
107.	Jawa Timur	2.98	3.66	2.87	3.42	3.41	3.31	Sangat Tanggap	A
108.	Malang	3.07	3.80	3.11	3.62	3.54	3.46	Sangat Tanggap	A
109.	Tulungagung	3.28	3.72	3.05	3.46	3.65	3.47	Sangat Tanggap	A
110.	Pasuruan	3.42	3.93	3.20	3.81	3.99	3.71	Sangat Tanggap	A
111.	Sumenep	3.34	3.71	3.46	3.76	3.86	3.63	Sangat Tanggap	A
112.	Gresik	2.99	3.62	3.27	3.76	3.75	3.48	Sangat Tanggap	A
113.	Lumajang	3.25	3.86	3.20	3.41	3.54	3.48	Sangat Tanggap	A
114.	Kediri	2.69	3.48	2.26	3.11	2.99	2.99	Tanggap	B
115.	Tuban	2.72	3.51	2.27	2.85	2.93	2.94	Tanggap	B
116.	Kota Malang	2.56	3.29	2.44	2.96	2.70	2.85	Tanggap	B
117.	Kota Surabaya	3.06	3.65	2.88	3.35	3.51	3.33	Sangat Tanggap	A
118.	Kota Kediri	3.15	3.75	3.04	3.57	3.64	3.47	Sangat Tanggap	A
119.	Sidoarjo	2.53	3.82	2.67	3.55	3.38	3.25	Sangat Tanggap	A
120.	Kota Batu	2.47	3.30	2.41	3.07	3.03	2.91	Tanggap	B
121.	Trenggalek	3.28	3.88	3.30	3.80	3.75	3.63	Sangat Tanggap	A
122.	Nganjuk	2.62	3.66	2.69	3.59	3.62	3.28	Sangat Tanggap	A
123.	Kota Mojokerto	2.72	3.38	2.51	3.06	2.93	2.98	Tanggap	B

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124.	Blitar	3.80	3.89	3.34	3.71	3.40	3.69	Sangat Tanggap	A
125.	Bali	2.90	3.52	2.63	2.94	2.89	3.04	Tanggap	B
126.	Badung	3.15	3.58	2.88	3.33	3.25	3.29	Sangat Tanggap	A
127.	Gianyar	2.69	3.53	2.38	2.67	2.52	2.84	Tanggap	B
128.	Klungkung	2.63	3.28	2.28	2.75	2.75	2.80	Tanggap	B
129.	Buleleng	3.64	3.78	3.52	3.75	3.89	3.73	Sangat Tanggap	A
130.	Karangasem	2.62	3.44	2.65	3.16	3.06	3.03	Tanggap	B
131.	Kota Denpasar	2.78	3.44	2.36	2.71	2.91	2.90	Tanggap	B
132.	Nusa Tenggara Timur	2.69	3.33	2.28	2.55	2.37	2.73	Tanggap	B
133.	Kota Kupang	2.74	3.41	2.21	2.65	2.48	2.79	Tanggap	B
134.	Belu	2.65	3.25	2.35	2.62	2.36	2.72	Tanggap	B
135.	Rote Ndao	2.67	3.32	2.30	2.40	2.26	2.67	Tanggap	B
136.	Nusa Tenggara Barat	2.96	3.58	2.93	3.16	3.17	3.19	Tanggap	B
137.	Sumbawa Barat	2.67	3.52	2.78	2.92	2.82	2.98	Tanggap	B
138.	Bima	2.97	3.55	2.99	3.14	3.09	3.18	Tanggap	B
139.	Mataram	3.89	3.91	3.31	3.81	3.91	3.82	Sangat Tanggap	A
140.	Sumbawa	2.47	3.36	2.66	2.83	2.92	2.87	Tanggap	B
141.	Kalimantan Selatan	2.96	3.51	2.91	3.21	3.21	3.19	Tanggap	B

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142.	Barito Kuala	2.99	3.82	3.41	3.77	3.65	3.53	Sangat Tanggap	A
143.	Kota Banjarbaru	2.82	3.64	3.10	3.09	3.01	3.15	Tanggap	B
144.	Balangan	3.48	3.26	2.91	3.23	3.47	3.30	Sangat Tanggap	A
145.	Tanah Laut	3.11	3.59	3.06	3.49	3.51	3.38	Sangat Tanggap	A
146.	Tabalong	2.64	3.27	2.46	2.83	2.67	2.83	Tanggap	B
147.	Hulu Sungai Selatan	2.69	3.48	2.59	3.03	2.98	3.01	Tanggap	B
148.	Hulu Sungai Utara	3.48	3.45	3.25	3.52	3.83	3.51	Sangat Tanggap	A
149.	Kota Banjarmasin	2.73	3.53	2.59	3.00	2.94	3.02	Tanggap	B
150.	Kalimantan Barat	2.85	3.46	2.68	3.04	3.00	3.06	Tanggap	B
151.	Bengkayang	2.48	3.30	2.56	3.16	3.20	2.97	Tanggap	B
152.	Kubu Raya	3.32	3.70	3.11	3.65	3.61	3.52	Sangat Tanggap	A
153.	Sintang	3.21	3.52	2.75	3.00	2.67	3.11	Tanggap	B
154.	Sanggau	2.69	3.41	2.50	2.70	2.69	2.85	Tanggap	B
155.	Kota Singkawang	2.93	3.45	2.67	2.78	2.66	2.96	Tanggap	B
156.	Kota Pontianak	2.65	3.51	2.73	3.20	3.32	3.11	Tanggap	B
157.	Mempawah	2.74	3.43	2.49	2.92	2.95	2.96	Tanggap	B
158.	Kalimantan Timur	2.60	3.42	2.69	2.95	2.79	2.93	Tanggap	B
159.	Samarinda	2.68	3.54	2.79	3.28	3.17	3.13	Tanggap	B

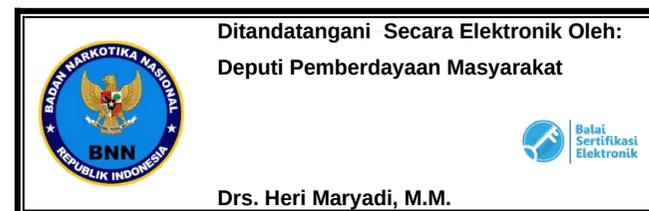
No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160.	Balikpapan	2.77	3.42	2.70	3.15	2.93	3.04	Tanggap	B
161.	Bontang	2.46	3.36	2.60	2.66	2.50	2.76	Tanggap	B
162.	Kalimantan Tengah	2.89	3.46	2.87	3.43	3.48	3.25	Sangat Tanggap	A
163.	Kota Waringin Barat	3.98	3.93	3.63	3.88	3.98	3.91	Sangat Tanggap	A
164.	Kota Palangka Raya	2.32	3.10	2.32	2.98	2.99	2.78	Tanggap	B
165.	Kalimantan Utara	2.63	3.32	2.61	2.72	2.80	2.85	Tanggap	B
166.	Kota Tarakan	2.65	3.21	2.56	2.86	2.88	2.87	Tanggap	B
167.	Nunukan	2.60	3.47	2.67	2.60	2.73	2.84	Tanggap	B
168.	Sulawesi Selatan	2.94	3.66	3.08	3.46	3.55	3.36	Sangat Tanggap	A
169.	Tana Toraja	2.70	3.54	2.74	3.30	3.42	3.17	Tanggap	B
170.	Bone	2.82	3.95	3.43	3.71	3.79	3.53	Sangat Tanggap	A
171.	Kota Palopo	3.29	3.48	3.05	3.35	3.44	3.35	Sangat Tanggap	A
172.	Sulawesi Tengah	2.66	3.39	2.66	2.78	2.77	2.89	Tanggap	B
173.	Banggai Kepulauan	3.05	3.55	2.89	3.09	3.14	3.18	Tanggap	B
174.	Poso	2.81	3.48	2.72	2.85	3.03	3.01	Tanggap	B
175.	Tojo Una-Una	2.63	3.42	2.63	2.73	2.59	2.85	Tanggap	B
176.	Kota Palu	2.34	3.24	2.41	2.88	2.67	2.75	Tanggap	B
177.	Morowali	2.62	3.34	2.66	2.50	2.54	2.76	Tanggap	B

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
178.	Donggala	2.58	3.39	2.67	3.23	3.08	3.03	Tanggap	B
179.	Sulawesi Tenggara	2.68	3.48	2.64	3.10	3.10	3.04	Tanggap	B
180.	Muna	2.47	3.08	2.16	2.46	2.51	2.59	Cukup Tanggap	C
181.	Kolaka	2.44	3.38	2.64	3.01	2.91	2.91	Tanggap	B
182.	Kota Kendari	2.82	3.58	2.66	3.24	3.26	3.17	Tanggap	B
183.	Kota Bau-Bau	3.10	3.77	2.93	3.44	3.46	3.39	Sangat Tanggap	A
184.	Gorontalo	2.84	3.52	2.75	2.97	2.90	3.04	Tanggap	B
185.	Boalemo	2.70	3.42	2.68	2.89	2.70	2.92	Tanggap	B
186.	Bone Bolango	2.56	3.46	2.44	2.59	2.66	2.80	Tanggap	B
187.	Kota Gorontalo	2.73	3.48	2.72	2.90	2.79	2.97	Tanggap	B
188.	Gorontalo Utara	3.35	3.83	3.21	3.72	3.65	3.59	Sangat Tanggap	A
189.	Gorontalo	2.79	3.41	2.62	2.90	2.80	2.96	Tanggap	B
190.	Maluku	3.31	3.67	3.08	3.34	3.17	3.36	Sangat Tanggap	A
191.	Buru Selatan	2.81	3.43	2.65	2.80	2.63	2.92	Tanggap	B
192.	Kota Tual	3.85	3.92	3.48	3.84	3.68	3.80	Sangat Tanggap	A
193.	Maluku Utara	2.74	3.46	2.76	2.65	2.56	2.87	Tanggap	B
194.	Pulau Morotai	2.98	3.24	2.35	2.32	2.02	2.67	Tanggap	B
195.	Halmahera Utara	2.66	3.54	2.99	3.28	3.44	3.19	Tanggap	B
196.	Kota Tidore	2.72	3.49	2.75	2.45	2.33	2.79	Tanggap	B

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kepulauan								
197.	Papua	2.74	3.35	2.72	2.97	3.14	3.01	Tanggap	B
198.	Jayapura	3.11	3.46	2.89	3.12	3.22	3.20	Tanggap	B
199.	Mimika	2.25	3.21	2.49	2.79	3.05	2.77	Tanggap	B
200.	Sulawesi Barat	2.84	3.54	2.82	3.13	2.98	3.11	Tanggap	B
201.	Poliwali Mandar	2.84	3.54	2.82	3.13	2.98	3.11	Tanggap	B
202.	Sulawesi Utara	2.62	3.52	2.75	2.82	2.67	2.91	Tanggap	B
203.	Kepulauan Sangihe	2.80	3.99	3.62	3.80	3.28	3.50	Sangat Tanggap	A
204.	Bolaang Mongondow	2.77	3.51	2.64	2.55	2.47	2.84	Tanggap	B
205.	Kota Bitung	2.61	3.37	2.45	2.59	2.62	2.78	Tanggap	B
206.	Kota Manado	2.34	3.26	2.38	2.47	2.41	2.62	Cukup Tanggap	C
207.	Papua Barat	2.43	3.17	2.35	2.47	2.43	2.62	Cukup Tanggap	C
Rata-rata Nasional		2.88	3.53	2.78	3.07	3.06	3.11	Tanggap	B

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



SERT/78 /XI/DE/RH.02/2024/BNN

Diberikan Kepada

Klinik Pratama BNN Kota Jakarta Utara



Badan Narkotika Nasional
Republik Indonesia

Atas partisipasinya dalam Pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR)
Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional.



Hasil

A - Optimal
3,63



Jakarta
26 November 2024

Hasil IKR

Download Sertifikat

Profil Partisipan (2024)

Nama	dr. Novianti Purnamasari, M.K.M.
Jenis Kelamin	Perempuan
Jabatan	
Lama Bekerja	
Nomor Handphone	081282134661
Email	rehabbnnkjakut3@gmail.com
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanda tangan	

Hasil Survei

IKR Nasional	3.49
IKR BNN	3.51
IKR BNN Provinsi Dki Jakarta	3.84
IKR Klinik Pratama BNN Kota Jakarta Utara	3.63

Nilai Variabel

Ketersediaan	4.00
Aksesibilitas	2.86



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : KEP/273/II/DE/RH.01.00/2024/BNN

TENTANG

PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
TAHAP PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, salah satu Indikator Kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
 - c. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa/ Kelurahan, salah satunya dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/ Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal bagi penyalah guna narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;
 - d. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/ Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2024**

KESATU : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini menjadi unit pelaksana intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal di lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota, terhitung mulai bulan ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2024.

- KEDUA : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran sebagai unit IBM terbentuk tahun 2024 dalam operasionalisasi kegiatan dan layanan unit IBM untuk penanganan penyalah guna narkoba kategori ringan.
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan catatan:
Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

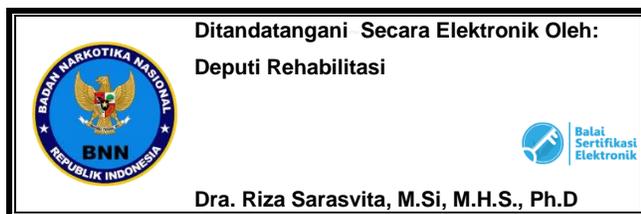
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/K/Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 21 Februari 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



**PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Peulanggahan	Kuta Raja	Kota Banda Aceh
2	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Mibo	Banda Raya	Kota Banda Aceh
3	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kelurahan Tanjung Mulia	Medan Deli	Kota Medan
4	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Medan Deli	Kota Medan
5	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Desa Kubu Simbelang	Tiga Panah	Kabupaten Karo
6	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Desa Doulu	Berastagi	Kabupaten Karo
7	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Berngam	Binjai Kota	Kota Binjai
8	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Rambung Dalam	Binjai Selatan	Kota Binjai
9	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjung Balai	Kelurahan Selat Tanjung Medan	Datuk Bandar Timur	Kota Tanjungbalai
10	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjung Balai	Kelurahan Tanjungbalai Kota IV	Tanjungbalai Utara	Kota Tanjungbalai
11	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Lasara Bahili	Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
12	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Sisobahili Tabaloho	Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
13	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Sekip	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Pagar Jati	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang
15	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Bane	Siantar Utara	Kota Pematang Siantar

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
16	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Sukaraja	Siantar Marihat	Kota Pematang Siantar
17	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Paya Perupuk	Tanjung Pura	Kabupaten Langkat
18	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Perlis	Berandan Barat	Kabupaten Langkat
19	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Meranti	Meranti	Kabupaten Asahan
20	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Sei Alim Hasak	Sei Dadap	Kabupaten Asahan
21	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Kelurahan Pidoli Dolok	Panyabungan	Kabupaten Mandailing Natal
22	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Barbaran Jae	Panyabungan Barat	Kabupaten Mandailing Natal
23	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Kelurahan Huta Tonga	Angkola Muara Tais	Kabupaten Tapanuli Selatan
24	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Kelurahan Sigalangan	Batang Angkola	Kabupaten Tapanuli Selatan
25	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Sei Rejo	Sei Rampah	Kabupaten Serdang Bedagai
26	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Dolok Manampang	Dolok Masihul	Kabupaten Serdang Bedagai
27	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Damar Sari	Padang Hilir	Kota Tebing Tinggi
28	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Persiakan	Padang Hulu	Kota Tebing Tinggi
29	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Perkebunan Tanah Datar	Datuk Tanah Datar	Kabupaten Batu Bara
30	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Kwala Gunung	Datuk Lima Puluh	Kabupaten Batu Bara
31	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Muara Panas	Bukit Sundi	Kabupaten Solok
32	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Kinari	Bukit Sundi	Kabupaten Solok

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
33	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Santur	Barangin	Kota Sawahlunto
34	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Salak	Talawi	Kota Sawahlunto
35	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Kelurahan Sicincin	Payakumbuh Timur	Kota Payakumbuh
36	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Kelurahan Padang Tinggi Piliang	Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh
37	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Tebing Tinggi	Benai	Kabupaten Kuantan Singingi
38	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Simandolak	Benai	Kabupaten Kuantan Singingi
39	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Simpang Beringin	Bandar Sei Kijang	Kabupaten Pelalawan
40	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Mekar Jaya	Pangkalan Kerinci	Kabupaten Pelalawan
41	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Kampung Baru	Senapelan	Kota Pekanbaru
42	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Bencah Lesung	Tenayan Raya	Kota Pekanbaru
43	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Bukit Timah	Dumai Selatan	Kota Dumai
44	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Pangkalan Sesai	Dumai Barat	Kota Dumai
45	Jambi	BNNP Jambi	Desa Talang Belido	Sungai Gelam	Kabupaten Muaro Jambi
46	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Desa Sidomukti	Dendang	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
47	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Desa Teluk Majelis	Kuala Jambi	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
48	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Kenali Asam Bawah	Kota Baru	Kota Jambi

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
49	Jambi	BNN Kab. Batanghari	Desa Terusan	Maro Sebo Ilir	Kabupaten Batanghari
50	Jambi	BNN Kab. Batanghari	Desa Pematang V Suku	Muara Tembesi	Kabupaten Batanghari
51	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Desa Tanjung Telang	Prabumulih Barat	Kota Prabumulih
52	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Kelurahan Pasar Prabumulih II	Prabumulih Utara	Kota Prabumulih
53	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Muara Batun	Jejawi	Kabupaten Ogan Komering Ilir
54	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Celikah	Kayu Agung	Kabupaten Ogan Komering Ilir
55	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Bukit Besar	Girimaya	Kota Pangkalpinang
56	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Asam	Rangkui	Kota Pangkalpinang
57	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Rebo	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
58	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pagarawan	Merawang	Kabupaten Bangka
59	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Air Saga	Tanjungpandan	Kabupaten Belitung
60	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Aik Rayak	Tanjungpandan	Kabupaten Belitung
61	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Kelurahan Toboali	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
62	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Sadai	Tukak Sadai	Kabupaten Bangka Selatan
63	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Tanjung Uncang	Batu Aji	Kota Batam
64	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Buliang	Batu Aji	Kota Batam
65	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Sawang Laut	Kundur Barat	Kabupaten Karimun

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
66	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Tanjung Berlian Barat	Kundur Utara	Kabupaten Karimun
67	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Kelurahan Kandang	Kampung Melayu	Kota Bengkulu
68	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Kelurahan Lempuing	Ratu Agung	Kota Bengkulu
69	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Dusun Tengah	Seginim	Kabupaten Bengkulu Selatan
70	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Tanggo Raso	Pino Raya	Kabupaten Bengkulu Selatan
71	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Kelurahan Kota Bambu Selatan	Palmerah	Kota Administrasi Jakarta Barat
72	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Kelurahan Petamburan	Tanah Abang	Kota Administrasi Jakarta Pusat
73	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	Kebayoran Lama	Kota Administrasi Jakarta Selatan
74	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Bintaro	Pesanggrahan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
75	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Cipinang	Pulo Gadung	Kota Administrasi Jakarta Timur
76	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Ciracas	Ciracas	Kota Administrasi Jakarta Timur
77	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Penjaringan	Penjaringan	Kota Administrasi Jakarta Utara
78	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Semper Barat	Cilincing	Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
79	Banten	BNNP Banten	Desa Baros	Baros	Kabupaten Serang
80	Banten	BNNP Banten	Kelurahan Banten	Kasemen	Kota Serang
81	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Sukatani	Sukatani	Kabupaten Purwakarta
82	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Sukajaya	Sukatani	Kabupaten Purwakarta
83	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Kebon Jayanti	Kiaracondong	Kota Bandung
84	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Kacapiring	Batununggal	Kota Bandung
85	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Cibabat	Cimahi Utara	Kota Cimahi
86	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Melong	Cimahi Selatan	Kota Cimahi
87	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Pagelaran	Ciomas	Kabupaten Bogor
88	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Jabon Mekar	Parung	Kabupaten Bogor
89	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Mekarjaya	Baregbeg	Kabupaten Ciamis
90	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Pasirtamiang	Cihaurbeuti	Kabupaten Ciamis
91	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Kahiyangan	Pancalang	Kabupaten Kuningan
92	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Pagundan	Lebakwangi	Kabupaten Kuningan
93	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kelurahan Tlogosaro Kulon	Pedurungan	Kota Semarang
94	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kelurahan Gayamsari	Gayamsari	Kota Semarang
95	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Bansari	Bansari	Kabupaten Temanggung
96	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Gununggempol	Jumo	Kabupaten Temanggung
97	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Pajang	Laweyan	Kota Surakarta

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
98	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Mojosongo	Jebres	Kota Surakarta
99	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Plantaran	Kaliwungu Selatan	Kabupaten Kendal
100	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Ringinarum	Ringinarum	Kabupaten Kendal
101	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Kemandungan	Tegal Barat	Kota Tegal
102	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Kejambon	Tegal Timur	Kota Tegal
103	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Kalitinggar	Padamara	Kabupaten Purbalingga
104	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Panican	Kemangkon	Kabupaten Purbalingga
105	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Lawangaji	Kandeman	Kabupaten Batang
106	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Kalipucang Kulon	Batang	Kabupaten Batang
107	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Kebanggan	Sumbang	Kabupaten Banyumas
108	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Ledug	Kembaran	Kabupaten Banyumas
109	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Desa Giripurwo	Girimulyo	Kabupaten Kulon Progo
110	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Desa Cerme	Panjatan	Kabupaten Kulon Progo
111	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Giwangan	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
112	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Wirogunan	Mergangsan	Kota Yogyakarta
113	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Desa Sinduharjo	Ngaglik	Kabupaten Sleman
114	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Desa Sinduadi	Mlati	Kabupaten Sleman
115	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kelurahan Potorono	Banguntapan	Kabupaten Bantul

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
116	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kalurahan Bangunharjo	Sewon	Kabupaten Bantul
117	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Cerme Lor	Cerme	Kabupaten Gresik
118	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Glindah	Kedamean	Kabupaten Gresik
119	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Kelurahan Temas	Batu	Kota Batu
120	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Junrejo	Junrejo	Kota Batu
121	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Gedongombo	Semanding	Kabupaten Tuban
122	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Kingking	Tuban	Kabupaten Tuban
123	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Wedoro	Waru	Kabupaten Sidoarjo
124	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Medaeng	Waru	Kabupaten Sidoarjo
125	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Dandangan	Kota	Kota Kediri
126	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Ngampel	Mojoroto	Kota Kediri
127	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Gadang	Sukun	Kota Malang
128	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Bandungrejosari	Sukun	Kota Malang
129	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Paron	Ngasem	Kabupaten Kediri
130	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Gadungan	Puncu	Kabupaten Kediri
131	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Sepanjang	Gondanglegi	Kabupaten Malang
132	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Desa Hilir Kantor	Ngabang	Kabupaten Landak
133	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Kelurahan Suka Harja	Delta Pawan	Kabupaten Ketapang
134	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Arang Limbung	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
135	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Sungai Rengas	Sungai Kakap	Kabupaten Kubu Raya
136	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Galang	Sungai Pinyuh	Kabupaten Mempawah
137	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Kelurahan Sungai Pinyuh	Sungai Pinyuh	Kabupaten Mempawah
138	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Kumba	Jagoi Babang	Kabupaten Bengkayang
139	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Kelurahan Baamang Barat	Baamang	Kabupaten Kotawaringin Timur
140	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Kelurahan Alalak Tengah	Banjarmasin Utara	Kota Banjarmasin
141	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Kelurahan Kelayan Luar	Banjarmasin Tengah	Kota Banjarmasin
142	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Landasan Ulin Timur	Landasan Ulin	Kota Banjarbaru
143	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	Liang Anggang	Kota Banjarbaru
144	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Kelurahan Kandangan Kota	Kandangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
145	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Karang Jawa	Padang Batung	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
146	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Mangkupum	Muara Uya	Kabupaten Tabalong
147	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Wirang	Haruai	Kabupaten Tabalong
148	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Air Hitam	Samarinda Ulu	Kota Samarinda
149	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Karang Mumus	Samarinda Kota	Kota Samarinda
150	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Margasari	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan
151	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Margo Mulyo	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
152	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Desa Jelarai Selor	Tanjung Selor	Kabupaten Bulungan
153	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Kampung 6	Tarakan Timur	Kota Tarakan
154	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Karang Rejo	Tarakan Barat	Kota Tarakan
155	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Sanur	Tulin Onsoi	Kabupaten Nunukan
156	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Harapan	Sebuku	Kabupaten Nunukan
157	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Kabobona	Dolo	Kabupaten Sigi
158	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Kotarindau	Dolo	Kabupaten Sigi
159	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan Taipa	Palu Utara	Kota Palu
160	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan Mamboro Barat	Palu Utara	Kota Palu
161	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Towale	Banawa Tengah	Kabupaten Donggala
162	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Loli Dondo	Banawa	Kabupaten Donggala
163	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Desa Malei	Lage	Kabupaten Poso
164	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Kelurahan Lawanga Tawongan	Poso Kota Utara	Kabupaten Poso
165	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una-Una	Kelurahan Dondo Barat	Ratolindo	Kabupaten Tojo Una-Una
166	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una-Una	Desa Labuan	Ratolindo	Kabupaten Tojo Una-Una
167	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Tenrigangkae	Mandai	Kabupaten Maros
168	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Panakkukang	Pallangga	Kabupaten Gowa
169	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kelurahan Lemo	Makale Utara	Kabupaten Tana Toraja

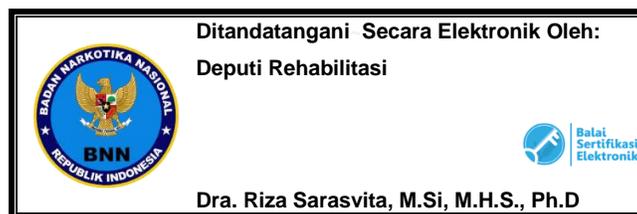
No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
170	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kelurahan Ariang	Makale	Kabupaten Tana Toraja
171	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Baubau	Kelurahan Kadolomoko	Kokalukuna	Kota Baubau
172	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Baubau	Kelurahan Kadolokatapi	Wolio	Kota Baubau
173	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Kelurahan Simboro	Simboro Kepulauan	Kota Mamuju
174	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Desa Topoyo	Topoyo	Kabupaten Mamuju Tengah
175	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Tongowai	Tidore Selatan	Kota Tidore Kepulauan
176	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Rum	Tidore Utara	Kota Tidore Kepulauan
177	Bali	BNNP Bali	Desa Banjar Anyar	Kediri	Kabupaten Tabanan
178	Bali	BNNP Bali	Desa Kediri	Kediri	Kabupaten Tabanan
179	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Patemon	Seririt	Kabupaten Buleleng
180	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Lokapaksa	Seririt	Kabupaten Buleleng
181	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Pempatan	Rendang	Kabupaten Karangasem
182	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Rendang	Rendang	Kabupaten Karangasem
183	Bali	BNN Kab. Klungkung	Desa Akah	Klungkung	Kabupaten Klungkung
184	Bali	BNN Kab. Klungkung	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Klungkung	Kabupaten Klungkung
185	Bali	BNN Kab. Badung	Desa Mengwitani	Mengwi	Kabupaten Badung
186	Bali	BNN Kab. Badung	Kelurahan Kerobokan Kaja	Kuta Utara	Kabupaten Badung
187	NTB	BNNP NTB	Desa Tanjung	Tanjung	Kabupaten Lombok Utara

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
188	NTB	BNNP NTB	Desa Medana	Tanjung	Kabupaten Lombok Utara
189	NTB	BNN Kab. Bima	Desa Nipa	Ambalawi	Kabupaten Bima
190	NTB	BNN Kab. Bima	Kelurahan Nae	Rasanae Barat	Kota Bima
191	NTT	BNN Kab. Belu	Kelurahan Atambua	Kota Atambua	Kabupaten Belu
192	NTT	BNN Kab. Belu	Desa Tohe	Raihat	Kabupaten Belu
193	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Liliba	Oebobo	Kota Kupang
194	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Naimata	Maulafa	Kota Kupang
195	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Ofalangga	Pantai Baru	Kabupaten Rote Ndao
196	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Tesabela	Pantai Baru	Kabupaten Rote Ndao

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 21 Februari 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL





KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR: KEP/142/I/DE/RH.02.03/2024/BNN

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA REHABILITASI MITRA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PENYELENGGARA REHABILITASI BERKELANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika milik pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan layanan rehabilitasi, salah satunya yaitu dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kemampuan lembaga rehabilitasi mitra Badan Narkotika Nasional dengan memberikan peningkatan kemampuan, agar dapat menyelenggarakan layanan rehabilitasi berkelanjutan yang sesuai dengan standar rehabilitasi yang ditentukan;
 - c. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi mitra Badan Narkotika Nasional untuk mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi berkelanjutan sesuai standar rehabilitasi yang ditentukan agar terjaga keberlangsungannya;

/ d. bahwa...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Lembaga Mitra Badan Narkotika Nasional Penyelenggara Rehabilitasi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 655/KEP/BSN/12/2022 tentang Penetapan SNI 8807:2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Napza);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/57/II/ KA/RH/2019/BNN tentang Pendelegasian Penandatanganan Berkas Perjanjian Kerjasama dan Keputusan Kepala Terkait Peningkatan Kemampuan Kepada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

/bagi.....

9. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN LEMBAGA REHABILITASI MITRA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PENYELENGGARA REHABILITASI BERKELANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menetapkan lembaga yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai lembaga rehabilitasi mitra Badan Narkotika Nasional untuk menyelenggarakan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu, penyalah guna dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan memperoleh peningkatan kemampuan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

KEDUA : Lembaga rehabilitasi milik pemerintah maupun milik masyarakat yang menjadi mitra BNN dalam penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BNN dan Lembaga Rehabilitasi Mitra.

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan mengacu pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

/KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

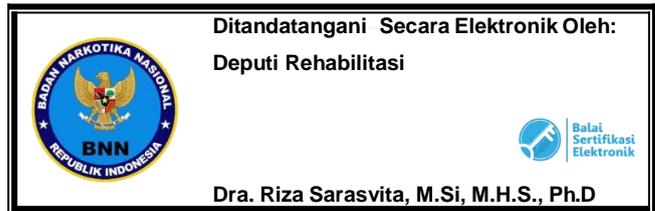
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/ BNNK/ Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 23 Januari 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



**DAFTAR LEMBAGA REHABILITASI MITRA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PENYELENGGARA REHABILITASI BERKELANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
1	Aceh	BNNP Aceh	Yayasan Kayyis	Sosial KM
2	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Alfatha	Sosial KM
3	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Rumah Geutanyo Aceh	Sosial KM
4	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Surya	Sosial KM
5	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Pintu Hijrah	Sosial KM
6	Aceh	BNN Kab. Pidie	Puskesmas Kembang Tanjong	Medis IP
7	Aceh	BNN Kab. Pidie	Puskesmas Padang Tiji	Medis IP
8	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Puskesmas Gandapura	Medis IP
9	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Klinik Ka Tiga	Medis KM
10	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Klinik Dokkes	Medis IP
11	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Yayasan Permata Aceh Perduli (YPAP)	Sosial KM
12	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Puskesmas Banda Sakti	Medis IP
13	Aceh	BNN Kota Langsa	RSU Cut Nyak Dhien	Medis IP
14	Aceh	BNN Kota Langsa	Klinik Sahabat	Medis KM
15	Aceh	BNN Kota Langsa	Klinik Bina Azkia	Medis KM
16	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Klinik dr. Zuheini	Medis KM
17	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Klinik Assyifa	Medis KM
18	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Yayasan Rumoh Harapan Nagan	Sosial KM
19	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Pintu Hijrah Aceh Selatan	Sosial KM
20	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	RSJ. Prof. HB. Saanin Padang	Medis IP
21	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Klinik Intan Sari Padang	Medis KM
22	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Naras Pariaman	Medis IP
23	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Nan Balimo Solok	Medis IP
24	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Biaro Agam	Medis IP
25	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Klinik WD Farma Bukit tinggi	Medis KM
26	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Puskesmas Tanjung Pati	Medis IP
27	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Puskesmas Muara Panas	Medis IP
28	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Puskesmas Sirukam	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
29	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	RSUD Sawahlunto	Medis IP
30	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Rumah Sehat Islam (RSI) Silungkang	Sosial KM
31	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Klinik Arisha Pasaman Barat	Medis KM
32	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Fokus RNI	RI Sosial
33	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Etika Mulia	RI Sosial
34	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia	RI Sosial
35	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Nazar	RI Sosial
36	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Caritas PSE	RI Sosial
37	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Pusat Perawatan dan Pemulihan Adiksi Baitusyifa	RI Sosial
38	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Sibolangit Center	RI Sosial
39	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Puskesmas Bromo	RJ Medis
40	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	RSJ Prof. Dr. M. Ildrem	RI Medis
41	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Eka Darma Bakti	RI Sosial
42	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Mari Indonesia Bersinar (MARINDO)	RI Sosial
43	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Amelia	RI Sosial
44	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Panti Rehabilitasi Korban Penyalah guna Napza Rumah Kita	RI Sosial
45	Sumatera Utara	BNNK Tanjungbalai	Yayasan Asia Treatmen Center (ATC) Kota Tanjung balai	RI Sosial
46	Sumatera Utara	BNNK Serdang Bedagai	Yayasan Rehabilitasi Jopan	RI Sosial
47	Riau	BNNP Riau	Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau	Medis IP
48	Riau	BNNP Riau	RSUD Rokan Hulu	Medis IP
49	Riau	BNNP Riau	IPWL Perawang	Sosial KM
50	Riau	BNNP Riau	Yayasan Mercusuar Riau	Sosial KM
51	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Solid Foundation	Sosial KM
52	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Sarasehan	Sosial KM
53	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Satu Bumi	Sosial KM
54	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Rumah Rehabilitasi Geliat Pelangi	Sosial KM
55	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Lembaga Permasayarakatan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru	Sosial IP
56	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Generasi Muda Bernilai	Sosial KM
57	Jambi	BNN Provinsi Jambi	RSJD Provinsi Jambi	Medis IP
58	Jambi	BNN Provinsi Jambi	RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Sarolangun	Medis IP
59	Jambi	BNN Provinsi Jambi	Yayasan Karunia Insani Merangin Jambi	Sosial KM
60	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	RS. Mitra Medika Batang Hari	Medis KM

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
61	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	Yayasan Lembaga Para Sahabat	Sosial KM
62	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPTD Puskesmas Durian Luncuk	Medis IP
63	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPT Puskesmas Jembatan Mas	Medis IP
64	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPT Puskesmas Mersam	Medis IP
65	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPTD Puskesmas Sungai Rengas	Medis IP
66	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Puskesmas Rawat Inap Simpang Pandan	Medis IP
67	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Puskesmas Rawat Inap Kampung Laut	Medis IP
68	Jambi	BNN Kota Jambi	IPWL Kanti Sehati Sejati Jambi	Sosial KM
69	Jambi	BNN Kota Jambi	UPTD Puskesmas Tanjung Pinang	Medis IP
70	Bengkulu	BNN Provinsi Bengkulu	Yayasan Karunia Insani Foundation (Rumah Female)	Sosial KM
71	Bengkulu	BNN Provinsi Bengkulu	Dharma Wahyu Insani Cab. Rejang Lebong	Sosial KM
72	Bengkulu	BNN Provinsi Bengkulu	RSKJ Soeprpto Provinsi Bengkulu	Medis IP
73	Bengkulu	BNNK Bengkulu Selatan	RSUD Hasanuddin Damrah	Medis IP
74	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Puskesmas Padang Serai	Medis IP
75	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Puskesmas Betungan	Medis IP
76	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Puskesmas Basuki Rahmat	Medis IP
77	Lampung	BNNP Lampung	House Of Serenity	Sosial KM
78	Lampung	BNNP Lampung	Yayasan Wisma Ataraxis	Sosial KM
79	Lampung	BNNP Lampung	Yayasan Sinar Jati	Sosial KM
80	Lampung	BNNP Lampung	RSUD. Abdul Moeloek	Medis IP
81	Lampung	BNNP Lampung	RSJ. Provinsi Lampung	Medis IP
82	Lampung	BNNP Lampung	RSUD. Dr. A. Dadi Tjokrodipo	Medis IP
83	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Simpur	Medis IP
84	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Permata Sukarame	Medis IP
85	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Gedong Air	Medis IP
86	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Panjang	Medis IP
87	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Sukabumi	Medis IP
88	Lampung	BNNK Lampung Timur	Yayasan Hayat Permata Dharma	Sosial KM
89	Lampung	BNNK Lampung Timur	Yayasan Cahaya Putra Selatan	Sosial KM
90	Lampung	BNNK Metro	Lentera Putih Bersinar	Sosial KM
91	Lampung	BNNK Lampung Selatan	RSUD Bandar Negara Husada	Medis IP
92	Lampung	BNNK Lampung Selatan	UPTD. Puskesmas Way Urang	Medis IP
93	Banten	BNNP Banten	RSUD Banten	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
94	Banten	BNNP Banten	Yayasan Sakinah Harakah Bhakti (Sahabat)	Sosial KM
95	Banten	BNNP Banten	Yayasan Bani Syifa	Sosial KM
96	Banten	BNNP Banten	BAPAS SERANG	Sosial IP
97	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Galigo institute	Sosial KM
98	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Puskesmas Ciputat	Medis IP
99	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Yayasan Aksi Cahaya Generasi Bangsa	Sosial KM
100	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Yayasan Langkah Ragam Nusantara	Sosial KM
101	Banten	BNNK Tangerang	Lapas Kelas I Tangerang	Medis IP
102	Banten	BNNK Tangerang	Puskesmas Cibodasari	Medis IP
103	Banten	BNNK Tangerang	Puskesmas Jalan Emas	Medis IP
104	Banten	BNNK Tangerang	Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang	Medis / Sosial IP
105	Banten	BNNK Tangerang	Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang	Medis / Sosial IP
106	Banten	BNNK Tangerang	Puskesmas Cipondoh	Medis IP
107	Banten	BNNK Tangerang	Yasibara	Sosial KM
108	Banten	BNNK Tangerang	RSUP.Sitanala	Medis IP
109	Banten	BNNK Tangerang	RS Hermina	Medis IP
110	Banten	BNNK Tangerang	Yayasan Rehabilitasi Lahir Batin Kobong Assyifa	Sosial KM
111	Banten	BNNK Cilegon	Klinik Tazkiya	Medis IP
112	Banten	BNNK Cilegon	RSIA Mutiara Bunda	Medis IP
113	Jawa Barat	Jawa Barat	RSJ Provinsi Jawa Barat	Medis IP
114	Jawa Barat	Jawa Barat	Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bandung	Medis/Sosial IP
115	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Peduli Kasih Bekasi	Sosial KM
116	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Rehab Korban Narkoba Bekasi	Sosial KM
117	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Pradita Madani Cempaka Cirebon	Sosial KM
118	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Graha Prima Karya Sejahtera (Grapiks)	Sosial KM
119	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Katarsis Sarasati Edukasi	Sosial KM
120	Jawa Barat	Jawa Barat	Klinik Utama Rawat Inap Jiwa Karya Sehat Nusantara	Medis KM
121	Jawa Barat	Jawa Barat	Klinik Bunda Aulia Bekasi	Medis KM
122	Jawa Barat	BNNK Kuningan	Yayasan Rumah Tenjo Laut	Sosial KM
123	Jawa Barat	BNNK Kuningan	Yayasan Ciptawening	Sosial KM
124	Jawa Barat	BNNK Cirebon	Yayasan Bina Insani Mandiri	Sosial KM
125	Jawa Barat	BNNK Cirebon	UPT Puskesmas Kejaksan	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
126	Jawa Barat	BNNK Cirebon	UPT Puskesmas Drajat	Medis IP
127	Jawa Barat	BNNK Cirebon	UPT Puskesmas Kesunean	Medis IP
128	Jawa Barat	BNNK Bogor	Harapan Permata Hati Kita	Sosial KM
129	Jawa Barat	BNNK Bogor	Bersama Kita Pulih	Sosial KM
130	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Pelayanan Agape	Sosial KM
131	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Rumah Asa Anak Bangsa	Sosial KM
132	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Untuk Segala Bangsa (Fan Campus)	Sosial KM
133	Jawa Barat	BNNK Bogor	Breakthrough Missions Indonesia	Sosial KM
134	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Graha Suar Indonesia	Sosial KM
135	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Lentera Harapan Nusantara	Sosial KM
136	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Kayva Kasih Rehabilitasi	Sosial KM
137	Jawa Barat	BNNK Garut	Rumah Sakit TK IV 03.04.07 Guntur Garut	Medis IP
138	Jawa Barat	BNNK Garut	UPTD Puskesmas Karangpawitan	Medis IP
139	Jawa Barat	BNNK Garut	Puskesmas Cipanas	Medis IP
140	Jawa Barat	BNNK Ciamis	Yayasan Inabah II Putri	Sosial KM
141	Jawa Barat	BNNK Ciamis	Yayasan Ar-Rahmaniyyah	Sosial KM
142	Jawa Barat	BNNK Ciamis	Yayasan Serba Bakti Inabah Remaja Putra XVIII	Sosial KM
143	Jawa Barat	BNNK Cimahi	RSUD Cibabat Cimahi	Medis IP
144	Jawa Barat	BNNK Cimahi	Puskesmas Cimahi Utara	Medis IP
145	Jawa Barat	BNNK Cimahi	Puskesmas Melong Asih	Medis IP
146	Jawa Barat	BNNK KBB	Puskesmas DTP Jayagiri	Medis IP
147	Jawa Barat	BNNK Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Kawalu	Medis IP
148	Jawa Barat	BNNK Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Tawang	Medis IP
149	Jawa Barat	BNNK Tasikmalaya	Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya (Inabah 27 Putra)	Sosial KM
150	Jawa Barat	BNNK Depok	Rutan Kelas I Depok	Medis/ Sosial IP
151	Jawa Barat	BNNK Karawang	RS Islam Karawang	Medis KM
152	Jawa Barat	BNNK Karawang	RS Izza	Medis KM
153	Jawa Barat	BNNK Karawang	Puskesmas Karawang	Medis IP
154	Jawa Barat	BNNK Sukabumi	Yayasan Rehab Korban Narkoba (KOBRA)	Sosial KM
155	Jawa Barat	BNNK Sukabumi	Yayasan Lensa Bhineka Nusantara	Sosial KM
156	Jawa Barat	BNNK Bandung	Yayasan Sekar Mawar	Sosial KM
157	Jawa Barat	BNNK Bandung	Yayasan Gerbang Harmoni Indonesia	Sosial KM
158	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Yayasan Kasih Mulia	Sosial KM
159	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Yayasan Ashefa Griya Putra	Sosial KM

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
160	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Yayasan Lentera Bersinar Indonesia	Sosial KM
161	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Klinik Amerta	Medis KM
162	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Johar Baru	Medis IP
163	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Gambir	Medis IP
164	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Cengkareng	Medis IP
165	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Senen	Medis IP
166	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Tambora	Medis IP
167	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan	Medis IP
168	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Klinik Sisma Medika	Medis KM
169	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Puskesmas Kecamatan Penjaringan	Medis IP
170	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk	Medis IP
171	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading	Medis IP
172	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Cakra Sehati	Sosial KM
173	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Mutiara Maharani	Sosial KM
174	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Pemulihan Natura Indonesia	Sosial KM
175	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Malaka Medicare Indonesia	Sosial KM
176	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Puskesmas Kecamatan Tebet	Medis IP
177	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Puskesmas Kecamatan Cilandak	Medis IP
178	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Yayasan Kelima	Sosial KM
179	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Yayasan Karitas Sani Madani (Karisma)	Sosial KM
180	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Yayasan Madani	Sosial KM
181	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Puskesmas Kramat Jati	Medis IP
182	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Puskesmas Kecamatan Duren Sawit	Medis IP
183	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Puskesmas Kecamatan Jatinegara	Medis IP
184	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	RSKD Duren Sawit	Medis IP
185	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	PKM Karanganyar Kebumen (IPWL)	Medis IP
186	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSJ Prof dr. Soeroso Magelang (IPWL)	Medis IP
187	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSJ dr. Soedjarwadi Klaten (IPWL)	Medis IP
188	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSJ dr. Amino Gondohutomo SMG (IPWL)	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
189	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RS. Bhayangkara SMG (IPWL)	Medis IP
190	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	PKM Poncol (IPWL)	Medis IP
191	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	DKT Gombang Kebumen	Medis IP
192	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSUD dr. Soedirman Kebumen	Medis IP
193	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	Ayodya Mandiri Jepara (IPWL)	Sosial KM
194	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	YCKB Ungaran (IPWL)	Sosial KM
195	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	At Tauhid SMG (IPWL)	Sosial KM
196	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	Al Ma'la Grobogan (IPWL)	Sosial KM
197	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	YLBI Sragen (IPWL)	Sosial KM
198	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	Maunatul Mubarak Demak IPWL	Sosial KM
199	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	RSUD Dr.H. Soewondo Kendal	Medis IP
200	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	RS H.A.Zaky Djunaid Pekalongan	Medis IP
201	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Klinik Utama dr.Henny Rosita Batang	Medis KM
202	Jawa Tengah	BNN Kab. Tegal	Puskesmas Tegal Timur	Medis IP
203	Jawa Tengah	BNN Kab. Tegal	Klinik Pratama Aisyiah Siti Hajar	Medis KM
204	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Klinik Panji Medika Kedungreja	Medis IP
205	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	PKU Muhammadiyah Sampang	Medis KM
206	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Puskesmas Cilacap Selatan 2	Medis IP
207	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	RSUD Banyumas	Medis IP
208	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Puskesmas Baturraden 1	Medis IP
209	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Medis IP
210	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Sentra Satria Baturraden	Sosial KM
211	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Yayasan An-Nur Haji Supono	Sosial IP
212	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	RSUD Kabupaten Temanggung	Medis IP
213	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	RS PKU Muhammadiyah Temanggung	Medis KM
214	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	RS Aisyiyah Muntilan	Medis KM
215	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Panti Rehabilitasi Betesda	Sosial IP
216	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSUD Dr.Moewardi	Medis IP
217	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSJD dr.Arif Zainudin Surakarta	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
218	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSAU dr.Siswanto Lanud Adie Soemarmo	Medis IP
219	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Anargya Sukoharjo	Sosial KM
220	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	YCKB Surakarta	Sosial KM
221	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Yayasan Hayyu Sedah Mirah	Sosial KM
222	Jawa Timur	BNNP Jatim	Klinik Ghana Prima	Medis KM
223	Jawa Timur	BNNP Jatim	Rumah Rehabilitasi Al-Hidayat	Sosial KM
224	Jawa Timur	BNNP Jatim	LRPPN BI Banyuwangi	Sosial KM
225	Jawa Timur	BNNP Jatim	Gendhug Nemu Sariro	Sosial KM
226	Jawa Timur	BNNP Jatim	KP2M Banyuwangi	Sosial KM
227	Jawa Timur	BNNP Jatim	Klinik An-Nisa Probolinggo	Sosial KM
228	Jawa Timur	BNNP Jatim	Ghana Recovery Pamekasan	Sosial KM
229	Jawa Timur	BNN Kab Malang	RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	Medis IP
230	Jawa Timur	BNN Kab Malang	HMC DAU	Medis KM
231	Jawa Timur	BNN Kab Gresik	RSUD Ibnu Sina Gresik	Medis IP
232	Jawa Timur	BNN Kab Gresik	RS Fathma Medika Gresik	Medis KM
233	Jawa Timur	BNN Kab Gresik	Rumah Rehabilitasi Supri Soli Gresik	Sosial KM
234	Jawa Timur	BNN Kab Tuban	RSUD Dr. R Koesma Tuban	Medis IP
235	Jawa Timur	BNN Kab Tuban	Puskesmas Tuban	Medis IP
236	Jawa Timur	BNN Kab Tuban	Klinik Ar Rochma	Medis KM
237	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Rumah Merah Putih	Sosial KM
238	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Korban Narkoba (KOBRA)	Sosial KM
239	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Sahwahita Nusantara	Sosial KM
240	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Al Kholiqi	Sosial KM
241	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Eklesia Kediri Foundation	Sosial KM
242	Jawa Timur	BNN Kab Tulungagung	Puskesmas Bangunjaya	Medis IP
243	Jawa Timur	BNN Kab Tulungagung	RSUD DR Iskak	Medis IP
244	Jawa Timur	BNN Kab Tulungagung	Klinik Lapas Klas IIB Tulungagung	Medis IP
245	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Puskesmas Batu	Medis IP
246	Jawa Timur	BNN Kota Batu	RS Karsa Husada Batu	Medis IP
247	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Pondok Pemulihan Doulos Batu	Sosial KM
248	Jawa Timur	BNN Kab Lumajang	Puskesmas Klakah	Medis IP
249	Jawa Timur	BNN Kab Lumajang	Puskesmas Jatiroto	Medis IP
250	Jawa Timur	BNN Kab Pasuruan	RSUD Bangil	Medis IP
251	Jawa Timur	BNN Kab Pasuruan	RSI Masyithoh	Medis KM
252	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Puskesmas Gedongan	Medis IP
253	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	RS Kamar Medika	Medis KM

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
254	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Rumah Kita Surabaya	Sosial KM
255	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Orbit Surabaya	Sosial KM
256	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Plato Foundation	Sosial KM
257	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan LRPPN- BI Surabaya	Sosial KM
258	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Rumah Merah Putih Surabaya	Sosial KM
259	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Ashefa Surabaya	Sosial KM
260	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	RSJ Menur Surabaya	Medis IP
261	Jawa Timur	BNN Kab Sumenep	Puskesmas Dasuk	Medis IP
262	Jawa Timur	BNN Kab Blitar	RSU An Nisaa	Medis KM
263	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Puskesmas Kendalsari	Medis IP
264	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Yayasan Sadar Hati	Sosial KM
265	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	RBM Kota Juang Kabupaten Melawi	Sosial KM
266	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Rumah Family Female (RFF) Kabupaten Melawi	Sosial KM
267	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Kendawang Kabupaten Ketapang	Medis IP
268	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Sandai Kabupaten Ketapang	Medis IP
269	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Air Upas Kabupaten Ketapang	Medis IP
270	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Mulia Baru Kabupaten Ketapang	Medis IP
271	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Kedondong Kabupaten Ketapang	Medis IP
272	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Ngabang Kabupaten Landak	Medis IP
273	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Selalong Kabupaten Sekadau	Medis IP
274	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Yayasan Geratak Kabupaten Sambas	Sosial KM
275	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Rumah Rahayu Kota Pontianak	Sosial KM
276	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Rumah Adiksi Indonesia (RAIN) Pontianak	Sosial KM
277	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Alhijrah Kota Pontianak	Sosial KM
278	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	RBM Bumi Khatulistiwa Kota Pontianak	Sosial KM
279	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Aliyang Kota Pontianak	Medis IP
280	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Perumnas 1 Kota Pontianak	Medis IP
281	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Purnama Kota Pontianak	Medis IP
282	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Siantan Tengah Kota Pontianak	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
283	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Saigon Kota Pontianak	Medis IP
284	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Kampung Bangka Kota Pontianak	Medis IP
285	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Rumah Sakit Jiwa Sudyanto Kabupaten Sintang	Medis IP
286	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Yayasan Peduli Pemulihan Indonesia (YPPI), Kabupaten Kubu Raya	Sosial KM
287	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Puskesmas Sungai Durian Kab. Kubu Raya	Medis IP
288	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Singkawang Bersinar Kota Singkawang	Sosial KM
289	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Pusat Rehabilitasi Narkoba "KITA" Singkawang	Sosial KM
290	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Rumah Sakit Jiwa (Koala) Provinsi Kalimantan Barat	Medis IP
291	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Puskesmas Bengkayang Kabupaten Bengkayang	Medis IP
292	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Puskesmas Anjungan Kabupaten Mempawah	Medis IP
293	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	RSUD. Dr Rubini Kabupaten Mempawah	Medis IP
294	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Rumah Sakit Parindu Kabupaten Sanggau	Medis IP
295	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	RSUD. M.Th Djaman Kabupaten Sanggau	Medis IP
296	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Perawatan Bunyu	Medis IP
297	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Tanjung Palas	Medis IP
298	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Pimping	Medis IP
299	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Bumi Rahayu	Medis IP
300	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Sedadap Nunukan	Medis IP
301	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Malinau Kota	Medis IP
302	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Tana Lia	Medis IP
303	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Tideng Pale	Medis IP
304	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Klinik Bunyu Medika	Medis KM
305	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Yayasan Sekata (Selamatkan Anak Kita) Tarakan	Sosial KM
306	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	RSUD Dr. H. Jusuf SK Tarakan	Medis IP
307	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Klinik Polres Tarakan	Medis IP
308	Kalimantan Utara	BNN Kabupaten Nunukan	UPT Puskesmas Sanur	Medis IP
309	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda	Medis IP
310	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Puskesmas Teluk Lingga	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
311	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Puskesmas Bontang Utara 1	Medis IP
312	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Puskesmas Baru Tengah Kota Balikpapan	Medis IP
313	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Sekata Foundation	Sosial KM
314	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	RSUD Datu Sanggul Rantau	Medis IP
315	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Puskesmas Sebamban II Tanah Bumbu	Medis IP
316	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Klinik Simpang Tanah Bumbu	Medis KM
317	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Puskesmas Bati-Bati	Medis IP
318	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Klinik Utama Mubarak	Medis KM
319	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	RSIA Mutiara Bunda	Medis KM
320	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Klinik Gambut Medika	Medis KM
321	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas 9 November	Medis IP
322	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas Teluk Tiram	Medis IP
323	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas Beruntung Raya	Medis IP
324	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Puskesmas Cempaka	Medis IP
325	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Rumah Sakit Mawar	Medis KM
326	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Puskesmas Tebing Tinggi	Medis IP
327	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	RSUD H. Abdul Aziz Marabahan	Medis IP
328	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Puskesmas Berangas	Medis IP
329	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Klinik Pondok Sehat Ar-Rohmah	Sosial KM
330	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Yayasan Tarbiyatul Furqon	Sosial KM
331	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	RS Ceria	Medis KM
332	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Puskesmas Pelaihari	Medis IP
333	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	RS Mulia	Medis KM
334	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Puskesmas Danau Panggang	Medis IP
335	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Puskesmas Murung Pudak	Medis IP
336	Kalimantan Selatan		Puskesmas Wirang	Medis IP
337	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSJ Kalawa Atei Palangka Raya	Medis IP
338	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Mas Amsyar Kasongan	Medis IP
339	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD dr. Murjani Sampit	Medis IP
340	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas	Medis IP
341	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Kuala Pembuang	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
342	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Kuala Kurun	Medis IP
343	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan	RSUD Muara Teweh	Medis IP
344	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Tamiang Layang	Medis IP
345	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Lapas Narkotika Kelas Ila Kasongan	Sosial IP
346	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Yayasan Galilea Palangka Raya	Sosial KM
347	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Puskesmas Menteng	Medis IP
348	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Puskesmas Panarung	Medis IP
349	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Puskesmas Pahandut	Medis IP
350	Bali	BNNP Bali	RS Jiwa Provinsi Bali	Medis IP
351	Bali	BNNP Bali	RS Bhayangkara Polda Bali	Medis IP
352	Bali	BNNP Bali	Yayasan Sayap Tumbuh Nusantara (Satu Nusa)	Sosial KM
353	Bali	BNNP Bali	Bali Mental Health Clinic	Medis KM
354	Bali	BNNP Bali	Yayasan Bali Samsara Cabang Denpasar	Sosial KM
355	Bali	BNNP Bali	Yayasan Kasih Karunia	Sosial KM
356	Bali	BNNP Bali	Calm Rehab Bali	Sosial KM
357	Bali	BNNK Denpasar	Yayasan Anargya Sober House	Sosial KM
358	Bali	BNNK Denpasar	Yayasan Handaru Kasih Bali	Sosial KM
359	Bali	BNNK Badung	RSUD Mangusada Kab.Badung	Medis IP
360	Bali	BNNK Badung	Yayasan Pesona Sivana Bali	Sosial KM
361	Bali	BNNK Badung	Yayasan Musim Indonesia (YAMI)	Sosial KM
362	Bali	BNNK Badung	Puskesmas Kuta 1	Medis IP
363	Bali	BNNK Buleleng	Yayasan Bali Samsara Cabang Buleleng	Sosial KM
364	Bali	BNNK Karangasem	RSUD Karangasem	Medis IP
365	Bali	BNNK Gianyar	RSUD Sanjiwani Gianyar	Medis IP
366	Bali	BNNK Gianyar	RSUD Payangan Gianyar	Medis IP
367	Bali	BNNK Klungkung	RSUD Klungkung	Medis IP
368	NTB	BNNP NTB	RSJ Mutiara Sukma	Medis IP
369	NTB	BNNP NTB	Sentra Paramii	Sosial IP
370	NTB	BNNP NTB	Lembaga Rehabilitasi Gema	Sosial KM
371	NTB	BNNP NTB	Dinas Kesehatan Kab. Lombok Utara (Puskesmas Tanjung)	Medis IP
372	NTB	BNNK Sumbawa	RS Manambai	Medis IP
373	NTB	BNNK Sumbawa	Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa (Puskesmas Moyo Hilir)	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
374	NTB	BNNK Sumbawa Barat	Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa Barat (Puskesmas)	Medis IP
375	NTB	BNNK Bima	RSUD Bima	Medis IP
376	NTB	BNNK Bima	RSUD Dompu	Medis IP
377	NTB	BNNK Bima	Dinas Kesehatan Kab. Bima /Puskesmas Sae	Medis IP
378	NTT	BNNP NTT	Yayasan Lentera Mitra Harapan Soe	Sosial KM
379	NTT	BNNP NTT	Yayasan Warna Kasih Kupang	Sosial KM
380	NTT	BNNP NTT	RSJ Naimata Kupang	Medis IP
381	NTT	BNN Kota Kupang	UPTD Puskesmas Oepoi	Medis IP
382	NTT	BNN Kota Kupang	Klinik Utama Dewanta Mental Health Care Kupang	Sosial KM
383	NTT	BNN Kota Kupang	Klinik Kasih Bunda	Sosial KM
384	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	UPTD Puskesmas Ba'a	Medis IP
385	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	UPTD Puskesmas Korbafo	Medis IP
386	NTT	BNN Kab. Belu	UPTD Puskesmas Kota Atambua	Medis IP
387	NTT	BNN Kab. Belu	UPTD Puskesmas Haikesak	Medis IP
388	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	RSUD Mokoyurli Buol	Medis IP
389	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Klinik Agung	Medis KM
390	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	RSUD Torabelo Kab. Sigi	Medis IP
391	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Banua Vaksin Canira	Medis IP
392	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	RSU Daerah Anutapura Palu	Medis IP
393	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	R. Medical Center	Medis IP
394	Sulawesi Tengah	BNNK Morowali	UPTD Puskesmas Wosu	Medis IP
395	Sulawesi Tengah	BNNK Morowali	RSU Kolonedale	Medis IP
396	Sulawesi Tengah	BNNK Donggala	BLU Puskesmas Delatope	Medis IP
397	Sulawesi Tengah	BNNK Poso	Puskesmas Taripa	Medis IP
398	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Lapas Kelas IIA Manado	Medis/Sosial IP
399	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Lapas Kelas IIB Tondano	Medis/Sosial IP
400	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Yayasan Bunga Bakung	Sosial KM
401	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Rs. Bhayangkara Tingkat III Manado	Medis IP
402	Sulawesi Utara	BNNK Bolaang Mongondow	Puskesmas Inobonto Bolaang Mongondow	Medis IP
403	Sulawesi Utara	BNNK Bitung	Puskesmas Bitung Barat	Medis IP
404	Sulawesi Utara	BNNK Manado	Rs. Bhayangkara Tingkat III Manado	Medis IP
405	Sulawesi Utara	BNNK Manado	Yayasan Batamang Plus	Sosial KM
406	Sulawesi Utara	BNNK Manado	RBM Sahabat Sehati	Sosial KM
407	Sulawesi Utara	BNNK Sangihe	Puskesmas Tahuna Barat	Medis IP
408	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	RSD Konawe Selatan	Medis IP
409	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	BLUD RSU Bombana	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
410	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	RSUD Kolaka Timur	Medis IP
411	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Puskesmas Lepo-Lepo	Medis IP
412	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Puskesmas Kandai	Medis IP
413	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Lapas Perempuan Kelas III Kendari	Sosial IP
414	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Lapas Kelas II A Kendari	Sosial IP
415	Sulawesi Tenggara	BNNK Kendari	Puskesmas Mokoau	Medis IP
416	Sulawesi Tenggara	BNNK Kendari	Puskesmas Poasia	Medis IP
417	Sulawesi Tenggara	BNNK Muna	Puskesmas Laende	Medis IP
418	Sulawesi Tenggara	BNNK Muna	BLU Klinik Pemasarakatan Rutan Raha	Sosial IP
419	Sulawesi Tenggara	BNNK Kolaka	Puskesmas Wundulako	Medis IP
420	Sulawesi Tenggara	BNNK Kolaka	Puskesmas Pomalaa	Medis IP
421	Sulawesi Tenggara	BNNK Baubau	RSUD Kota Baubau	Medis IP
422	Sulawesi Tenggara	BNNK Baubau	Lapas Kelas II A Baubau	Sosial IP
423	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Rumah Sakit Khusus Daerah Prov. Sulsel	Rajal Medis
424	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	RSUD Sayang Rakyat Prov. Sulsel	Ranap Medis
425	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Tamalate, Kota Makassar	Rajal Medis
426	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Kanjilo Kab. Gowa	Rajal Medis
427	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Lawawol Kab. Sidrap	Rajal Medis
428	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Yayasan Mitra Husada Sulawesi Selatan	Rajal Sosial
429	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Klinik Transit Maros	Rajal Medis
430	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Yayasan Prana Waksara Nusantara	Rajal Sosial
431	Sulawesi Selatan	BNNK Palopo	RSUD Sawerigading, Kota Palopo	Rajal Medis
432	Sulawesi Selatan	BNNK Palopo	Puskesmas Wara Utara, Kota Palopo	Rajal Medis
433	Sulawesi Selatan	BNNK Palopo	RS Mujaisyah Kota Palopo	Rajal Medis
434	Sulawesi Selatan	BNNK Palopo	Lembaga Rehab Hati Kota Palopo	Rajal Sosial

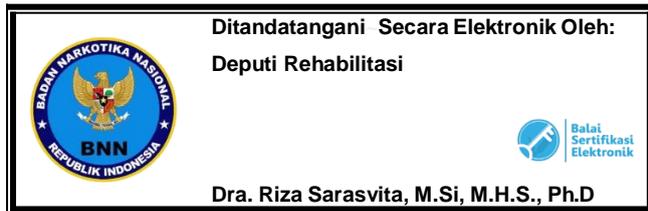
NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
435	Sulawesi Selatan	BNNK Tana Toraja	Puskesmas Tallunglipu, Kab. Tana Toraja	Rajal Medis
436	Sulawesi Selatan	BNNK Tana Toraja	Yayasan Pemulihan Bethesda Kab.Tana Toraja	Ranap Sosial
437	Sulawesi Selatan	BNNK Bone	RSUD Tenlawaru, Kab. Bone	RaJal Medis
438	Sulawesi Selatan	BNNK Bone	Puskesmas Watampone, Kab. Bone	RaJal Medis
439	Sulawesi Selatan	BNNK Bone	Lembaga FP2AI Kab. Bone	Rajal Sosial
440	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Majene	Medis IP
441	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Durikumba	Medis IP
442	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Pangale	Medis IP
443	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Mapilli	Medis IP
444	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Mamuju Tengah	Medis IP
445	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Pasangkayu	Medis IP
446	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Pelitakan	Medis IP
447	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Katumbangan	Medis IP
448	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Sarjo	Medis IP
449	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Mamuju	Medis IP
450	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Wonomulyo	Medis IP
451	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Polewali Mandar	Medis IP
452	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Sendana I	Medis IP
453	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Rangsas	Medis IP
454	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Lariang	Medis IP
455	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Binanga	Medis IP
456	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Bhayangkara	Medis IP
457	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Bambu	Medis IP
458	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Yayasan Mandar Indonesia	Sosial KM
459	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Elly Uyo	Medis IP
460	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Hamadi	Medis IP
461	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Koya Barat	Medis IP
462	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Abepura	Medis IP
463	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Waena	Medis IP
464	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Tanjung Ria	Medis IP
465	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Abe Pantai	Medis IP
466	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Jayapura Utara	Medis IP
467	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Hebeybhulu Yoka	Medis IP
468	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Imbi	Medis IP
469	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Kotaraja	Medis IP
470	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Twano	Medis IP
471	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Skouw	Medis IP
472	Papua	BNNP Papua	Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura	Medis/Sosial IP
473	Papua	BNNP Papua	RSUD Kwaingga	Medis IP
474	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Ywan	Medis IP
475	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Arso III	Medis IP
476	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Arso Kota	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
477	Papua	BNNP Papua	IPWL Yayasan Pendampingan Dan Pemberdayaan Masyarakat Papua- Papua Barat (YP2MP)	Sosial KM
478	Papua	BNNP Papua	Polres Merauke Polda Papua	Medis IP
479	Papua	BNNP Papua	Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura	Medis/Sosial IP
480	Papua	BNN Kab. Jayapura	Puskesmas Sentani	Medis IP
481	Papua	BNN Kab. Jayapura	Puskesmas Harapan	Medis IP
482	Papua	BNN Kab. Mimika	Puskesmas Timika Jaya	Medis IP
483	Papua	BNN Kab. Mimika	Puskesmas Wania	Medis IP
484	Papua	BNN Kab. Mimika	Puskesmas Timika	Medis IP
485	Papua	BNN Kab. Mimika	RSUD Mimika	Medis IP
486	Papua	BNN Kab. Mimika	Klinik Puri Husada	Medis KM
487	Papua	BNN Kab. Mimika	RS Mitra Masyarakat	Medis KM
488	Papua Barat	BNNP Papua Barat	RSAL dr.Azhar Zahir	Medis IP
489	Papua Barat	BNNP Papua Barat	RS Tingkat IV J.A Dimara	Medis IP

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 23 Januari 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4244/XII/DE/RH.02.03/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 9 (sembilan) berkas
Perihal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi
Operasionalisasi Unit IBM TA. 2024

Jakarta, 30 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi Seluruh Indonesia**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- e. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/273/III/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama TA. 2024;
- f. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua TA. 2024;
- g. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/909/VIII/DE/RH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Ketiga TA. 2024;
- h. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional TA. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah melaksanakan Evaluasi Operasionalisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) terhadap 418 unit IBM pada bulan Desember 2024. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh data dan informasi capaian program, faktor pendukung serta penghambat implementasi program IBM sebagai dasar dalam menentukan kebijakan di tahun anggaran 2025.

3. Hasil evaluasi operasionalisasi unit IBM sebagai berikut (data terlampir):

a. Capaian fase perkembangan unit IBM

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pendamping IBM di BNNP & BNNK/ Kota serta telaah bukti dukung pelaksanaan tata kelola, kegiatan dan layanan IBM, diperoleh capaian fase perkembangan unit IBM sebagai berikut:

- Sebanyak 99 unit IBM (23,68%) memenuhi indikator fase Prima
- Sebanyak 221 unit IBM (52,97%) memenuhi indikator fase Tangguh
- Sebanyak 49 unit IBM (11,72%) memenuhi indikator fase Berkembang
- Sebanyak 32 unit IBM (7,66%) memenuhi indikator fase Tumbuh
- Sebanyak 15 unit IBM (3,59%) memenuhi indikator fase Rintisan
- Sebanyak 2 unit (0,48%) belum memenuhi indikator fase perkembangan sehingga berada dalam kategori Pra Fase

Berdasarkan capaian fase perkembangan tersebut, unit IBM yang telah operasional adalah 401 unit (95,93%). Unit IBM disebut operasional setelah memenuhi indikator minimal fase Tumbuh, dimana seluruh sub komponen Tata Kelola telah terpenuhi, Agen Pemulihan (AP) telah mampu melakukan seluruh kegiatan IBM (sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan), serta AP telah dapat menemu kenali dan berhasil menjangkau klien untuk dilakukan skrining dengan menggunakan formulir DAST-10 (*Drug Abuse Screening Test*) untuk selanjutnya kemudian klien diberikan layanan intervensi hingga bina lanjut.

b. Gambaran kegiatan IBM

Kegiatan IBM adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh AP di luar kegiatan layanan pemulihan, meliputi sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan. Idealnya, kegiatan IBM dilakukan pada awal program dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sehingga masing-masing pihak dapat saling memahami manfaat dan memberikan kontribusi dalam memajukan program IBM. AP dalam melakukan kegiatan IBM senantiasa memerlukan pendampingan intensif dari petugas BNNP & BNNK/ Kota. Dari hasil evaluasi di Tahun 2024 ini AP telah melakukan sosialisasi IBM sebanyak 3.277 kali kepada 73.749 audiens, pemetaan 1.330 kali, dan penjangkauan dilakukan kepada 3.073 orang.

c. Gambaran layanan IBM

Layanan intervensi IBM adalah rangkaian kegiatan yang diberikan oleh AP kepada klien IBM mulai dari skrining, penerimaan awal, layanan intervensi wajib dan pilihan serta layanan bina lanjut. Layanan IBM diberikan oleh AP kepada klien tidak terlepas dari pembinaan dan pendampingan petugas BNNP & BNNK/ Kota secara komprehensif serta keterlibatan keluarga dan/ atau orang terdekat dalam upaya pemulihan dan pemantauan terhadap klien. Pada Tahun 2024 tercatat keterlibatan anggota keluarga/ orang terdekat dalam layanan IBM sejumlah 1.819 orang yang terdiri dari orang tua, kakak, adik, suami/ istri, paman/ bibi atau guru sebagai wali murid di sekolah, walaupun terdapat beberapa klien IBM yang memilih untuk tidak melibatkan keluarga dengan alasan takut, malu, ataupun berdomisili jauh dari keluarga.

d. Gambaran profil klien IBM

Jumlah klien IBM yang mengikuti layanan pada tahun 2024 sebanyak 2.310 orang dengan profil berikut:

- Mayoritas klien merupakan hasil penjangkauan AP yaitu 98,40% (2.273 orang)
- Sebanyak 93,90% (2.169 orang) klien berjenis kelamin laki-laki, dan kebanyakan dalam kelompok usia 17-25 tahun (38,01%) dan 26-35 tahun (26,36%)

- Pendidikan terakhir klien mayoritas adalah SMA/ sederajat (53,12%), mayoritas bekerja sebagai buruh/ petani/ nelayan/ pekebun (35,19%) dan pelajar/ mahasiswa (25,19%)
- Jenis zat yang paling banyak disalahgunakan adalah shabu (34,88%), sedatif/ hipnotik (9,71%) dan kanabis (8,70%)

e. Gambaran Agen Pemulihan

Agen Pemulihan (AP) merupakan anggota masyarakat yang tinggal di desa/ kelurahan yang dipilih oleh Kepala Desa/ Lurah untuk melaksanakan kegiatan dan layanan IBM setelah mendapatkan pembekalan sebagai mitra kerja BNN. AP yang ditunjuk biasanya merupakan orang-orang yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan desa/ kelurahan, sehingga telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Jumlah AP pada tahun 2024 ini terlapor sebanyak 2.210 orang, dengan berbagai latar belakang unsur masyarakat yang berbeda-beda, mayoritas adalah laki-laki dan berasal dari unsur tokoh masyarakat (29,50%).

f. Gambaran pendanaan mandiri untuk IBM

Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 115 unit IBM (27,51%) telah memperoleh pendanaan mandiri untuk operasional unit IBM serta pelaksanaan kegiatan & layanan. Pendanaan mandiri ini merupakan hasil sosialisasi, koordinasi dan advokasi yang dilakukan oleh AP dengan pendampingan serta pembinaan penuh petugas BNNP & BNNK/Kota. Dukungan dana diperoleh dari desa, kelurahan, OPD, iuran/ sumbangan/ donasi, dan/ atau CSR dengan rentang nilai mulai dari Rp 875.000,- sampai dengan Rp 172.133.000,-.

g. Hasil survey kebermanfaatan program IBM terhadap lingkungan & Masyarakat

Dalam rangka mengetahui dampak kegiatan IBM serta kebermanfaatannya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat melalui petugas BNNP & BNNK/Kota melakukan survey berupa penyebaran pengisian kuesioner dengan menggunakan skala *likert* pemberian skor 0-4.

survey di lakukan terhadap 4.111 orang responden yang merupakan anggota masyarakat non AP di wilayah desa/ kelurahan. Mayoritas responden berada dalam kelompok usia 36-45 tahun (27,66%), merupakan warga masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi IBM (72,39%). Berdasarkan hasil survey yang telah di lakukan tercatat bahwa mayoritas responden (92,36%) telah mengetahui keberadaan IBM di wilayah tempat tinggalnya. Selain itu, dari pertanyaan 1-6 dalam survey diperoleh skor rata-rata 4 dari total pemberian skor 0-4 yang berarti bahwa IBM dapat memberikan dampak sangat positif dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat di wilayah desa/ kelurahan dalam hal penanganan penyalah guna narkoba.

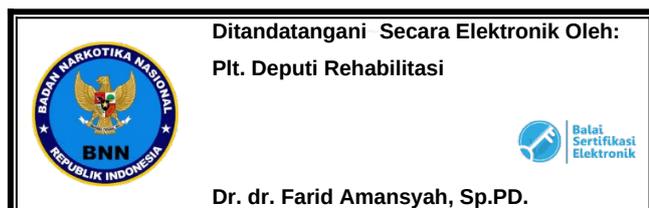
h. Identifikasi faktor pendukung & penghambat implementasi program IBM

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat faktor pendukung keberhasilan program IBM yang harus ditingkatkan, dan faktor penghambat yang harus ditindaklanjuti agar dapat diatasi. beberapa faktor pendukung & faktor penghambat yang dikategorikan sesuai dengan pelaksana program IBM, diantaranya adalah:

- Petugas pendamping IBM di BNNP & BNNK/ Kota
- Agen Pemulihan (AP)
- Kepala Desa/ Lurah

4. Berdasarkan butir tiga di atas, bersama ini kami sampaikan apresiasi kepada bidang Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota atas implementasi program IBM tahun 2024. Diharapkan kinerja pada tahun 2024 dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap tim Agen Pemulihan (AP) di IBM dapat ditingkatkan, sehingga tujuan IBM yakni peningkatan akses layanan rehabilitasi hingga ke tingkat desa/ kelurahan dapat diwujudkan.

5. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN

**FASE PERKEMBANGAN UNIT IBM BINAAN BNNP & BNNK/ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024**



No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
Prima (99 unit)					
1	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Balee Me	Kuta Blang	Kabupaten Bireuen
2	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Juli Paseh	Juli	Kabupaten Bireuen
3	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Cot Girek Kandang	Muara Dua	Kota Lhokseumawe
4	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Paya Punteuet	Muara Dua	Kota Lhokseumawe
5	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Perdamaian	Kota Kualasimpang	Kabupaten Aceh Tamiang
6	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Kota Lintang	Kota Kualasimpang	Kabupaten Aceh Tamiang
7	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Mamplam	Simpang Tiga	Kabupaten Pidie
8	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Anoe Itam	Sukajaya	Kota Sabang
9	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Keuneukai	Sukamakmue	Kota Sabang
10	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Sekip	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang
11	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Paya Perupuk	Tanjung Pura	Kabupaten Langkat
12	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Perlis	Berandan Barat	Kabupaten Langkat
13	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Meranti	Meranti	Kabupaten Asahan
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Sei Alim	Sei Dadap	Kabupaten

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Hasak		Asahan
15	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Barbaran Jae	Panyabungan Barat	Kabupaten Mandailing Natal
16	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Sei Rejo	Sei Rampah	Kabupaten Serdang Bedagai
17	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Dolok Manampang	Dolok Masihul	Kabupaten Serdang Bedagai
18	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Buntu Turunan	Hatonduhan	Kabupaten Simalungun
19	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Kwala Gunung	Datuk Lima Puluh	Kabupaten Batu Bara
20	Sumatera Barat	BNNP SUMATERA BARAT	Desa Balai Naras	Pariaman Utara	Kota Pariaman
21	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Desa Tanjung Telang	Prabumulih Barat	Kota Prabumulih
22	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Sidoarjo	Umpu Semenguk	Kabupaten Way Kanan
23	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Bukit Besar	Girimaya	Kota Pangkalpinang
24	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Asam	Rangkui	Kota Pangkalpinang
25	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pagarawan	Merawang	Kabupaten Bangka
26	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Timur	Singaran Pati	Kota Bengkulu
27	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Bintaro	Pesanggrahan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
28	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Penjaringan	Penjaringan	Kota Administrasi Jakarta Utara
29	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Semper Barat	Cilincing	Kota Administrasi Jakarta Utara
30	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipanas	Cipanas	Kabupaten Cianjur
31	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipetir	Cibeber	Kabupaten Cianjur
32	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Pagelaran	Ciomas	Kabupaten Bogor
33	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Jabon Mekar	Parung	Kabupaten Bogor
34	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Cinta Asih	Samarang	Kabupaten Garut
35	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Sukaratu	Banyuresmi	Kabupaten Garut
36	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Mekarjaya	Baregbeg	Kabupaten Ciamis
37	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Pasirtamiang	Cihaurbeuti	Kabupaten Ciamis
38	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Kahiyangan	Pancalang	Kabupaten Kuningan

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
39	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Tempuran	Tempuran	Kabupaten Karawang
40	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Muara	Cilamaya Wetan	Kabupaten Karawang
41	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Gayamsari	Gayamsari	Kota Semarang
42	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Bansari	Bansari	Kabupaten Temanggung
43	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Gununggempol	Jumo	Kabupaten Temanggung
44	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Bulurejo	Mertoyudan	Kabupaten Magelang
45	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Ringinarum	Ringinarum	Kabupaten Kendal
46	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Kalitinggar	Padamara	Kabupaten Purbalingga
47	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Panican	Kemangkon	Kabupaten Purbalingga
48	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Lawangaji	Kandeman	Kabupaten Batang
49	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Jeruklegi Kulon	Jeruklegi	Kabupaten Cilacap
50	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Kebanggan	Sumbang	Kabupaten Banyumas
51	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Ledug	Kembaran	Kabupaten Banyumas
52	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Giripurwo	Girimulyo	Kabupaten Kulon Progo
53	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Cerme	Panjatan	Kabupaten Kulon Progo
54	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Giwangan	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
55	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Wirogunan	Mergangsan	Kota Yogyakarta
56	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kalurahan Sinduharjo	Ngaglik	Kabupaten Sleman
57	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kalurahan Sinduadi	Mlati	Kabupaten Sleman
58	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kalurahan Potorono	Banguntapan	Kabupaten Bantul
59	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kalurahan Bangunharjo	Sewon	Kabupaten Bantul
60	Jawa Timur	BNNP JAWA TIMUR	Desa Made	Lamongan	Kabupaten Lamongan
61	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Cerme Lor	Cerme	Kabupaten Gresik
62	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Glindah	Kedamean	Kabupaten Gresik
63	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Wates	Magersari	Kota Mojokerto
64	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Meri	Kranggan	Kota Mojokerto

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
65	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Karangsono	Kanigoro	Kabupaten Blitar
66	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Sumberasri	Nglegok	Kabupaten Blitar
67	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Kelurahan Temas	Batu	Kota Batu
68	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Junrejo	Junrejo	Kota Batu
69	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Kingking	Tuban	Kabupaten Tuban
70	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Wedoro	Waru	Kabupaten Sidoarjo
71	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Medaeng	Waru	Kabupaten Sidoarjo
72	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Pogalan	Pogalan	Kabupaten Trenggalek
73	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kedungdowo	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk
74	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kwagean	Loceret	Kabupaten Nganjuk
75	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Dandangan	Kota	Kota Kediri
76	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Gadang	Sukun	Kota Malang
77	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Bandungrejosari	Sukun	Kota Malang
78	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Paron	Ngasem	Kabupaten Kediri
79	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Gadungan	Puncu	Kabupaten Kediri
80	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Karah	Kecamatan Jambangan	Kota Surabaya
81	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Wonorejo	Kecamatan Rungkut	Kota Surabaya
82	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Tengah	Pontianak Kota	Kota Pontianak
83	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Arang Limbung	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
84	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Mantimin	Batu Mandi	Kabupaten Balangan
85	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Kampung 6	Tarakan Timur	Kota Tarakan
86	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Karang Rejo	Tarakan Barat	Kota Tarakan
87	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Air Hitam	Samarinda Ulu	Kota Samarinda
88	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Lelipang	Tamako	Kabupaten Kepulauan Sangihe
89	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kabobona	Dolo	Kabupaten Sigi
90	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kotarindau	Dolo	Kabupaten Sigi
91	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan	Palu Utara	Kota Palu

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Mamboro Barat		
92	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Towale	Banawa Tengah	Kabupaten Donggala
93	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Loli Dondo	Banawa	Kabupaten Donggala
94	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Patemon	Seririt	Kabupaten Buleleng
95	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Lokapaksa	Seririt	Kabupaten Buleleng
96	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Ubung Kaja	Denpasar Utara	Kota Denpasar
97	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Sumerta Kelod	Denpasar Timur	Kota Denpasar
98	NTB	BNNP NTB	Desa Tanjung	Tanjung	Kabupaten Lombok Utara
99	NTB	BNNP NTB	Desa Medana	Tanjung	Kabupaten Lombok Utara
Tangguh (221 unit)					
1	Aceh	BNNP ACEH	Kelurahan Meunasah Baktrieng	Krueng Barona Jaya	Kabupaten Aceh Besar
2	Aceh	BNNP ACEH	Gampong Meureu Baro	Indrapuri	Kabupaten Aceh Besar
3	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Peulanggahan	Kuta Raja	Kota Banda Aceh
4	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Mesjid Tuha	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
5	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Meunasah Lhok	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
6	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Dayah Caleue	Indra Jaya	Kabupaten Pidie
7	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Sukarejo	Langsa Timur	Kota Langsa
8	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Pondok Pabrik	Langsa Lama	Kota Langsa
9	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Lhok Sialang Rayeuk	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan
10	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Kampung Bukit	Blangkejeren	Kabupaten Gayo Lues
11	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Desa Kutelintang	Blangkejeren	Kabupaten Gayo Lues
12	Sumatera Utara	BNNP SUMATERA UTARA	Kelurahan Tanjung Mulia	Medan Deli	Kota Medan
13	Sumatera Utara	BNNP SUMATERA UTARA	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Medan Deli	Kota Medan
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Desa Kubu Simbelang	Tiga Panah	Kabupaten Karo
15	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Desa Doulu	Berastagi	Kabupaten Karo
16	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Berngam	Binjai Kota	Kota Binjai

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
17	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Rambung Dalam	Binjai Selatan	Kota Binjai
18	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjung Balai	Kelurahan Selat Tanjung Medan	Datuk Bandar Timur	Kota Tanjungbalai
19	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjung Balai	Kelurahan Tanjungbalai Kota IV	Tanjungbalai Utara	Kota Tanjungbalai
20	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Lasara Bahili	Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
21	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Sisobahili Tabaloho	Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
22	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Pagar Jati	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang
23	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Bane	Siantar Utara	Kota Pematangsiantar
24	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Sukaraja	Siantar Marihat	Kota Pematangsiantar
25	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Kelurahan Pidoli Dolok	Panyabungan	Kabupaten Mandailing Natal
26	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Kelurahan Huta Tonga	Angkola Muara Tais	Kabupaten Tapanuli Selatan
27	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Kelurahan Sigalangan	Batang Angkola	Kabupaten Tapanuli Selatan
28	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Damar Sari	Padang Hilir	Kota Tebing Tinggi
29	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Persiakan	Padang Hulu	Kota Tebing Tinggi
30	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Tanjung Pasir	Tanah Jawa	Kabupaten Simalungun
31	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Damuli Kebun	Kualuh Selatan	Kabupaten Labuhanbatu Utara
32	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Tanjung Pasir	Kualuh Selatan	Kabupaten Labuhanbatu Utara
33	Sumatera Barat	BNNP SUMATERA BARAT	Kelurahan Limau Manis	Pauh	Kota Padang
34	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Muara Panas	Bukit Sundi	Kabupaten Solok
35	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Kinari	Bukit Sundi	Kabupaten Solok
36	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Santur	Barangin	Kota Sawahlunto
37	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Salak	Talawi	Kota Sawahlunto
38	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Kelurahan Padang Tinggi Piliang	Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh
39	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Bancah Kariang	Kinali	Kabupaten Pasaman Barat
40	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Mahakarya	Luhak Nan Duo	Kabupaten Pasaman Barat
41	Riau	BNNP RIAU	Kelurahan Kandis	Kandis	Kabupaten Siak

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Kota		
42	Riau	BNNP RIAU	Kelurahan Bagan Hulu	Bangko	Kabupaten Rokan Hilir
43	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Tebing Tinggi	Benai	Kabupaten Kuantan Singingi
44	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Simandolak	Benai	Kabupaten Kuantan Singingi
45	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Simpang Beringin	Bandar Sei Kijang	Kabupaten Pelalawan
46	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Mekar Jaya	Pangkalan Kerinci	Kabupaten Pelalawan
47	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Kampung Baru	Senapelan	Kota Pekanbaru
48	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Bencah Lesung	Tenayan Raya	Kota Pekanbaru
49	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Bukit Timah	Dumai Selatan	Kota Dumai
50	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Pangkalan Sesai	Dumai Barat	Kota Dumai
51	Jambi	BNNP JAMBI	Desa Talang Belido	Sungai Gelam	Kabupaten Muaro Jambi
52	Jambi	BNNP JAMBI	Desa Danau Kedap	Maro Sebo	Kabupaten Muaro Jambi
53	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Desa Sidomukti	Dendang	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
54	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Desa Teluk Majelis	Kuala Jambi	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
55	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Kenali Asam Bawah	Kota Baru	Kota Jambi
56	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Sungai Asam	Pasar Jambi	Kota Jambi
57	Jambi	BNN Kab Batanghari	Desa Terusan	Maro Sebo Ilir	Kabupaten Batanghari
58	Jambi	BNN Kab Batanghari	Desa Pematang V Suku	Muara Tembesi	Kabupaten Batanghari
59	Sumatera Selatan	BNNP SUMATERA SELATAN	Desa Teluk	Lais	Kabupaten Musi Banyuasin
60	Sumatera Selatan	BNN Provinsi Sumatera Selatan	Desa Gasing	Talang Kelapa	Banyuasin
61	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Watervang	Lubuklinggau Timur I	Kota Lubuklinggau
62	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Batu Jungul	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
63	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Kelurahan Pasar Prabumulih II	Prabumulih Utara	Kota Prabumulih
64	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Muara Gula Baru	Ujan Mas	Kabupaten Muara Enim
65	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Lubuk Empelas	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim
66	Lampung	BNNP LAMPUNG	Desa Jatimulyo	Jati Agung	Kabupaten Lampung

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
					Selatan
67	Lampung	BNNP LAMPUNG	Desa Kibang	Metro Kibang	Kabupaten Lampung Timur
68	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Tegal Binangun	Sumberejo	Kabupaten Tanggamus
69	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Kecapi	Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan
70	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Tetaan	Penengahan	Kabupaten Lampung Selatan
71	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Yosomulyo	Metro Pusat	Kota Metro
72	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Margorejo	Metro Selatan	Kota Metro
73	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Mataram Baru	Mataram Baru	Kabupaten Lampung Timur
74	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Sri Menanti	Bandar Sri Bhawono	Kabupaten Lampung Timur
75	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Cugah	Baradatu	Kabupaten Way Kanan
76	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Rebo	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
77	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Air Saga	Tanjungpandan	Kabupaten Belitung
78	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Aik Rayak	Tanjungpandan	Kabupaten Belitung
79	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Kelurahan Toboali	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
80	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Sadai	Tukak Sadai	Kabupaten Bangka Selatan
81	Kepulauan Riau	BNNP KEPULAUAN RIAU	Kelurahan Sungai Langkai	Kecamatan Sagulung	Kota Batam
82	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Tanjung Uncang	Batu Aji	Kota Batam
83	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Buliang	Batu Aji	Kota Batam
84	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Air Raja	Tanjung Pinang Timur	Kota Tanjung Pinang
85	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Kampung Baru	Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang
86	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Sawang Laut	Kundur Barat	Kabupaten Karimun
87	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Tanjung Berlian Barat	Kundur Utara	Kabupaten Karimun
88	Bengkulu	BNNP BENGKULU	Kelurahan Kandang	Kampung Melayu	Kota Bengkulu
89	Bengkulu	BNNP BENGKULU	Kelurahan Lempuing	Ratu Agung	Kota Bengkulu
90	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Barat	Gading Cempaka	Kota Bengkulu
91	DKI Jakarta	BNNP DKI JAKARTA	Kelurahan Kota Bambu Selatan	Palmerah	Kota Administrasi

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
					Jakarta Barat
92	DKI Jakarta	BNNP DKI JAKARTA	Kelurahan Petamburan	Tanah Abang	Kota Administrasi Jakarta Pusat
93	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	Kebayoran Lama	Kota Administrasi Jakarta Selatan
94	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Cipinang	Pulo Gadung	Kota Administrasi Jakarta Timur
95	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Ciracas	Ciracas	Kota Administrasi Jakarta Timur
96	Banten	BNNP BANTEN	Desa Baros	Baros	Kabupaten Serang
97	Banten	BNNP BANTEN	Kelurahan Banten	Kasemen	Kota Serang
98	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Jombang	Ciputat	Kota Tangerang Selatan
99	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Bendungan	Cilegon	Kota Cilegon
100	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Tamanbaru	Citangkil	Kota Cilegon
101	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Tanah Tinggi	Tangerang	Kota Tangerang
102	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Cipondoh Makmur	Cipondoh	Kota Tangerang
103	Jawa Barat	BNNP JAWA BARAT	Desa Sukatani	Sukatani	Kabupaten Purwakarta
104	Jawa Barat	BNNP JAWA BARAT	Desa Sukajaya	Sukatani	Kabupaten Purwakarta
105	Jawa Barat	BNNP JAWA BARAT	Desa Pangandaran	Pangandaran	Kabupaten Pangandaran
106	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Kebon Jayanti	Kiaracondong	Kota Bandung
107	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Kacapiring	Batununggal	Kota Bandung
108	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Cibabat	Cimahi Utara	Kota Cimahi
109	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Melong	Cimahi Selatan	Kota Cimahi
110	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Cipada	Cikalongwetan	Kabupaten Bandung Barat
111	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Batujajar Barat	Batujajar	Kabupaten Bandung Barat
112	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Loji	Simpenan	Kabupaten Sukabumi
113	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Pasirsuren	Palabuhanratu	Kabupaten Sukabumi
114	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Cisolak Pasar	Cimanggis	Kota Depok
115	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Pondok	Beji	Kota Depok

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Cina		
116	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Sukamanah	Cipedes	Kota Tasikmalaya
117	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Cipedes	Cipedes	Kota Tasikmalaya
118	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Pagundan	Lebakwangi	Kabupaten Kuningan
119	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Sunyaragi	Kecamatan Kesambi	Kota Cirebon
120	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Kebonbaru	Kejaksan	Kota Cirebon
121	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Tlogosari Kulon	Pedurungan	Kota Semarang
122	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Pajang	Laweyan	Kota Surakarta
123	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Mojosongo	Jebres	Kota Surakarta
124	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Tegalrejo	Tegalrejo	Kabupaten Magelang
125	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Plantaran	Kaliwungu Selatan	Kabupaten Kendal
126	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Kemandungan	Tegal Barat	Kota Tegal
127	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Kejambon	Tegal Timur	Kota Tegal
128	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Kalipucang Kulon	Batang	Kabupaten Batang
129	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Kelurahan Tegalkamulyan	Cilacap Selatan	Kabupaten Cilacap
130	Jawa Timur	BNNP JAWA TIMUR	Desa Randubango	Mojosari	Kabupaten Mojokerto
131	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Gedongombo	Semanding	Kabupaten Tuban
132	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Mlinjon	Suruh	Kabupaten Trenggalek
133	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Desa Pandanarum	Tempeh	Kabupaten Lumajang
134	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kelurahan Tompokersan	Lumajang	Kabupaten Lumajang
135	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Kelurahan Jepun	Tulungagung	Kabupaten Tulungagung
136	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Kedungwaru	Kedungwaru	Kabupaten Tulungagung
137	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Lecari	Sukorejo	Kabupaten Pasuruan
138	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Sumber Suko	Gempol	Kabupaten Pasuruan
139	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Sepanjang	Gondanglegi	Kabupaten Malang
140	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Landungsari	Dau	Kabupaten Malang
141	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Aengbaja Kenek	Bluto	Kabupaten Sumenep

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
142	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Bumbungan	Bluto	Kabupaten Sumenep
143	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Kalimook	Kalianget	Sumenep
144	Kalimantan Barat	BNNP KALIMANTAN BARAT	Desa Hilir Kantor	Ngabang	Kabupaten Landak
145	Kalimantan Barat	BNNP KALIMANTAN BARAT	Kelurahan Suka Harja	Delta Pawan	Kabupaten Ketapang
146	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Parit Mayor	Pontianak Timur	Kota Pontianak
147	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Sungai Rengas	Sungai Kakap	Kabupaten Kubu Raya
148	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Galang	Sungai Pinyuh	Kabupaten Mempawah
149	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Kelurahan Sungai Pinyuh	Sungai Pinyuh	Kabupaten Mempawah
150	Kalimantan Tengah	BNNP KALIMANTAN TENGAH	Kelurahan Baamang Barat	Baamang	Kabupaten Kotawaringin Timur
151	Kalimantan Tengah	BNNP KALIMANTAN TENGAH	Kelurahan Pahandut Seberang	Pahandut	Kota Palangka Raya
152	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Bukit Tunggul	Jekan Raya	Kota Palangka Raya
153	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Banturung	Bukit Batu	Kota Palangka Raya
154	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Mendawai	Arut Selatan	Kabupaten Kotawaringin Barat
155	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Candi	Kumai	Kabupaten Kotawaringin Barat
156	Kalimantan Selatan	BNNP KALIMANTAN SELATAN	Kelurahan Alalak Tengah	Banjarmasin Utara	Kota Banjarmasin
157	Kalimantan Selatan	BNNP KALIMANTAN SELATAN	Kelurahan Kelayan Luar	Banjarmasin Tengah	Kota Banjarmasin
158	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Alalak Selatan	Banjarmasin Utara	Kota Banjarmasin
159	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Landasan Ulin Timur	Landasan Ulin	Kota Banjarbaru
160	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	Liang Anggang	Kota Banjarbaru
161	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Inan	Paringin Selatan	Kabupaten Balangan
162	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Desa Batik	Bakumpai	Kabupaten Barito Kuala
163	Kalimantan	BNN Kab. Barito	Desa Sungai Lirik	Bakumpai	Kabupaten

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
	Selatan	Kuala			Barito Kuala
164	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Kelurahan Pelaihari	Pelaihari	Kabupaten Tanah Laut
165	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Desa Nusa Indah	Bati-Bati	Kabupaten Tanah Laut
166	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Lok Suga	Haur Gading	Kabupaten Hulu Sungai Utara
167	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Pakacangan	Amuntai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara
168	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Mangkupum	Muara Uya	Kabupaten Tabalong
169	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Karang Mumus	Samarinda Kota	Kota Samarinda
170	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Margasari	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan
171	Kalimantan Utara	BNNP KALIMANTAN UTARA	Desa Jelarai Selor	Tanjung Selor	Kabupaten Bulungan
172	Kalimantan Utara	BNNP KALIMANTAN UTARA	Kelurahan Juata Permai	Tarakan Utara	Kota Tarakan
173	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Sanur	Tulin Onsoi	Kabupaten Nunukan
174	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Harapan	Sebuku	Kabupaten Nunukan
175	Sulawesi Utara	BNNP SULAWESI UTARA	Kelurahan Perkamil	Paal Dua	Kota Manado
176	Sulawesi Utara	BNNP SULAWESI UTARA	Kelurahan Airmadidi Atas	Airmadidi	Kabupaten Minahasa Utara
177	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Kelurahan Inobonto	Bolaang	Kabupaten Bolaang Mongondow
178	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Desa Dondomon	Dumoga Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow
179	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Girian Indah	Girian	Kota Bitung
180	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Manembo-Nembo	Matuari	Kota Bitung
181	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Kleak	Malalayang	Kota Manado
182	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Karame	Singkil	Kota Manado
183	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Kendahe Satu	Kendahe	Kabupaten Kepulauan Sangihe
184	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan Taipa	Palu Utara	Kota Palu
185	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una Una	Kelurahan Dondo Barat	Ratolindo	Kabupaten Tojo Una-Una
186	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una Una	Desa Labuan	Ratolindo	Kabupaten Tojo Una-Una

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
187	Sulawesi Selatan	BNNP SULAWESI SELATAN	Desa Tenrigangkae	Mandai	Kabupaten Maros
188	Sulawesi Selatan	BNNP SULAWESI SELATAN	Desa Panakkukang	Pallangga	Kabupaten Gowa
189	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Pakkasalo	Sibulue	Kabupaten Watampone
190	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Pattiro Riolo	Sibulue	Kabupaten Watampone
191	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Amassangan	Wara	Kota Palopo
192	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Luminda	Wara Utara	Kota Palopo
193	Sulawesi Tenggara	BNNP SULAWESI TENGGARA	Desa Andadowi	Sampara	Kabupaten Konawe
194	Sulawesi Tenggara	BNNP SULAWESI TENGGARA	Desa Tanggobu	Morosi	Kabupaten Konawe
195	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Konaweha	Samaturu	Kabupaten Kolaka
196	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Ulu Konaweha	Samaturu	Kabupaten Kolaka
197	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Wua-Wua	Wua-Wua	Kota Kendari
198	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Bau Bau	Kelurahan Kadolomoko	Kokalukuna	Kota Baubau
199	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Bau Bau	Kelurahan Kadolokatapi	Wolio	Kota Baubau
200	Sulawesi Barat	BNNP SULAWESI BARAT	Kelurahan Simboro	Simboro Kepulauan	Kota Mamuju
201	Sulawesi Barat	BNNP SULAWESI BARAT	Desa Topoyo	Topoyo	Kabupaten Mamuju Tengah
202	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Kelurahan Lantora	Polewali	Kabupaten Polewali Mandar
203	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Desa Laliko	Campalagian	Kabupaten Polewali Mandar
204	Maluku	BNNP MALUKU	Negeri Hitumessing	Leihitu	Kabupaten Maluku Tengah
205	Maluku	BNN Kota Tual	Desa Ohoitel	Pulau Dullah Utara	Kota Tual
206	Maluku	BNN Kota Tual	Kelurahan Lodar El	Pulau Dullah Selatan	Kota Tual
207	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Daruba	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
208	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Gotalamo	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
209	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Tongowai	Tidore Selatan	Kota Tidore Kepulauan
210	Bali	BNNP BALI	Desa Kediri	Kediri	Kabupaten Tabanan
211	Bali	BNN Kab. Klungkung	Desa Akah	Klungkung	Kabupaten Klungkung
212	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Cakranegara Barat	Cakranegara	Kota Mataram

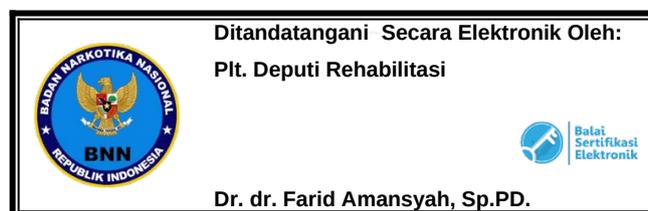
No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
213	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Gomong	Selaparang	Kota Mataram
214	Gorontalo	BNNP GORONTALO	Desa Ayula Utara	Bulango Selatan	Kabupaten Bone Bolango
215	Gorontalo	BNNP GORONTALO	Desa Ayula Timur	Bulango Selatan	Kabupaten Bone Bolango
216	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Tabulo	Mananggu	Kabupaten Boalemo
217	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Wonggahu	Paguyaman	Kabupaten Boalemo
218	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Buliide	Kota Barat	Kota Gorontalo
219	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Tomulubutao	Dungingi	Kota Gorontalo
220	Papua Barat	BNNP PAPUA BARAT	Kampung Aimasi	Distrik Prafi	Kabupaten Manokwari
221	Papua Barat	BNNP PAPUA BARAT	Kelurahan Manokwari Barat	Kecamatan Manokwari Barat	Kabupaten Manokwari
Berkembang (49 unit)					
1	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Perkebunan Tanah Datar	Datuk Tanah Datar	Kabupaten Batu Bara
2	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Tanjung Raja Selatan	Tanjung Raja	Kabupaten Ogan Ilir
3	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Jawa Kanan SS	Lubuklinggau Timur II	Kota Lubuklinggau
4	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Tanjung Tawang	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
5	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Jaya Tunggal	Tuah Negeri	Kabupaten Musi Rawas
6	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Sumber Asri	Sumber Harta	Kabupaten Musi Rawas
7	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Muara Batun	Jejawi	Kabupaten Ogan Komering Ilir
8	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Celikah	Kayu Agung	Kabupaten Ogan Komering Ilir
9	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Desa Landbaw	Gisting	Kabupaten Tanggamus
10	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Dusun Tengah	Seginim	Kabupaten Bengkulu Selatan
11	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Tanggo Raso	Pino Raya	Kabupaten Bengkulu Selatan
12	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Cempaka Putih	Ciputat Timur	Kota Tangerang Selatan
13	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Hegarmanah	Jatinangor	Kabupaten Sumedang
14	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Ciptasari	Pamulihan	Kabupaten Sumedang
15	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Sekip Lama	Singkawang Tengah	Kota Singkawang

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
16	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Jawa (Kampung Jawa)	Singkawang Tengah	Kota Singkawang
17	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Meliau Hilir	Meliau	Kabupaten Sanggau
18	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Meliau Hulu	Meliau	Kabupaten Sanggau
19	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Kumba	Jagoi Babang	Kabupaten Bengkayang
20	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Lembang	Sanggau Ledo	Kabupaten Bengkayang
21	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Kelurahan Tanjung Puri	Sintang	Kabupaten Sintang
22	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Kelurahan Ladang	Sintang	Kabupaten Sintang
23	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Kelurahan Kandangan Kota	Kandangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
24	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Karang Jawa	Padang Batung	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
25	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Kelurahan Lawanga Tawongan	Poso Kota Utara	Kabupaten Poso
26	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kelurahan Lemo	Makale Utara	Kabupaten Tana Toraja
27	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kelurahan Ariang	Makale	Kabupaten Tana Toraja
28	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kelurahan Tampo	Napabalano	Kabupaten Muna
29	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kelurahan Palangga	Duruka	Kabupaten Muna
30	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Lepo-Lepo	Baruga	Kota Kendari
31	Maluku	BNNP MALUKU	Kelurahan Kudamati	Nusaniwe	Kota Ambon
32	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Tikbari	Namrole	Kabupaten Buru Selatan
33	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Debowae	Waelata	Kabupaten Buru
34	Bali	BNNP BALI	Desa Banjar Anyar	Kediri	Kabupaten Tabanan
35	Bali	BNN Kab. Klungkung	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Klungkung	Kabupaten Klungkung
36	NTB	BNN Kab. Bima	Desa Nipa	Ambalawi	Kabupaten Bima
37	NTB	BNN Kab. Bima	Kelurahan Nae	Rasanae Barat	Kota Bima
38	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Sampir	Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
39	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Kelurahan Arab Kenangan	Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
40	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Plampang	Plampang	Kabupaten Sumbawa
41	NTB	BNN Kab.	Desa Moyo Mekar	Moyo Hilir	Kabupaten

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
		Sumbawa			Sumbawa
42	NTT	BNNP NTT	Desa Kuanheun	Kupang Barat	Kabupaten Kupang
43	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Liliba	Oebobo	Kota Kupang
44	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Naimata	Maulafa	Kota Kupang
45	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Meranti	Tapa	Kabupaten Bone Bolango
46	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Talulobutu Selatan	Tapa	Kabupaten Bone Bolango
47	Papua	BNNP PAPUA	Kelurahan Ardipura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
48	Papua	BNN Kab. Mimika	Inauga	Wania	Mimika
49	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kelurahan Dobonsolo	Sentani	Kabupaten Jayapura
Tumbuh (32 unit)					
1	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Kelurahan Sicincin	Payakumbuh Timur	Kota Payakumbuh
2	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Sakatiga	Indralaya	Kabupaten Ogan Ilir
3	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Muara Siban	Dempo Utara	Kota Pagar Alam
4	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Selibar	Pagar Alam Utara	Kota Pagar Alam
5	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Sidomulyo	Belitang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
6	Kep. Bangka Belitung	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Desa Air Putih	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
7	Kepulauan Riau	BNNP KEPULAUAN RIAU	Desa Lancang Kuning	Bintan Utara	Kabupaten Bintan
8	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Ngampel	Mojoarjo	Kota Kediri
9	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Wirang	Haruai	Kabupaten Tabalong
10	Kalimantan Timur	BNNP KALIMANTAN TIMUR	Kelurahan Petung	Penajam	Kabupaten Penajam Paser Utara
11	Kalimantan Timur	BNNP KALIMANTAN TIMUR	Kelurahan Nipah-Nipah	Kecamatan Penajam	Kabupaten Penajam Paser Utara
12	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Margo Mulyo	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan
13	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Loktuan	Bontang Utara	Kota Bontang
14	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Tinangkung	Tinangkung Selatan	Kabupaten Banggai Kepulauan
15	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Mansamat B	Tinangkung Selatan	Kabupaten Banggai

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
					Kepulauan
16	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Bahoea Reko-Reko	Bungku Barat	Kabupaten Morowali
17	Maluku Utara	BNNP MALUKU UTARA	Kelurahan Maliaro	Ternate Tengah	Kota Ternate
18	Maluku Utara	BNNP MALUKU UTARA	Kelurahan Mangga Dua	Ternate Selatan	Kota Ternate
19	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Rum	Tidore Utara	Kota Tidore Kepulauan
20	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Bakbakan	Gianyar	Kabupaten Gianyar
21	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Tegal Tugu	Gianyar	Kabupaten Gianyar
22	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Pempatan	Rendang	Kabupaten Karangasem
23	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Rendang	Rendang	Kabupaten Karangasem
24	NTT	BNNP NTT	Desa Bolok	Kupang Barat	Kabupaten Kupang
25	NTT	BNN Kab. Belu	Kelurahan Atambua	Kota Atambua	Kabupaten Belu
26	NTT	BNN Kab. Belu	Desa Tohe	Raihat	Kabupaten Belu
27	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Pentadio Barat	Telaga Biru	Kabupaten Gorontalo
28	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Tolotio	Tibawa	Kabupaten Gorontalo
29	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Tolite Jaya	Tolinggula	Kabupaten Gorontalo Utara
30	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Tolinggula Ulu	Tolinggula	Kabupaten Gorontalo Utara
31	Papua	BNN Kab. Mimika	Sempan	Mimika Baru	Mimika
32	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kampung Dosay	Sentani Barat	Kabupaten Jayapura
Rintisan (15 unit)					
1	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Mibo	Banda Raya	Kota Banda Aceh
2	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Ie Mirah	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan
3	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Bedilan	Belitang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
4	Kep. Bangka Belitung	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Desa Belo Laut	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
5	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Benda Baru	Pamulang	Kota Tangerang Selatan
6	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Pondok Benda	Pamulang	Kota Tangerang Selatan
7	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Pekauman	Banjarmasin Selatan	Kota Banjarmasin
8	Kalimantan	BNN Kota Bontang	Kelurahan	Bontang Barat	Kota Bontang

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
	Timur		Belimbing		
9	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Desa Malei	Lage	Kabupaten Poso
10	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Lanona	Bungku Tengah	Kabupaten Morowali
11	Bali	BNN Kab. Badung	Desa Mengwitani	Mengwi	Kabupaten Badung
12	Bali	BNN Kab. Badung	Kel. Kerobokan Kaja	Kuta Utara	Kabupaten Badung
13	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Ofalangga	Pantai Baru	Kabupaten Rote Ndao
14	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Tesabela	Pantai Baru	Kabupaten Rote Ndao
15	Papua	BNNP PAPUA	Kelurahan Gurabesi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
Pra Fase (2 unit)					
1	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Gorua	Tobelo Utara	Kabupaten Halmahera Utara
2	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Toweka	Galela	Kabupaten Halmahera Utara



REKAPITULASI CAPAIAN FASE PERKEMBANGAN UNIT IBM PER PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Provinsi	Capaian Fase Perkembangan Tahun 2024					
		Pra Fase	Rintisan	Tumbuh	Berkembang	Tangguh	Prima
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	0	2	0	0	10	10
2	Sumatera Utara	0	0	0	1	21	10
3	Sumatera Barat	0	0	1	0	8	1
4	Riau	0	0	0	0	10	0
5	Jambi	0	0	0	0	8	0
6	Sumatera Selatan	0	1	4	7	7	1
7	Lampung	0	0	0	1	10	1
8	Kep. Bangka Belitung	0	1	1	0	5	3
9	Kepulauan Riau	0	0	1	0	7	0
10	Bengkulu	0	0	0	2	3	1
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	5	3
12	Banten	0	2	0	1	7	0
13	Jawa Barat	0	0	0	2	18	11
14	Jawa Tengah	0	0	0	0	9	11
15	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	8
16	Jawa Timur	0	0	1	0	14	22
17	Kalimantan Barat	0	0	0	8	6	2
18	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	6	0
19	Kalimantan Selatan	0	1	1	2	13	1
20	Kalimantan Timur	0	1	4	0	2	1
21	Kalimantan Utara	0	0	0	0	4	2
22	Sulawesi Utara	0	0	0	0	9	1
23	Sulawesi Tengah	0	2	3	1	3	5
24	Sulawesi Selatan	0	0	0	2	6	0
25	Sulawesi Tenggara	0	0	0	3	7	0
26	Sulawesi Barat	0	0	0	0	4	0
27	Maluku	0	0	0	3	3	0

No.	Provinsi	Capaian Fase Perkembangan Tahun 2024					
		Pra Fase	Rintisan	Tumbuh	Berkembang	Tangguh	Prima
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Maluku Utara	2	0	3	0	3	0
29	Bali	0	2	4	2	2	4
30	NTB	0	0	0	6	2	2
31	NTT	0	2	3	3	0	0
32	Gorontalo	0	0	4	2	6	0
33	Papua	0	1	2	3	0	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	2	0



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
 Plt. Deputi Rehabilitasi



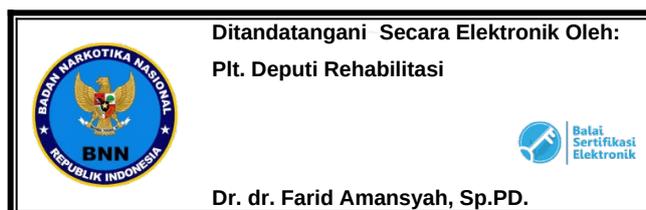

Dr. dr. Farid Amansyah, Sp.PD.

GAMBARAN KEGIATAN IBM TAHUN ANGGARAN 2024



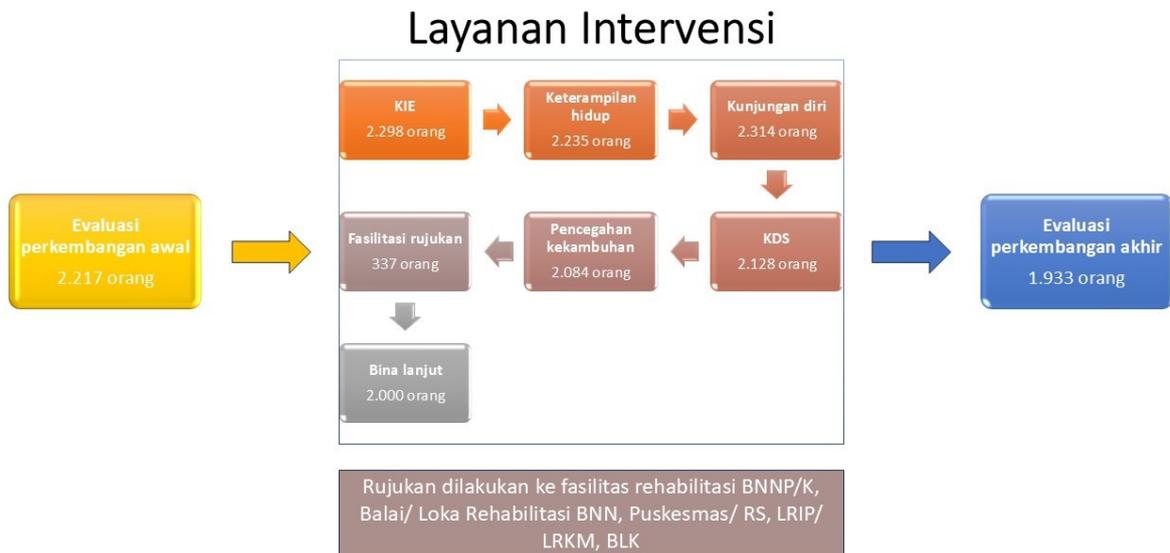
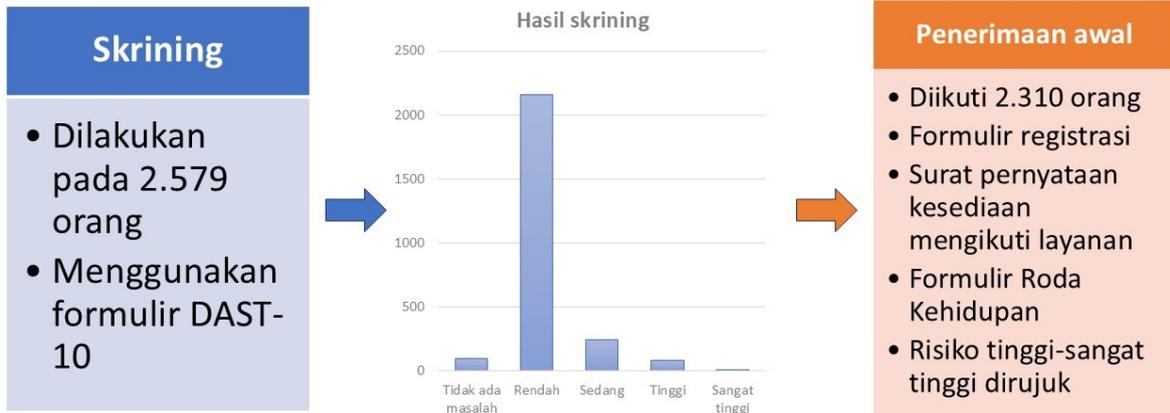
Kegiatan yang dilakukan oleh Agen Pemulihan dengan pendampingan petugas BNNP & BNNK/ Kota di tahun 2024 adalah:

- Kegiatan sosialisasi IBM dilakukan sebanyak 3.277 kali, dengan total peserta/ audiens sejumlah 73.749 orang. Sosialisasi dilakukan secara formal maupun informal, serta menggunakan media sosial. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi tentang program IBM kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di desa/ kelurahan
- Kegiatan pemetaan dilakukan sebanyak 1.330 kali di 1.853 RT/ dusun/ banjar, dan memperoleh informasi estimasi jumlah penyalah guna narkotika sebanyak 6.613 orang. Kegiatan ini bertujuan memperoleh informasi dan gambaran terkait penyalahgunaan narkotika di wilayah desa/ kelurahan.
- Kegiatan penjangkauan telah dilakukan untuk menjangkau 3.073 orang penyalah guna narkotika, dan yang bersedia ditindaklanjuti untuk masuk dalam layanan IBM adalah 2.346 orang. Kegiatan ini bertujuan mendekati penyalah guna narkotika dan keluarga/ orang terdekatnya agar mengikuti layanan IBM. Secara umum, alasan para penyalah guna narkotika menolak mengikuti layanan di IBM antara lain karena merasa belum siap, malu, takut ditangkap polisi, tidak terganggu dengan penyalahgunaan zatnya, tidak diizinkan keluarga, atau sibuk bekerja.



GAMBARAN LAYANAN IBM TAHUN ANGGARAN 2024

Skrining & Penerimaan Awal



Layanan intervensi bagi penyalah guna narkoba di IBM dilakukan oleh Agen Pemulihan dengan pendampingan petugas BNNP & BNNK/ Kota, dengan gambaran berikut:

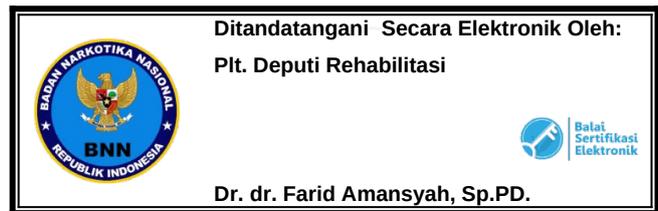
- Skrining dilakukan untuk mengidentifikasi risiko gangguan penggunaan narkoba menggunakan instrumen *Drug Abuse Screening Test* (DAST-10). Jumlah penyalah guna yang diskринing adalah 2.579 orang, dengan hasil:

- Tidak teridentifikasi adanya resiko : 97 orang (3,76%)
- Rendah : 2.158 orang (83,68%)
- Sedang : 243 orang (9,42%)
- Tinggi : 78 orang (3,02%)
- Sangat tinggi : 3 orang (0,12%)

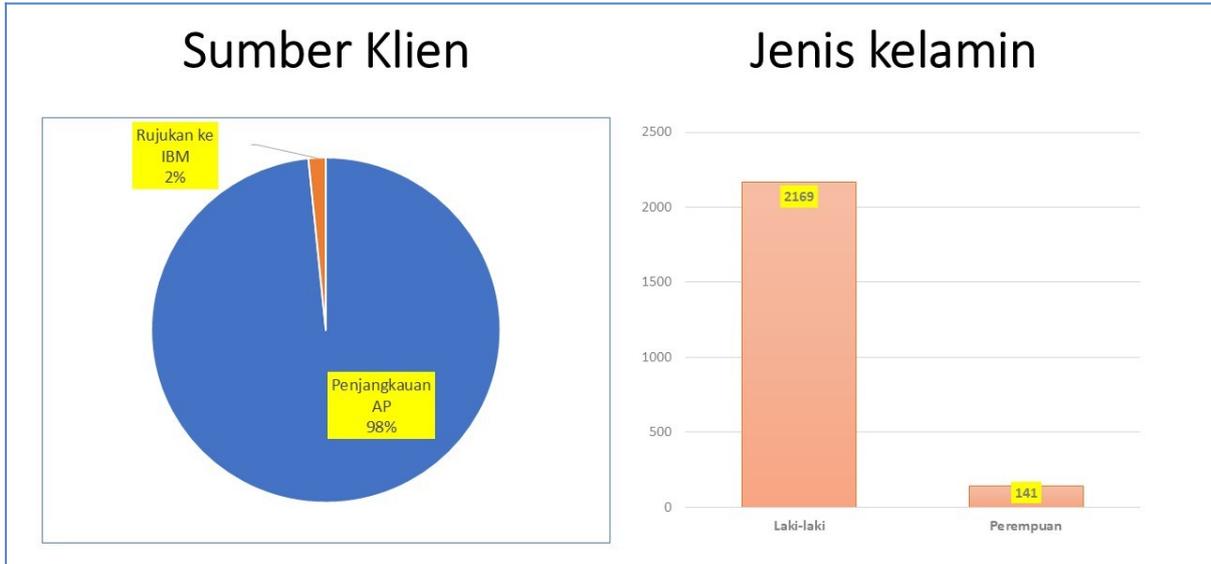
Klien yang dilayani di IBM adalah klien yang berada dalam kategori risiko Rendah hingga Sedang, dengan pendampingan petugas BNNP dan BNNKab/Kota.

- Penyalah guna yang telah diskriminasi dan dirujuk ke IBM untuk mengikuti layanan sebagai klien berjumlah 2.310 orang, semuanya telah mengikuti rangkaian Penerimaan Awal yaitu pengisian formulir registrasi, surat pernyataan kesediaan mengikuti layanan, serta formulir roda kehidupan.
- Klien IBM mengikuti layanan dalam waktu 16 minggu, terdiri dari:
 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) telah diikuti oleh 2.298 orang klien. KIE bertujuan meningkatkan pengetahuan, kepedulian dan mendorong perubahan sikap dan perilaku klien.
 - Keterampilan Hidup telah diikuti 2.235 orang klien, bertujuan membekali klien IBM dengan *soft skill* agar dapat kembali beradaptasi, produktif dan melakukan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari.
 - Kunjungan diri telah diikuti 2.314 orang klien, yang bertujuan membina hubungan, melakukan pemantauan dan mengetahui kondisi klien dalam lingkungannya sehari-hari. Kunjungan diri juga dilakukan untuk menambah kelengkapan data/ informasi tentang klien melalui wawancara dengan klien dan/ atau dengan anggota keluarga serta hasil observasi lingkungan tempat tinggal klien.
 - Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) telah diikuti 2.128 orang klien secara berkelompok, bertujuan mendorong anggota kelompok untuk saling memberikan dukungan, bertukar pengalaman dan keterampilan sehingga mampu meningkatkan pengetahuan, motivasi dan harapan satu sama lain.
 - Pencegahan kekambuhan diikuti 2.084 orang klien secara berkelompok, yang bertujuan membantu klien mengenal faktor pemicu, cara menghindarinya dan membangun keterampilan untuk mengatasi rasa ketagihan serta keterampilan menolak narkoba.
 - Sebanyak 337 orang klien difasilitasi untuk rujukan, antara lain ke fasilitas rehabilitasi BNNP & BNNK/ Kota, Balai/ Loka Rehabilitasi BNN, Puskesmas/ RS, Lembaga rehabilitasi instansi pemerintah/ komponen masyarakat, dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan kerja para klien agar bisa mandiri dan produktif secara ekonomi.

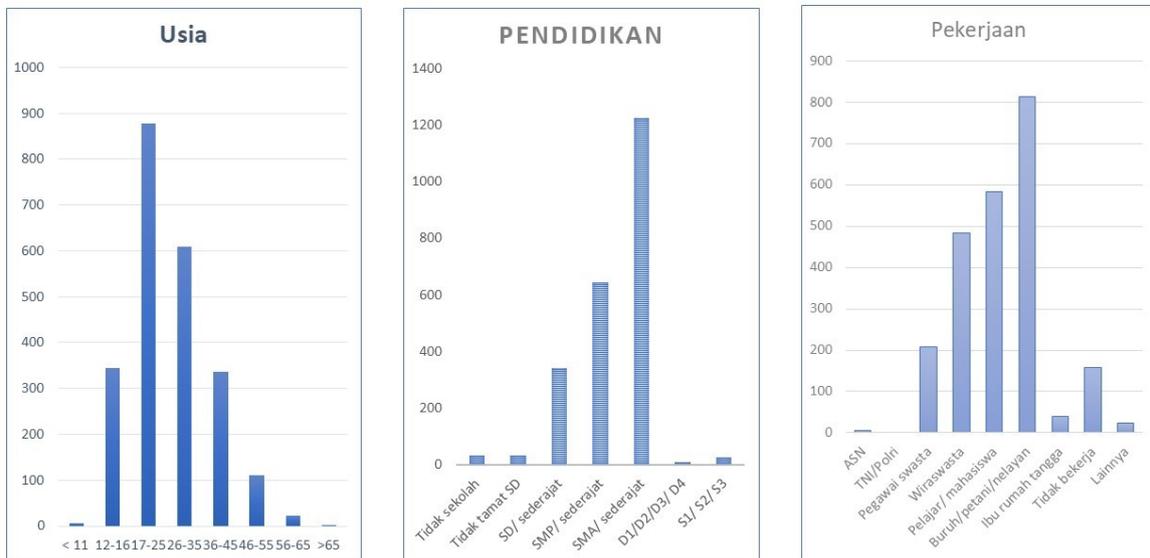
- Sebanyak 2.000 orang (86,58% dari jumlah klien) telah mengikuti rangkaian layanan bin a lanjut, yaitu penilaian pascarehabilitasi, pemantauan, pendampingan pemulihan, dan t erminasi yang dilakukan secara simultan oleh AP dan petugas BNNP & BNNK/ Kota
- Sebanyak 2.217 orang klien dilakukan evaluasi perkembangan tahap awal yaitu URICA, WHO-QoL, dan tes urin. Sementara klien yang telah dilakukan evaluasi perkembangan t ahap akhir adalah 1.933 orang
- Pemulihan penyalah guna narkoba tidak mungkin lepas dari keterlibatan keluarga dan/ atau orang terdekat. Pada tahun 2024, jumlah anggota keluarga/ orang terdekat yang dili batkan dalam layanan di IBM adalah 1.819 orang, terdiri dari orang tua, kakak, adik, sua mi/ istri, paman/ bibi atau guru. Beberapa klien IBM memilih untuk tidak melibatkan kelua rga dengan alasan takut, malu, atau berdomisili jauh dari keluarga.



GAMBARAN PROFIL KLIEN IBM TAHUN ANGGARAN 2024

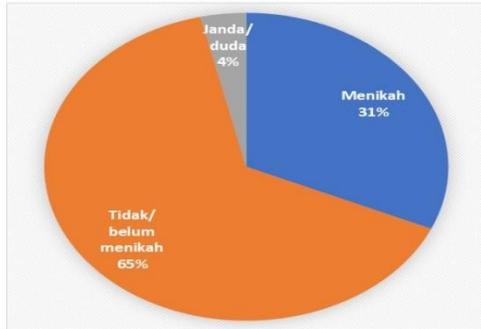


Total klien IBM pada tahun 2024 adalah 2.310 orang. Mayoritas merupakan hasil penjangkauan Agen Pemulihan, dan berjenis kelamin laki-laki.

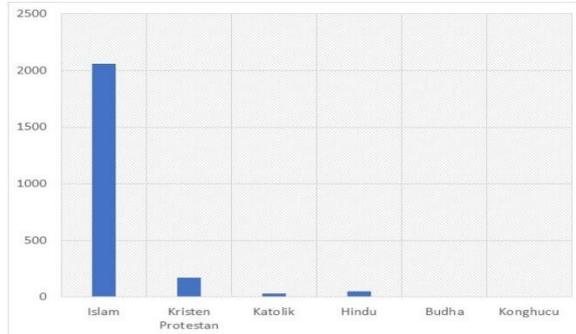


Mayoritas klien berada pada kelompok usia 17-25 tahun, dengan Pendidikan terakhir mayoritas adalah SMA/ sederajat, dan pekerjaan saat ini adalah buruh/ petani/ nelayan

Status Pernikahan

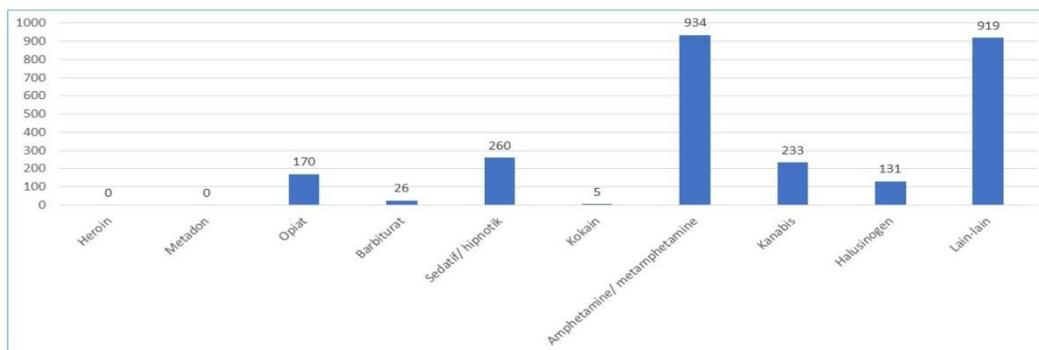


Agama



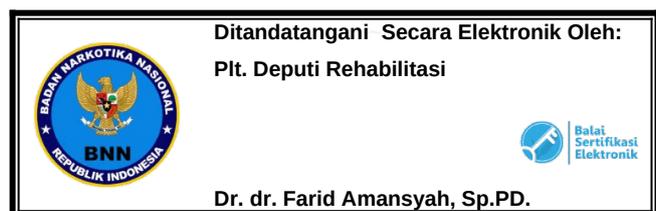
Mayoritas klien berstatus tidak/ belum menikah, dan mayoritas agama klien adalah Islam

Jenis zat yang digunakan saat ini



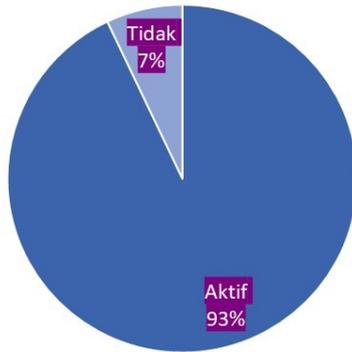
Ket: lain-lain mencakup alkohol, obat tanpa resep, inhalansia, komix, samcodin, zenith, bensin, tembakau gorilla, hexymer, tramadol, kratom, LL, carisoprodol, DMP

Jenis zat terbanyak yang digunakan oleh klien IBM adalah shabu, diikuti dengan kelompok sedatif/ hipnotik seperti benzodiazepine, dan ganja

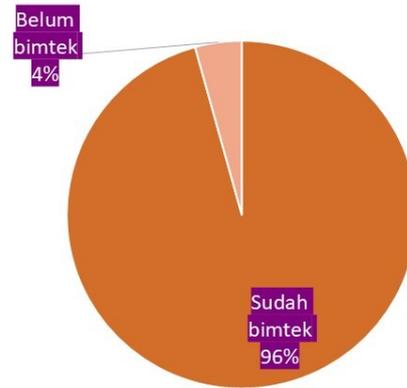


**GAMBARAN AGEN PEMULIHAN SEBAGAI PELAKSANA PROGRAM IBM
TAHUN ANGGARAN 2024**

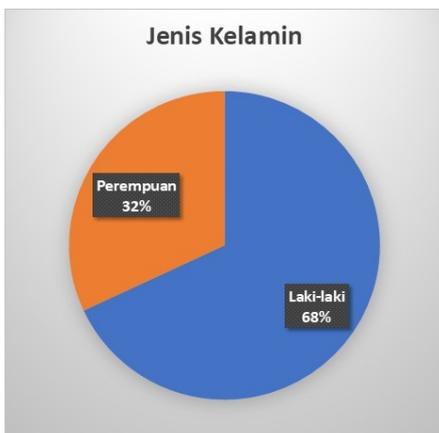
Keaktifan AP



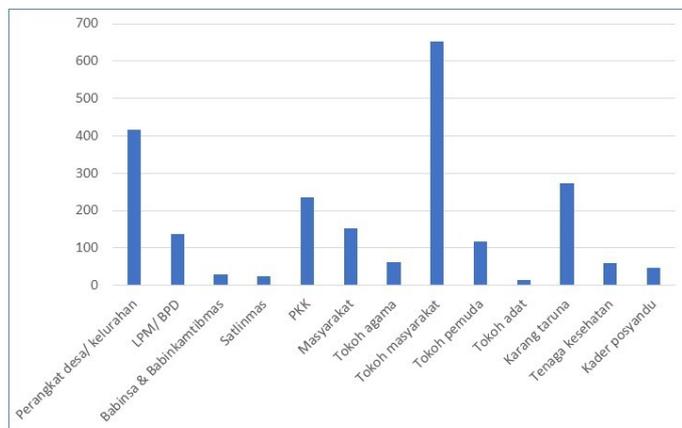
Bimtek AP



Jenis Kelamin



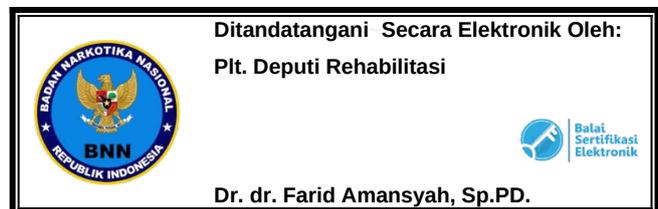
**Latar Belakang
Kemasyarakatan**



Di tahun 2024, gambaran AP sebagai berikut:

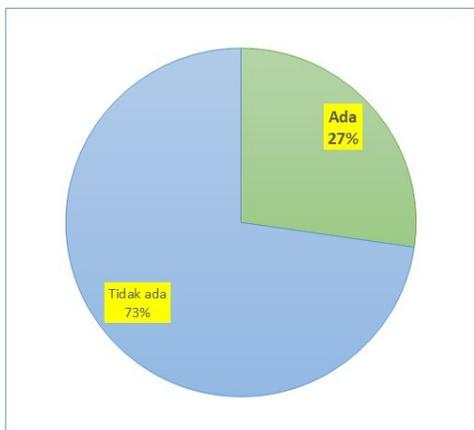
- Jumlah AP tahun 2024 adalah 2.210 orang, dan dari jumlah tersebut hanya 92,94% (2.054 orang) yang aktif menjalankan kegiatan & layanan IBM
- Sebanyak 95,70% dari total AP (2.115 orang) telah dilatih oleh petugas BNNP & BNNK/ Kota dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) secara resmi, sementara sisanya memperoleh informasi dengan metode tular ilmu di antara sesama AP maupun saat asistensi oleh petugas BNNP & BNNK/ Kota

- Mayoritas AP yaitu 1.504 orang (68,05%) berjenis kelamin laki-laki
- Latar belakang AP dalam masyarakat terdiri dari:
 - Sebanyak 18,82% (416 orang) merupakan perangkat desa/ kelurahan, 12 orang di antaranya adalah Kepala Desa/ Lurah
 - Sebanyak 6,15% (136 orang) merupakan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/ Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - Sebanyak 1,27% (28 orang) adalah perwakilan dari Babinsa dan Babinkamtibmas yang bertugas di Desa/ Kelurahan
 - Sebanyak 1,04% (23 orang) bertugas di Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
 - Sebanyak 10,59% (234 orang) adalah anggota Tim Penggerak PKK
 - Sebanyak 6,88% (152 orang) adalah perwakilan masyarakat, termasuk di antaranya mahasiswa, kelompok seni, pekerja sosial, penggiat/ relawan, dan organisasi kemasyarakatan
 - Sebanyak 2,81% (62 orang) adalah tokoh agama
 - Sebanyak 29,50% (652 orang) adalah tokoh masyarakat, termasuk di antaranya ketua RT, RW, kepala dusun, kepala lingkungan
 - Sebanyak 5,29% (117 orang) adalah tokoh pemuda
 - Sebanyak 0,59% (13 orang) adalah tokoh adat
 - Sebanyak 12,31% (272 orang) adalah ketua maupun anggota karang taruna
 - Sebanyak 2,67% (59 orang) adalah tenaga kesehatan, termasuk di antaranya adalah dokter, perawat dan petugas puskesmas, juga bidan desa
 - Sebanyak 2,08% (46 orang) adalah kader posyandu

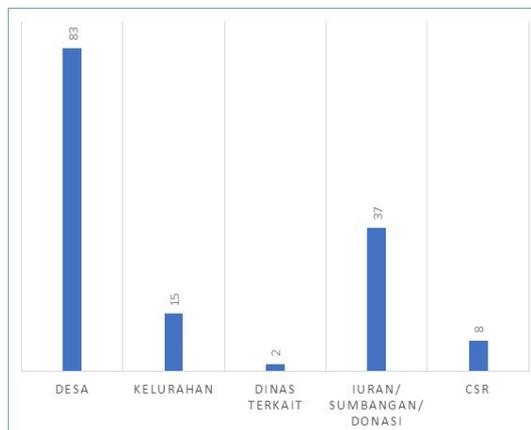


**GAMBARAN PENDANAAN MANDIRI UNTUK UNIT IBM
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pendanaan mandiri



Sumber



Pada tahun 2024, sebanyak 115 dari 418 unit IBM (27,51%) telah memperoleh dukungan pendanaan mandiri, mayoritas berasal dari pemerintah desa. Dukungan dari pihak kelurahan relatif lebih sulit diperoleh karena diperlukan adanya aturan hukum secara resmi yang mengatur hingga ke komponen dan sub komponen kegiatan. Dukungan dana bagi unit IBM yang lokasinya di kelurahan cenderung memanfaatkan iuran/ sumbangan/ donasi dari masyarakat maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan swasta yang berdomisili di lokasi tersebut. Daftar unit IBM yang memperoleh dukungan pendanaan tahun 2024 adalah:

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Balee Me	APBG	Rp4,000,000	Pembuatan papan nama IBM, struktur, alur, dan kegiatan IBM lainnya
2	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Juli Paseh	APBG	Rp3,000,000	Kegiatan IBM, pembuatan papan nama IBM, struktur organisasi, alur kegiatan
3	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Cot Girek Kandang	RAB Desa	Rp7,500,000	Peningkatan kompetensi satgas narkoba
4	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Paya	RAB Desa	Rp20,000,000	ATK, konsumsi, spanduk, honor

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
		we	Punteuet			dan atribut satgas
5	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Perdamaian	Dana desa	Rp2,000,000	Kegiatan IBM
6	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Kota Lintang	Dana desa	Rp2,000,000	Kegiatan IBM
7	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Mamplam	RAB Desa	Rp8,864,000	Operasional IBM
8	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Anoe Itam	RAB Gampong	Rp9,557,000	Studi banding ke lembaga rehabilitasi, operasionalisasi IBM
9	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Keuneukai	RAB Gampong	Rp8,000,000	Kegiatan IBM, insentif AP
10	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Sekip	RAB Desa	Rp10,953,052	Kegiatan IBM selama 10 bulan
11	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Paya Perupuk	RAB Desa	Rp10,000,000	Transport AP, kegiatan & layanan IBM
12	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Perlis	RAB Desa	Rp5,000,000	Kegiatan & layanan IBM
13	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Meranti	RAB Desa	Rp2,750,000	Honor AP
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Sei Alim Hasak	RAB Desa Sumbangan warga	Rp5,400,000	Honor AP, sewa posko IBM, konsumsi kegiatan
15	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Barbaran Jae	Dana desa	Rp5,400,000	Transport & insentif bulanan AP
16	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Sei Rejo	RAB Desa	Rp7,000,000	Insentif AP
17	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Dolok Manampang	RAB Desa	Rp7,000,000	Insentif AP
18	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Buntu Turunan	RAB Nagori	Rp6,000,000	Insentif AP
19	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Perkebunan Tanah Datar	RAB Desa	Rp7,000,000	Honor AP
20	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Kwala Gunung	RAB Desa	Rp5,000,000	Honor AP
21	Sumatera Barat	BNNP SUMATERA BARAT	Desa Balai Naras	RAB Desa	Rp6,590,000	Sosialisasi IBM
22	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Tanjung Raja Selatan	RAB Desa	Rp10,000,000	Operasional Unit IBM
23	Sumatera	BNN Kota	Desa Tanjung	Dana desa	Rp3,000,000	Honor AP

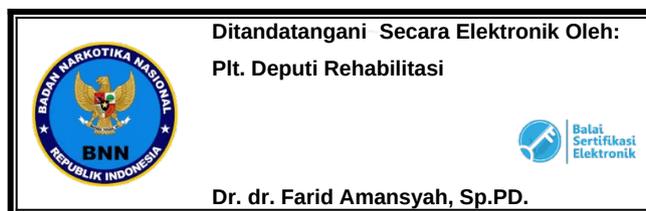
No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
	Selatan	Prabumulih	Telang			
24	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Bedilan	Dana desa	Rp25,000,000	Sosialisasi (termasuk desa bersinar)
25	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Sidomulyo	Dana desa	Rp40,000,000	Atribut AP, spanduk, kegiatan sosialisasi, ATK
26	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Tegal Binangun	RAB Desa	Rp3,000,000	
27	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Tetaan	RAB Desa	Rp3,000,000	Honor AP
28	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Sidoarjo	RAB Kampung	Rp2,594,000	Sosialisasi P4GN
29	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Bukit Besar	Kesbangpol Kota Dukungan warga	Rp5,550,000	Kegiatan & layanan IBM
30	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Asam	Kesbangpol Kota Dukungan warga	Rp5,850,000	Kegiatan & layanan IBM
31	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Rebo	RAB Desa	Rp3,500,000	Kegiatan IBM
32	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pagarawan	RAB Desa	Rp41,760,000	Honor AP, kegiatan IBM
33	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Timur	Dana Kelurahan (pemberdayaan masyarakat)	Rp20,000,000	Sosialisasi P4GN
34	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Bintaro	Dana kelurahan Sumbangan warga	Rp2,000,000	Kegiatan IBM, spanduk
35	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Penjaringan	Dana kelurahan Sumbangan warga	Rp3,450,000	Kegiatan IBM, flyer
36	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Semper Barat	Dana kelurahan Sumbangan warga CSR	Rp6,750,000	Spanduk, Kegiatan IBM
37	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipanas	RAB Desa	Rp15,000,000	Kegiatan IBM
38	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipetir	RAB Desa	Rp5,000,000	Sosialisasi IBM
39	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Pagelaran	RAB Desa	Rp10,000,000	Kegiatan P4GN
40	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Jabon Mekar	RAB Desa Sumbangan masyarakat	Rp28,103,000	Operasional IBM
41	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Cinta Asih	Dana Kades	Rp7,300,000	Spanduk, transport AP, konsumsi

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
						kegiatan
42	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Sukaratu	Dana Kades Sumbangan masyarakat	Rp3,000,000	Operasional IBM
43	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Mekarjaya	RAB Desa	Rp8,850,000	Sosialisasi P4GN
44	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Pasirtamiang	RAB Desa	Rp9,000,000	Operasional IBM
45	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Kahiyangan	Sumbangan warga	Rp2,500,000	Sosialisasi IBM
46	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Tempuran	RAB Desa	Rp15,000,000	Operasional IBM
47	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Muara	RAB Desa	Rp15,005,400	Operasional IBM
48	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Tlogosari Kulon	Sumbangan dari Kemensos	Rp5,100,000	Modal usaha klien IBM
49	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Gayamsari	Sumbangan masyarakat CSR	Rp2,650,000	Operasional IBM
50	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Bansari	RAB Desa	Rp77,623,000	Desa Bersinar Kegiatan IBM (termasuk pembelian CCTV)
51	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Gununggempol	RAB Desa	Rp7,968,000	Sosialisasi/ penyuluhan
52	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Bulurejo	Sumbangan masyarakat	Rp2,500,000	Operasional IBM
53	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Ringinarum	Dana desa	Rp2,350,000	Atribut AP, transport klien, sosialisasi IBM
54	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Kalitinggar	RAB Desa	Rp5,397,500	Penyuluhan penyalahgunaan narkotika
55	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Panican	Dana desa Sumbangan masyarakat	Rp8,100,000	Operasional IBM, banner
56	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Lawangaji	RAB Desa	Rp3,500,000	Operasional IBM
57	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Jeruklegi Kulon	RAB Desa Sumbangan masyarakat	Rp27,930,000	Sosialisasi P4GN, Rapat AP, sosialisasi
58	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Kebanggan	RAB Desa	Rp875,000	Transport AP
59	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Ledug	RAB Desa	Rp2,450,000	Sosialisasi IBM
60	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Giripurwo	APBDes	Rp8,000,000	Sosialisasi IBM
61	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Cerme	APBDes	Rp2,500,000	Sosialisasi IBM

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
		A				
62	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Giwangan	Dana Kelurahan	Rp4,330,000	Kegiatan IBM
63	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Wirogunan	RAB Kelurahan LPMK	Rp6,589,800	Workshop P4GN, dukungan pendaftaran kejar paket untuk sekolah klien
64	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kalurahan Sinduharjo	RAB Kelurahan	Rp10,450,000	Layanan IBM
65	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kalurahan Sinduadi	RAB Kelurahan	Rp6,200,000	Sosialisasi IBM
66	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kalurahan Potorono	Dana desa	Rp3,666,000	Sosialisasi IBM
67	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kalurahan Bangunharjo	RAB Desa	Rp6,600,000	Sosialisasi IBM
68	Jawa Timur	BNNP JAWA TIMUR	Desa Made	Dana desa luran masyarakat	Rp16,300,000	Operasional IBM
69	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Cerme Lor	Dana desa	Rp1,500,000	Operasional IBM
70	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Glindah	RAB Desa Sumbangan kades	Rp10,442,000	Sosialisasi IBM + tambahan untuk tes urin
71	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Wates	CSR luran AP	Rp3,250,000	Operasional IBM
72	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Meri	CSR luran AP	Rp3,550,000	Operasional IBM
73	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Karangsono	RAB Desa	Rp172,133,000	Operasional IBM dalam mendukung P4GN
74	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Sumberasri	RAB Desa	Rp20,000,000	Operasional IBM
75	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Kelurahan Temas	RAB Kelurahan	Rp1,225,000	Sosialisasi bahaya napza
76	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Junrejo	RAB Desa	Rp21,175,000	Sosialisasi IBM
77	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Kingking	Dana pemberdayaan kelurahan Sumbangan lurah	Rp3,000,000	Sosialisasi IBM, transport klien
78	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Wedoro	RAB Desa	Rp2,500,000	Sosialisasi IBM
79	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Medaeng	luran warga	Rp2,500,000	operasional IBM
80	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Pogalan	Dana desa	Rp15,000,000	Atribut AP, sosialisasi IBM
81	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kedungdowo	RAB Desa	Rp10,000,000	Honor AP, transport klien
82	Jawa Timur	BNN Kab.	Desa	RAB Desa	Rp9,545,000	Honor AP,

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
		Nganjuk	Kwagean			transport klien
83	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Dandangan	RAB Kelurahan	Rp1,150,000	Kegiatan IBM, atribut AP
84	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Ngampel	RAB Kelurahan	Rp10,000,000	Operasional IBM
85	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Gadang	RAB Kelurahan	Rp3,150,000	Operasional IBM
86	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Bandungrejosari	RAB Kelurahan	Rp8,052,000	Operasional IBM
87	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Paron	APBDes	Rp2,500,000	Operasional IBM
88	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Gadungan	APBDes	Rp17,365,000	Konsumsi & transport kegiatan IBM
89	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Karah	Iuran masyarakat	Rp2,500,000	Kegiatan IBM
90	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Wonorejo	Dana Lurah CSR	Rp6,200,000	Atribut AP, stiker, banner
91	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Tengah	Iuran masyarakat	Rp2,800,000	Operasional IBM
92	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Arang Limbung	APBDes	Rp7,430,000	Operasional IBM
93	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Galang	RAB Desa	Rp12,000,000	Kegiatan IBM, media sosialisasi
94	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Mantimin	APBDes	Rp6,000,000	Kegiatan & layanan IBM
95	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Loktuan	Dana Kelurahan CSR	Rp50,500,000	Study Banding ke Babes Lido, atribut AP, operasional IBM
96	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Air Hitam	Dinkes Bidang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (P2PTM) dan Dana kelurahan	Rp. 3.625.000	Sosialisasi IBM
97	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Kampung 6	Iuran warga	Rp2,700,000	Sosialisasi IBM
98	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Karang Rejo	Iuran warga	Rp2,700,000	Sosialisasi IBM
99	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Lelipang	RAB Kampung	Rp4,075,000	Kegiatan IBM
100	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kabobona	Dana desa	Rp8,950,000	Atribut AP, kegiatan IBM
101	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kotarindau	RAB Desa	Rp10,000,000	Kegiatan IBM, sarana prasarana, transport klien
102	Sulawesi	BNN Kota	Kelurahan	Iuran Pengusaha	Rp2,500,000	Operasional

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
	Tengah	Palu	Mamboro Barat			IBM
103	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Towale	CSR perusahaan yang dikelola desa	Rp5,000,000	Sosialisasi IBM, transport AP untuk penjangkauan
104	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Loli Dondo	CSR perusahaan yang dikelola desa	Rp16,639,000	transport AP, konsumsi kegiatan & layanan, honor AP
105	Maluku Utara	BNNP MALUKU UTARA	Kelurahan Mangga Dua	Sumbangan masyarakat	Rp3,500,000	Kegiatan & layanan IBM
106	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Patemon	RAB Desa Donatur	Rp43,550,000	Kegiatan IBM
107	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Lokapaksa	RAB Desa Donatur	Rp30,700,000	Kegiatan IBM
108	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Ubung Kaja	Sumbangan	Rp4,076,000	Operasional IBM
109	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Sumerta Kelod	Sumbangan	Rp2,850,000	Operasional IBM, atribut AP
110	NTB	BNNP NTB	Desa Tanjung	RAB Desa	Rp5,000,000	Kegiatan IBM
111	NTB	BNNP NTB	Desa Medana	RAB Desa	Rp5,000,000	Kegiatan IBM
112	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Moyo Mekar	RAB Desa	Rp4,800,000	Sosialisasi, tes urin
113	NTT	BNNP NTT	Desa Bolok	Anggaran desa	Rp1,500,000	Operasional IBM
114	NTT	BNNP NTT	Desa Kuanheun	RAB Desa	Rp2,000,000	Operasional IBM
115	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Meranti	APBDes	Rp10,500,000	Kegiatan IBM



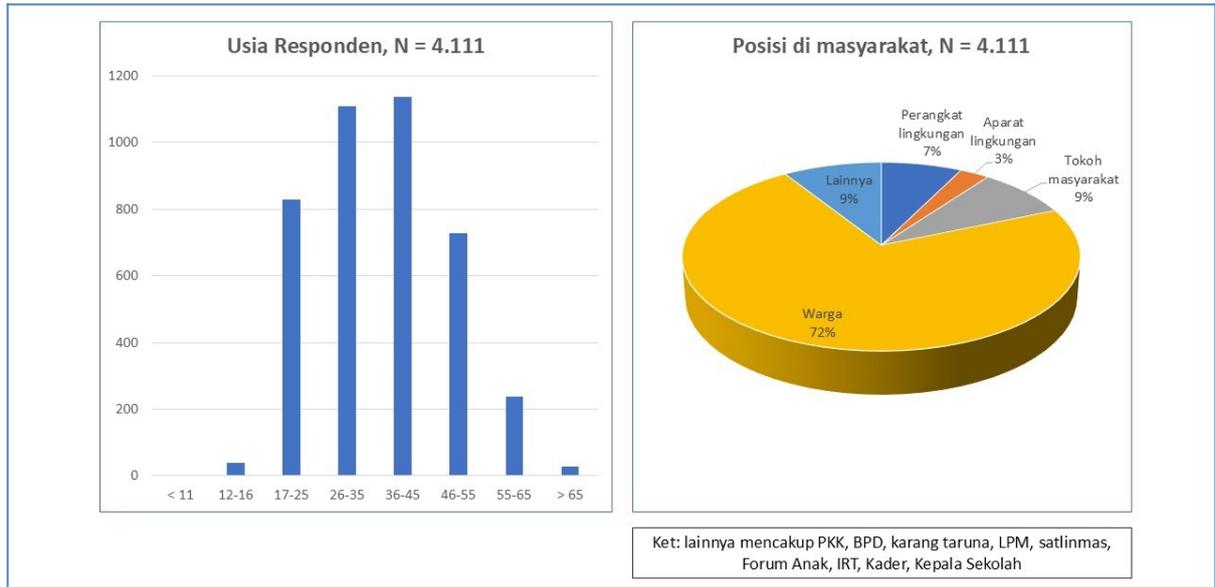
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN VIII
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4244/XII/DE/RH.02.03/2024/BNN
TANGGAL : 30 Desember 2024

HASIL SURVEY KEBERMANFAATAN PROGRAM IBM

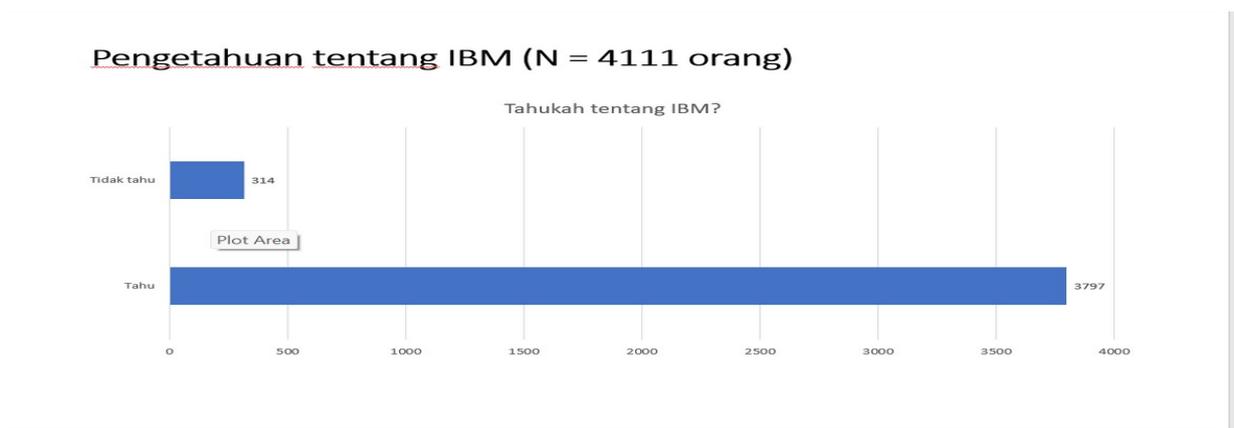
TERHADAP LINGKUNGAN & MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

A. Data demografi responden



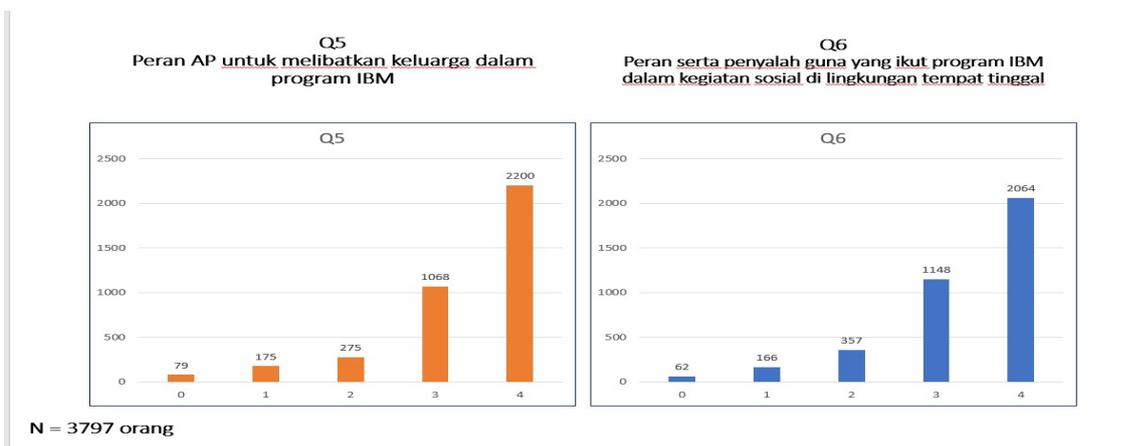
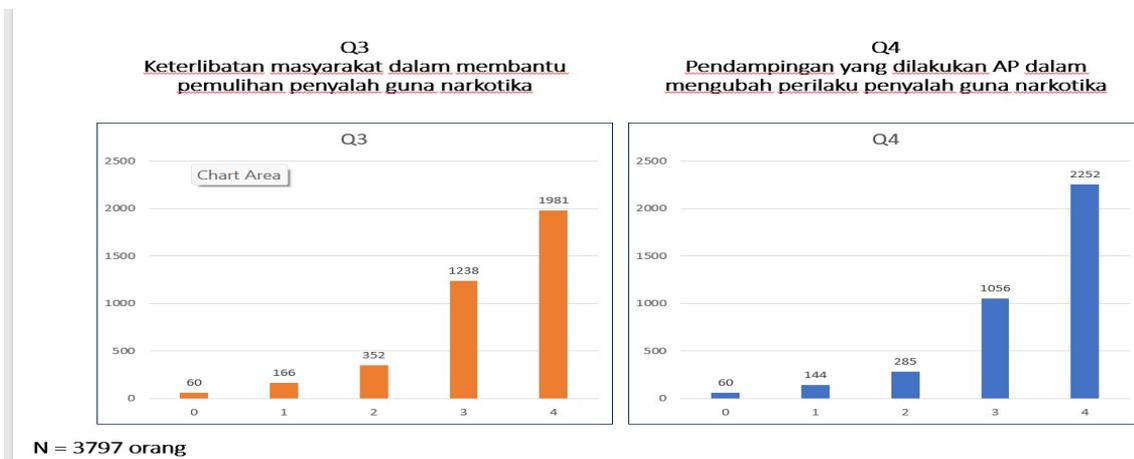
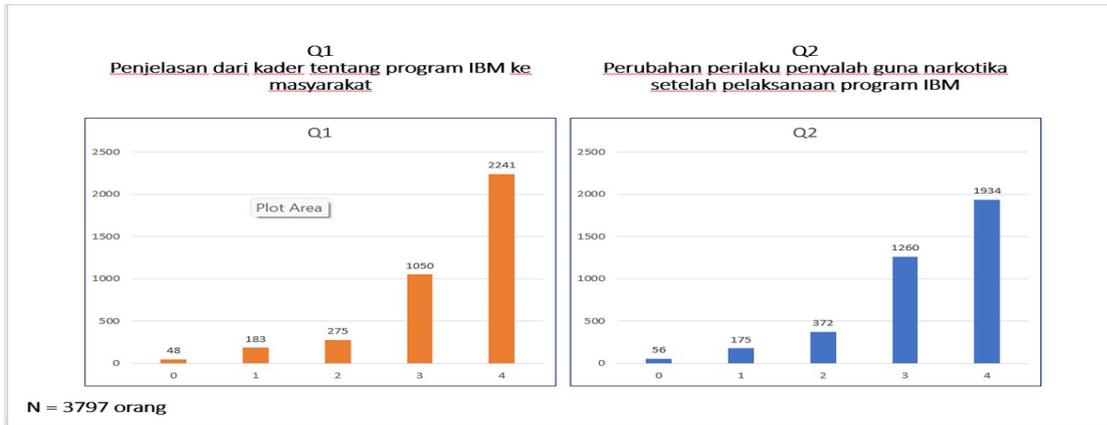
Mayoritas responden berada pada kelompok usia 36-45 tahun, dilanjutkan dengan selisih yang kurang signifikan dengan kelompok usia 26-35 tahun. Sebanyak 72% dari total responden merupakan warga masyarakat di lingkungan desa/ kelurahan Lokasi IBM.

B. Pengetahuan tentang IBM



Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden (92,36%) mengetahui keberadaan IBM di desa/ kelurahan tempat mereka berdomisili

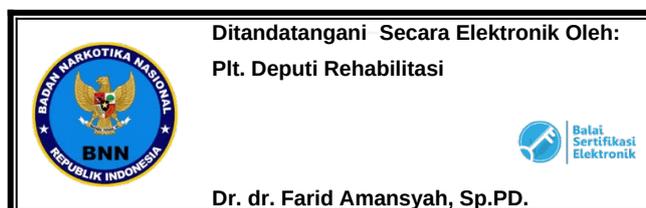
C. Hasil Pelaksanaan survey



Penjelasan hasil survey:

No.	Pernyataan	Definisi Operasional	Interpretasi
1	2	3	5
1	Penjelasan dari Agen Pemulihan tentang program IBM kepada masyarakat sekitar	Mengenalkan dan melakukan sosialisasi tentang IBM dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut mendukung kegiatan	ada, cukup jelas maksud serta tujuan, dan cukup banyak warga yang tergerak untuk berpartisipasi

No.	Pernyataan	Definisi Operasional	Interpretasi
1	2	3	5
2	Perubahan perilaku penyalah guna narkotika setelah pelaksanaan program IBM di lingkungan Bapak/ Ibu	Lebih menilai peran IBM terhadap dampak kepada lingkungan menurut pengamatan masyarakat	Sudah mulai tidak menimbulkan kegaduhan/ keributan negatif, kegiatan perkumpulan para penyalah guna sudah tidak terlihat dan sudah jelas mereka sudah berubah
3	Keterlibatan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalah guna narkotika di wilayah Bapak/ Ibu	Menilai keterlibatan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalah guna narkotika	Ada keterlibatan warga yang diwakili pengurus tingkat desa/ kelurahan, keluarga yang anggotanya mengalami permasalahan narkotika dan banyak komponen masyarakat lain dalam jumlah yang banyak (lebih dari 5 orang)
4	Pendampingan yang dilakukan AP dalam mengubah perilaku penyalah guna narkotika di lingkungan Bapak/ Ibu	Menilai peran AP dalam mendampingi dan memantau para penyalah guna	Agen Pemulihan melakukan pendampingan, pemantauan dan pembimbingan secara bersungguh-sungguh pada penyalah guna narkotika
5	Peran AP untuk melibatkan keluarga dalam program IBM	Dampak yang optimal dapat terlihat dari pelibatan keluarga, karena keluarga berperan dalam proses pemulihan penyalah guna narkotika. Dengan melibatkan keluarga, keluarga dapat paham bahwa masalah kecanduan dapat terjadi berulang, sehingga pandangan negatif tentang penyalah guna narkotika dari keluarga dapat diminimalkan/ dihilangkan	Agen Pemulihan melibatkan keluarga, ada upaya pemberian informasi dan pengetahuan, keluarga tidak lagi memandang negatif penyalahguna, dan keluarga berpartisipasi dengan mengajak keluarga lain atau masyarakat untuk mendukung IBM
6	Peran serta para penyalah guna narkotika yang mengikuti program IBM dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal	Menilai, apakah setelah didampingi oleh IBM, mantan penyalahguna narkotika mulai peduli dan terlibat dalam kegiatan sosial yang ada di masyarakat (pengajian, 17 Agustus, dsb).	Sangat berperan dalam kegiatan



**FAKTOR PENDUKUNG & PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PROGRAM IBM
TAHUN ANGGARAN 2024**

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
2	3
1. Petugas Pendamping IBM di BNNP & BNNK/ Kota	
Pemahaman yang komprehensif akan program IBM, termasuk alur kegiatan & layanan serta alokasi anggaran yang tersedia	Pendampingan unit IBM tidak menjadi prioritas karena banyaknya program bidang/ seksi Rehabilitasi yang harus dilakukan, dengan keterbatasan SDM yang dimiliki
Terjalannya hubungan baik dengan AP dan kepala desa/ lurah di lokasi IBM sebagai hasil dari tingginya intensitas koordinasi dan advokasi yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media bukan hanya tatap muka	Pemilihan dan penetapan lokasi IBM di daerah kategori waspada & bahaya, serta jaraknya cukup jauh dari BNNP/K/Kota terdekat sehingga mempengaruhi pembinaan IBM & menghambat program.
2. Agen Pemulihan (AP)	
Kepedulian serta kesadaran diri dari AP didukung oleh peran serta aktif dari lingkungan masyarakat sekitar akan dampak bahaya dari penyalahgunaan narkoba	Pemahaman yang kurang optimal serta ketidakpercayaan diri dalam melaksanakan program IBM
Komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai AP	Pelaksanaan program IBM tidak menjadi prioritas karena AP disibukkan dengan pekerjaan maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya
3. Kepala Desa/ Lurah	
Komitmen, minat dan perhatian dalam pemberdayaan masyarakat di desa/ kelurahan dalam bidang rehabilitasi penyalah guna narkoba	Program IBM tidak menjadi prioritas dalam kegiatan pembangunan dan/ atau pemberdayaan masyarakat di desa/ kelurahan
Kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba di wilayahnya yang memerlukan penanganan segera	Penolakan data & informasi adanya masalah penyalahgunaan narkoba di wilayahnya





KOTA JAKARTA UTARA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA UTARA
NOMOR: KEP/30/II/KA/RH.01.00/2024/BNN KOTA JAKARTA UTARA**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PROGRAM REHABILITASI INTERVENSI
BERBASIS MASYARAKAT**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA UTARA
SELAKU**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika samapai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa/Kelurahan, salah satunya yaitu dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/Kelurahan sesuai dengan kearifan local bagi penyalah guna narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;
 - c. bahwa Badan Narkotika nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika diwilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. c, perlu ditetapkan Keputusan kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara tentang penetapan

/.lokasi

lokasi/tempat diadakan program Intervensi Berbasis Masyarakat di wilayah Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa agar Desa dapat melaksanakan IBM;
 6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kab/Kota;
 7. Keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor : KEP/273/II/DE/RH.01.00/2024/BNN Tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional Di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024, pada tanggal 21 Februari 2024;
 8. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Administrasi Jakarta Utara;
 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara TA. 2024, Nomor : SP DIPA-066.01.2.419258/2024, tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENETAPAN LOKASI PROGRAM REHABILITASI INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menetapkan Lokasi yang wilayahnya terlampir dalam Surat Keputusan ini. Terhitung mulai bulan **Februari** s.d. **Desember 2024**.

KEDUA : Mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Agen Pemulihan program IBM kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara.

/.KEEMPAT....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

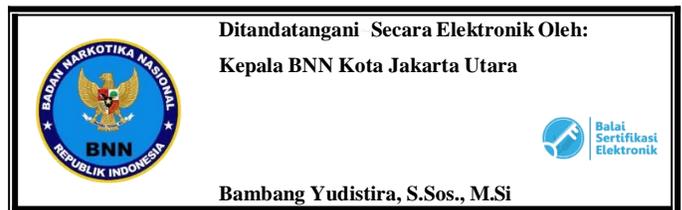
Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BNN;
2. Deputi Rehabilitasi BNN;
3. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta;
4. Walikota Kota Adm. Jakarta Utara;
5. Camat Kecamatan Penjaringan;
6. Camat Kecamatan Cilincing;
7. Lurah Kelurahan Penjaringan;
8. Lurah Kelurahan Semper Barat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

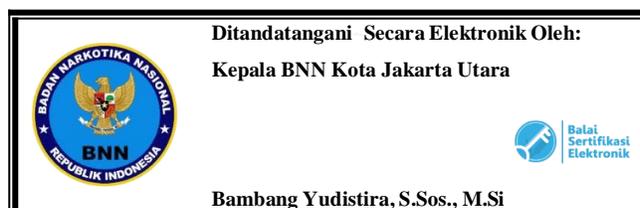
Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Februari 2024



**DAFTAR NAMA LOKASI
PROGRAM REHABILITASI INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DI JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Wilayah	Keterangan
1	2	3
1.	Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan	Prioritas Nasional
2.	Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing	Prioritas Nasional

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Februari 2024





REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	3236 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	PAGU REALISASI	0 0.00%	41,528,000 38,328,000 (92.29%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	41,528,000 38,328,000 (92.29%)
		SISA	0	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000
2	3237 Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	PAGU REALISASI	0 0.00%	32,840,000 32,839,290 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	32,840,000 32,839,290 (100.00%)
		SISA	0	710	0	0	0	0	0	0	0	710
3	3238 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran Bnn	PAGU REALISASI	0 0.00%	3,445,000 3,445,000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	3,445,000 3,445,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3239 Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	PAGU REALISASI	0 0.00%	1,174,105,000 1,168,184,471 (99.50%)	21,500,000 20,042,892 (93.22%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,195,605,000 1,188,227,363 (99.38%)
		SISA	0	5,920,529	1,457,108	0	0	0	0	0	0	7,377,637
5	3247 Penyelenggaraan Advokasi	PAGU REALISASI	0 0.00%	106,000,000 100,600,000 (94.91%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	106,000,000 100,600,000 (94.91%)
		SISA	0	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	5,400,000
6	3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	PAGU REALISASI	0 0.00%	10,795,000 10,795,000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	10,795,000 10,795,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	3257 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	PAGU REALISASI	0 0.00%	173,370,000 173,370,000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	173,370,000 173,370,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA UTARA

8	3258 Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	PAGU REALISASI	0 0.00%	71,600,000 71,600,000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	71,600,000 71,600,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	PAGU REALISASI	0 0.00%	14,665,000 14,665,000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	14,665,000 14,665,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	PAGU REALISASI	0 0.00%	169,444,000 169,444,000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	169,444,000 169,444,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3979 Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	PAGU REALISASI	0 0.00%	8,690,000 8,690,000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	8,690,000 8,690,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5936 Pengelolaan Informasi dan Edukasi	PAGU REALISASI	0 0.00%	39,895,000 39,895,000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	39,895,000 39,895,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	0 (0.00%)	1,846,377,000 1,831,855,761 (99.21%)	21,500,000 20,042,892 (93.22%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,867,877,000 1,851,898,653 (99.14%)
		SISA	0	14,521,239	1,457,108	0	0	0	0	0	0	15,978,347